

Di mata banyak orang, anak berkebutuhan khusus sering dipandang “berbeda” atau “kurang”, padahal di balik label itu tersimpan bakat, dan kekuatan luar biasa. Dalam *Difabel vs Stigma*, Adnan Achiruddin Saleh menelusuri akar prasangka yang membelenggu kehidupan difabel, menggambarkan bagaimana stereotip negatif dapat meruntuhkan rasa percaya diri dan menutup akses mereka pada pendidikan serta kesempatan sosial. Berdasarkan penelitian terkini dan ditulis dengan kepekaan empatik, buku ini membimbing pembaca untuk memahami urgensi pendidikan inklusif sebagai landasan kesetaraan, menyelami kisah-kisah perjuangan keluarga dan komunitas, serta mendorong advokasi kebijakan yang nyata. Lebih dari seruan moral semata, *Difabel vs Stigma* menghadirkan wawasan praktis tentang cara mendobrak tembok prasangka dan mengubah sikap kolektif menuju penerimaan yang sejati. Bagi orang tua, pendidik, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan ramah, karya ini menjadi peta yang membuka pintu bagi anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh, berkarya, dan bersinar sesuai potensi mereka.

DIFABEL VS STIGMA

Adnan Achiruddin Saleh, M.Si.



Adnan Achiruddin Saleh, M.Si.

Difabel vs Stigma

Penulis:

Adnan Achiruddin Saleh, M.Si.

Editor:

M. Takdir

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2025

Difabel vs Stigma

Penulis

Adnan Achiruddin Saleh, M.Si.

Editor

M. Takdir

Desain Sampul

....

Penata Letak

Muh. Ilham Jaya, M.Pd.

Copyright IPN Press,
ISBN: 978-623-8563-05-0
199 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, Juni 2025

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 MEMBUKA JENDELA: MENGUNGKAP REALITAS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI BALIK STIGMA.....	1
Definisi Anak Berkebutuhan Khusus.....	3
Stigma Masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus	6
Realitas Anak Berkebutuhan Khusus	8
Dampak Stigma terhadap Anak berkebutuhan Khusus.....	10
Upaya Mengatasi Stigma dan Mendorong Inklusi.....	12
BAB 2 MENGUBAH STIGMA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS ABK.....	15
Stigma dan Dampaknya pada ABK	20
Strategi Mengubah Stigma Masyarakat terhadap ABK.....	22
Pentingnya Pendidikan Inklusif.....	25
BAB 3 PERSPEKTIF ORANG TUA MENGENAI PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK).....	33
Pemahaman Orang Tua terhadap Pendidikan Inklusif	35
Tantangan dan Hambatan Orang tua	37
Stigma Masyarakat terhadap Pendidikan Inklusif	38
Peran Orang tua dalam Pendidikan Inklusif.....	40
BAB 4 MELAWAN STIGMA DISKRIMINATIF STRATEGI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.....	44
Diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.....	48
Strategi dan pemberdayaan penyandang disabilitas.....	51
Peranan Orang Tua	60
Dukungan Sosial	67

BAB 5 KECACATAN BERPIKIR SESEORANG TERHADAP KELOMPOK DIFABEL	79
Kelompok Difabel	82
Difabel bukan Beban, Melainkan sebuah Kekuatan	84
Stigma dan Cacat Berpikir Terhadap Kelompok Difabel.....	96
Dampak Stigma Sosial terhadap Anak Berkebutuhan Khusus ...	100
Mengatasi Stigma Sosial terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.	101
BAB 6 MAKNA STIGMA SOSIAL TERHADAP DISABILITAS	104
Stigma Sosial.....	110
Stigma Ableisme	111
Stigma sosial bagi disabilitas	120
Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas Diskriminasi Penyandang Disabilitas.....	122
BAB 7 STIGMA PENYANDANG DISABILITAS DALAM BEKERJA.....	126
Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja.....	128
Keterbatasan Akomodasi Kerja	137
Rasa Percaya Diri Rendah	138
Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Fisik di Sektor Kesempatan Kerja.....	139
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas	141
BAB 8 COUNTER-STIGMA PADA PENYANDANG DISABILITAS ATAS PERAN DI DALAM KESEIMBANGAN DUNIA	150
Konsep Keseimbangan Dunia Terhadap Manusia	151
Intervensi Pragmatis.....	152
Semua Manusia dianugerahi Kehidupan	154
Penyandang Disabilitas dalam Peran Keseimbangan Dunia	156
BAB 9 STIGMATISASI ANAK RETARDASI MENTAL	159

Stigmatisasi.....	161
Retardasi Mental.....	163
Dinamika Stigma terhadap Penderita Retardasi Mental	164
Stigma Diri Keluarga Anak Retardasi Mental	167
BAB 10 MENGATASI STIGMA NEGATIF MASYARAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS	169
Mengatasi stigma dengan Mengedukasi masyarakat tentang stigma terhadap penyandang disabilitas.....	180
Terapi Psikologi Untuk Penyandang Disabilitas.....	182
Mengubah Stigma Negatif Masyarakat terhadap ABK Down Syndrome untuk Meningkatkan Kualitas Hidupnya	184

BAB 1

MEMBUKA JENDELA: MENGUNGKAP REALITAS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI BALIK STIGMA

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dalam proses belajar dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Perbedaan ini bisa berupa kesulitan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, belajar, atau bahkan kombinasi dari semuanya. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih belum memahami kondisi ini dengan baik, sehingga sering kali anak berkebutuhan khusus mendapatkan stigma negatif. Setiawati & Na'imah (2020) mengemukakan bahwa anak berkebutuhan khusus, atau sering disebut ABK, adalah individu yang memiliki perbedaan dari anak-anak sebaya atau rata-rata pada umumnya. Perbedaan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, termasuk proses pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami kelainan atau penyimpangan, baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional.

Adapun Jenis-jenis kelainan ABK yang dimaksud meliputi; Tunanetra, anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik kebutuhan menyeluruh atau sebagian. Tunarungu; anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Tunadaksa; anak yang mengalami kelainan atau cacat pada alat gerak (tulang, sendi, otot) yang memerlukan pelayanan khusus. Berbakat; anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggungjawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Tunagrahita; anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Lamban belajar (slow learner);

anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik; Anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, seperti disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Anak yang mengalami gangguan komunikasi; Anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, atau kelancaran bicara. Tunalaras; anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan berperilaku tidak sesuai dengan norma. ADHD/GPPH (Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas): Gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa dengan gejala seperti gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus. Autisme: Gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif (Chamidah, 2010)

Namun pandangan atau stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) seringkali mencakup persepsi negatif, diskriminasi, dan prasangka yang dapat mempengaruhi pengalaman dan kesejahteraan ABK. Contohnya ada beberapa masyarakat yang saya temui pernah mengatakan bahwa “Mereka hanya akan mengganggu anak-anak normal di sekolah maupun diluar sekolah”,” mereka pasti akan menjadi beban bagi keluarga mereka” meskipun ada juga sebagian yang menganggap ABK sebagai objek simpati walaupun tampak positif terlalu banyak simpati juga dapat menjadi bentuk stigma. Stigma ini dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk pendidikan, media, dan interaksi sosial, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan ABK. Dalam jurnal yang ditemukan, "Dukungan Sosial dan Strategi Menghadapi Stigma Negatif Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan" menyoroti pentingnya mengatasi stigma ini untuk memastikan bahwa ABK mendapatkan dukungan sosial yang memadai dan strategi yang efektif dalam

menghadapi stigma negatif. Jurnal ini menekankan bahwa stigma negatif terhadap ABK dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak (Widhiati dkk, 2022).

Stigma ini dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk persepsi negatif terhadap ABK, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan hak-hak ABK, serta diskriminasi yang dialami oleh ABK dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan. Dalam konteks ini, keberadaan seorang anak dengan kebutuhan khusus tidak selalu mencerminkan ketidak mampuan mental, emosional, atau fisik. Mereka memiliki ciri-ciri unik yang membedakan mereka dari anak-anak pada umumnya. Sebagai contoh, ada anak dengan kebutuhan khusus yang tunarungu. Meskipun secara fisik dia termasuk anak dengan kebutuhan khusus, namun hal itu tidak menjamin bahwa dia tidak memiliki kelebihan dalam aspek mental dan emosional yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak normal. Misalnya, seorang anak tunarungu mungkin memiliki kecerdasan matematik-logis yang luar biasa, atau jenis kecerdasan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk tidak membuat perbedaan dalam perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Definisi Anak Berkebutuhan Khusus

Pengertian dan cakupan anak berkebutuhan khusus.

Istilah "anak berkebutuhan khusus" tidak merupakan terjemahan atau kata lain dari "anak penyandang cacat", tetapi mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen (penyandang cacat). Oleh karena itu, menyebut ABK selalu harus diikuti dengan ungkapan termasuk anak penyandang cacat, yang menunjukkan bahwa anak penyandang cacat merupakan

bagian atau anggota dari ABK. Ini menunjukkan bahwa lingkup pendidikan kebutuhan khusus menjadi sangat luas, berbeda dengan lingkup pendidikan khusus yang hanya menyangkut anak penyandang cacat (Alimin, 2012).

Adapun cakupan ABK dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis hambatan mereka:

1. Anak Berkebutuhan Khusus Bersifat Sementara (Temporer): Ini mencakup anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan dapat menjadi ABK permanen.
2. Anak Berkebutuhan Khusus yang Bersifat Menetap (Permanen): Ini adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan interaksi-komunikasi, gangguan emosi, sosial dan tingkah laku (Alimin, 2012).

Jenis kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki anak-anak.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki berbagai jenis kebutuhan yang beragam, yang mencakup berbagai aspek perkembangan dan fungsi. Berikut ini adalah beberapa jenis kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh anak-anak:

1. Kebutuhan Pendengaran: Anak-anak dengan gangguan pendengaran memerlukan peralatan bantu pendengaran, seperti alat bantu dengar, dan terapi logopeda untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi.
2. Kebutuhan Penglihatan: Anak-anak dengan gangguan penglihatan memerlukan peralatan bantu penglihatan, seperti kacamata, dan terapi pengembangan

- kemampuan visual untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan visual mereka.
3. Kebutuhan Motorik: Anak-anak dengan gangguan motorik memerlukan terapi fisik dan olahraga untuk membantu mereka mengembangkan koordinasi motorik dan kekuatan.
 4. Kebutuhan Emosional dan Sosial: Anak-anak dengan gangguan emosional dan sosial memerlukan terapi psikologi dan intervensi sosial untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan emosional dan sosial mereka.
 5. Kebutuhan Perilaku: Anak-anak dengan gangguan perilaku memerlukan terapi perilaku untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan perilaku yang sehat dan mengendalikan perilaku yang tidak terkontrol.
 6. Kebutuhan Belajar: Anak-anak dengan gangguan belajar memerlukan strategi pembelajaran yang disesuaikan untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan belajar mereka.
 7. Kebutuhan Kognitif: Anak-anak dengan gangguan kognitif memerlukan terapi kognitif untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan kognitif mereka, seperti memori, perhatian, dan kemampuan berpikir.
 8. Kebutuhan Komunikasi: Anak-anak dengan gangguan komunikasi memerlukan terapi komunikasi untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi mereka (Nisa dkk, 2018).

Stigma Masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus

Pengertian dan sifat stigma terhadap anak berkebutuhan khusus

Stigma terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) merujuk pada persepsi negatif, diskriminasi, dan prasangka yang dialami oleh ABK dalam masyarakat. Stigma ini dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk pendidikan, media, dan interaksi sosial, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan ABK. Stigma ini seringkali mencakup persepsi negatif terhadap ABK, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan hak-hak ABK, serta diskriminasi yang dialami oleh ABK dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan.

Sifat stigma terhadap ABK mencakup beberapa aspek penting:

1. **Persepsi Negatif:** Masyarakat seringkali memiliki persepsi negatif terhadap ABK, yang dapat berasal dari kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan hak-hak ABK. Persepsi negatif ini dapat mengakibatkan diskriminasi dan pengalaman yang kurang menguntungkan bagi ABK.
2. **Diskriminasi:** ABK seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Diskriminasi ini dapat berupa pengalaman yang kurang menguntungkan, akses yang terbatas terhadap fasilitas dan layanan, dan prasangka yang tidak menghargai kontribusi dan potensi ABK.
3. **Prasangka:** Prasangka adalah persepsi atau keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti atau fakta yang sebenarnya. Prasangka terhadap ABK dapat mengakibatkan stereotip dan persepsi negatif yang

dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan ABK (Widhiati dkk, 2022).

Contoh-contoh stigma yang sering dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarganya

Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) seringkali menghadapi berbagai jenis stigma, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh stigma yang sering dihadapi oleh ABK dan keluarganya:

1. **Stigma Sosial:** ABK seringkali menghadapi stigma sosial yang menyatakan bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan kegiatan masyarakat. Ini dapat mengakibatkan pengalaman yang kurang menguntungkan dan isolasi sosial.
2. **Stigma Pendidikan:** ABK seringkali menghadapi stigma pendidikan yang menyatakan bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini dapat mengakibatkan akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan layanan khusus yang diperlukan.
3. **Stigma Kesehatan:** ABK seringkali menghadapi stigma kesehatan yang menyatakan bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Ini dapat mengakibatkan akses yang terbatas terhadap perawatan kesehatan dan terapi yang diperlukan.
4. **Stigma Pekerjaan:** ABK seringkali menghadapi stigma pekerjaan yang menyatakan bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini dapat mengakibatkan pengalaman yang kurang menguntungkan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

5. Stigma Keluarga: Keluarga ABK seringkali menghadapi stigma yang menyatakan bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu untuk menjadi bagian dari masyarakat. Ini dapat mengakibatkan pengalaman yang kurang menguntungkan dan isolasi sosial.
6. Stigma Emosional dan Sosial: ABK seringkali menghadapi stigma emosional dan sosial yang menyatakan bahwa mereka tidak layak atau tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial yang layak. Ini dapat mengakibatkan pengalaman yang kurang menguntungkan dan kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam (Widhiati dkk, 2022).

Realitas Anak Berkebutuhan Khusus

Potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus

Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki potensi dan kelebihan yang signifikan, meskipun mereka seringkali menghadapi tantangan dan hambatan. Berikut adalah beberapa potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh ABK:

1. Kemampuan Intelektual: ABK seringkali memiliki potensi intelektual yang tinggi, termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Mereka juga seringkali memiliki kemampuan untuk memahami konsep yang lebih kompleks dan abstrak dibandingkan dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus.
2. Kemampuan Empati: ABK seringkali memiliki kemampuan empati yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini dapat membantu mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menjalin hubungan yang mendalam.

3. Kemampuan Adaptasi: ABK seringkali menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi.
4. Kemampuan Komunikasi: Meskipun ABK seringkali mengalami kesulitan dalam komunikasi, mereka juga seringkali memiliki kemampuan unik dalam berkomunikasi, seperti kemampuan untuk menyampaikan ide dan perasaan dengan cara yang unik dan menarik.
5. Kemampuan Menginspirasi: ABK seringkali menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, baik melalui karya seni, musik, atau inovasi. Mereka seringkali menggunakan kebutuhan khusus mereka sebagai inspirasi untuk menciptakan solusi inovatif dan berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat (Hanifah dkk, 2021).

Setiap anak memiliki kemampuan yang unik, meskipun memiliki kebutuhan khusus.

Setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki kemampuan yang unik dan spesifik. Meski memiliki kebutuhan khusus, ABK seringkali menunjukkan kemampuan akademik, ekspresi emosi, dan kemandirian yang luar biasa. Berikut adalah beberapa contoh kemampuan unik yang dimiliki oleh ABK:

1. Kemampuan Akademik: ABK dapat dibimbing dalam menggunakan alat bantu seperti kertas diagram saat membuat tugas matematika, yang dapat membuat mereka lebih fokus. Sarana pembelajaran juga dapat dimanipulasi semenarik mungkin untuk menjaga minat anak, seperti anak dengan ADHD. Tugas dikomunikasikan se jelas mungkin agar anak se pakat

- bahwa hasil akhir adalah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh nilai yang bagus 5.
2. Ekspresi Emosi: Guru harus menyadari keterbatasannya dalam memberi perhatian, namun mau mengoptimalkan usahanya agar anak tidak merasa sedih dan kecewa. Guru juga dapat menunjukkan perasaannya agar anak terlatih untuk mengenal perasaan orang lain. Penggunaan istilah yang sesuai dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menyatakan perasaannya dan juga mengurangi tingkah laku buruknya.
 3. Kemandirian: Anak ABK diberi pemahaman bahwa semua aspek kehidupannya harus mampu dikontrolnya sehingga terbentuk kemandirian pada anak. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin memiliki tantangan dalam mengelola kebutuhan khusus mereka, mereka juga memiliki potensi untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan untuk mengelola perasaan dan situasi yang kompleks (Desiningrum, 2017)

Dampak Stigma terhadap Anak berkebutuhan Khusus

Stigma mempengaruhi perkembangan, kesejahteraan, dan integrasi sosial anak-anak berkebutuhan khusus.

Analisis mengenai bagaimana stigma memengaruhi perkembangan, kesejahteraan, dan integrasi sosial anak-anak berkebutuhan khusus menunjukkan dampak negatifnya. Stigma seringkali mengakibatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, yang dapat merusak fisik dan mental mereka. Dalam konteks drama “Taxi Driver” yang diangkat dari kisah nyata, sebuah studi kasus yang dijelaskan dalam jurnal Faidatuna, seorang anak berkebutuhan khusus bernama Maria mengalami perlakuan yang buruk dari teman kerjanya dan

bosnya, yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan Maria. Hal ini menunjukkan bagaimana stigma dapat menghambat integrasi sosial dan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi stigma ini, diperlukan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, termasuk melalui edukasi, pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus, dan langkah-langkah konkret untuk mendukung mereka dalam mengatasi stigma dan mencapai kesejahteraan yang layak. Metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami lebih dalam pengalaman anak-anak berkebutuhan khusus dalam masyarakat serta bagaimana stigma mempengaruhi mereka (Syakila dkk, 2023).

Studi kasus atau penelitian yang mendukung dampak negatif stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

Stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sering menjadi hambatan dalam pendidikan dan perkembangan mereka. Studi kasus dan penelitian yang dilakukan (Wardiansyah dkk, 2021) dengan judul “Effects of societal stereotype against children with special needs”-(Pengaruh stereotip sosial terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus) menunjukkan bahwa stigma mempengaruhi persepsi orang tua, guru, dan masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, serta kesempatan dan kualitas hidup mereka. Penelitian yang mengeksplorasi dampak negatif stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa stigma dapat menghambat akses mereka ke pendidikan berkualitas dan mempengaruhi kesadaran dan kesediaan orang tua untuk mendukung perkembangan mereka. Selain itu, stigma juga mempengaruhi kesadaran guru tentang kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus dan pendekatan mereka terhadap perilaku mereka, yang berpotensi mempengaruhi

kesejahteraan dan perkembangan anak-anak tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana stigma dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk akses pendidikan, persepsi orang tua dan guru, serta kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, penelitian menekankan pentingnya mengatasi stigma dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkembang dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Upaya Mengatasi Stigma dan Mendorong Inklusi

Strategi untuk mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Untuk mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus di masyarakat, beberapa strategi yang dapat diimplementasikan meliputi:

1. Pendidikan Inklusif: Pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Ini mencakup penggunaan model pembelajaran klasikal dan individual bagi siswa berkebutuhan khusus, yang memungkinkan mereka untuk belajar dalam lingkungan yang sama dengan anak-anak "normal" (Nugroho & Mareza, 2016).
2. Perubahan Sikap dan Proses Pendidikan: Pendidikan inklusif memerlukan perubahan dalam cara pandang, sikap, dan proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Ini mencakup penyesuaian dalam pendekatan pendidikan untuk memenuhi potensi masing-masing anak, baik itu anak berkebutuhan khusus atau anak "normal" (Nugroho & Mareza, 2016).

3. Peran Orangtua: Orangtua anak berkebutuhan khusus memiliki peran penting dalam menghadapi stigma sosial. Mereka harus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan kepada anak mereka, serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan perlindungan anak tanpa diskriminasi. Komitmen ini mencakup pemahaman tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus dan penerapan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Simorangkir, 2023).
4. Peningkatan Perlindungan Anak: Peningkatan perlindungan anak tanpa diskriminasi adalah langkah penting dalam mengurangi stigma. Ini mencakup penerapan perundang-undangan yang mendukung hak-hak anak berkebutuhan khusus, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dan hak-hak anak berkebutuhan khusus (Simorangkir, 2023).
5. Pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang. Inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan berarti bahwa semua anak, tanpa memandang kebutuhan khusus mereka, dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar tanpa diskriminasi. Kesetaraan dalam pendidikan berarti bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang

berkualitas, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dan kesetaraan dalam pendidikan sangat penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan akademik mereka (Hanifah dkk, 2021).

Anak berkebutuhan khusus mencakup anak-anak dengan berbagai jenis hambatan baik sementara maupun permanen, termasuk gangguan fisik, penglihatan, pendengaran, emosional, dan lainnya. Istilah ini mencakup spektrum yang lebih luas daripada hanya anak-anak penyandang cacat.

Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki beragam jenis kebutuhan, seperti kebutuhan pendengaran, penglihatan, motorik, emosional, perilaku, belajar, kognitif, dan komunikasi.

Stigma terhadap anak berkebutuhan khusus meliputi persepsi negatif, diskriminasi, dan prasangka dari masyarakat terhadap mereka. Ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan mereka.

Anak berkebutuhan khusus memiliki potensi dan kelebihan yang unik, namun stigma dapat menghambat perkembangan, kesejahteraan, dan integrasi sosial mereka.

Upaya untuk mengurangi stigma termasuk pendidikan inklusif, perubahan sikap dan proses pendidikan, peran orangtua, dan peningkatan perlindungan anak. Inklusi dan kesetaraan dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi serta membantu mereka berkembang secara optimal.

Dengan memahami dan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus dapat diterima, diakui, dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara maksimal dalam Masyarakat.

BAB 2

MENGUBAH STIGMA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS ABK

Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas dan tidak pernah sia-sia. Dia juga menciptakan manusia dengan beragam keunikan dan latar belakang suku agar mereka dapat saling mengenal dan belajar satu sama lain. Oleh karena itu, individu yang memiliki perbedaan fisik atau psikis, yang sering disebut sebagai kaum difabel atau berkebutuhan khusus, juga memiliki derajat dan hak yang sama dengan individu lain yang tidak memiliki kecacatan fisik.

Segala bentuk keberagaman yang ada dalam masyarakat adalah bagian dari rencana Tuhan dan harus diterima dengan penuh penghargaan. Orang-orang dengan berkebutuhan khusus memiliki potensi, bakat, dan kontribusi yang unik dalam masyarakat. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan pendidikan yang setara, dan akses penuh terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya.

Sebagai sesama manusia, kita bertanggung jawab untuk menghormati dan memperlakukan semua individu dengan martabat dan kesetaraan. Kita harus melihat melampaui kecacatan fisik dan psikis mereka, dan mengakui bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup dengan penuh martabat, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dengan menghargai keberagaman dan memberikan dukungan yang inklusif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan ramah bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Banyak orang tua yang menghadapi situasi di mana anak mereka mengalami hambatan dalam perkembangan sejak lahir, baik itu dalam hal psikologis, fisik, kognitif, maupun sosial.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini memiliki kekurangan dalam berbagai aspek, seperti keterbelakangan mental, kesulitan belajar, gangguan emosional, keterbatasan fisik, gangguan bicara dan bahasa, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau bahkan memiliki bakat khusus.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dan tantangan yang unik dalam perkembangan mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan perhatian khusus, dukungan, dan pendekatan yang berbeda dalam mendukung perkembangan mereka. Meskipun mereka mungkin menghadapi keterbatasan, mereka juga memiliki potensi dan bakat yang dapat dikembangkan.

Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk mengakui keberagaman ini dan memberikan dukungan yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan memahami kebutuhan mereka secara individu dan memberikan lingkungan yang mendukung, kita dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah bagian penting dari masyarakat kita yang beragam. Namun, seringkali mereka menghadapi stigma dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan mereka. Stigma masyarakat terhadap ABK dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengubah stigma negatif ini dan menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan ABK untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan bagian integral dari masyarakat kita. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Namun, stigma dan persepsi

negatif seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka (Fakhiratunnisa, dkk 2022).

Mereka sering ditempatkan sebagai populasi yang kurang terlayani dan mengalami stigmatisasi sebagai “kurang” dari apa yang disebut anak “normal”. Dalam beberapa budaya, anak-anak penyandang disabilitas dipandang memiliki “nilai yang lebih rendah”, “tidak diinginkan”, dan seringkali menjadi korban stigma, penolakan, trauma, dan pelecehan.

Dianugerahi anak dengan berkebutuhan khusus hal yang tidak mudah untuk diterima perbedaan kondisi anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya sangatlah berbeda mereka tidak dapat sepenuhnya mandiri mereka selalu bergantung kepada orang lain terkhusus pada orang tua. Hal seperti ini biasanya menimbulkan rasa cemas bagi orang tua karena memikirkan masa depan anaknya mereka akan seperti apa, pemikiran orang tua terombang-ambing entah anaknya bagaimana di masa mudanya, keadaan sosial, pergaulannya belum lagi pandangan masyarakat terhadap anaknya dan masih banyak lagi khawatiran lainnya. Sebagian orang tua sadar akan tanggung jawabnya dan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya agar bisa hidup seperti anak pada umumnya.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tumbuh dan berkembang berbeda dengan anak normal. Istilah anak berkebutuhan khusus tidak selalu mengacu pada kecacatan yang dialaminya, melainkan pada layanan khusus yang diperlukan untuk mengatasi hambatan atau kemampuan di atas rata-rata. Walaupun jenis anak penyandang disabilitas sangat beragam, namun dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, anak penyandang disabilitas dikategorikan menjadi: anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras mereka adalah anak-anak cerdas dengan bakat khusus.

Setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. terakhir. Pelayanan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas tidak bisa disamakan satu sama lain, namun harus diberikan sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuannya. Anak penyandang disabilitas harus diidentifikasi dan dinilai untuk menerima layanan sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kemampuannya. Berbagai macam layanan harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya di bidang pendidikan, layanan non-pendidikan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjadi lebih baik dan mandiri (Nisa, dkk 2018)

Seperti kita ketahui anak berkebutuhan khusus menurut Fakhiratunnisa, dkk (2022) adalah anak yang memerlukan penanganan khusus disebabkan adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan yang terjadi dalam beberapa hal, seperti proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental intelektual, sosial maupun emosional, Hal ini sesuai dengan penelitian Ariesta (dalam Gumilang,dkk 2022) tentang kecemasan orang tua terhadap karir anak berkebutuhan khusus (ABK), hasil penelitian menunjukkan adanya kecemasan orang tua terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam membaca, menulis, berinteraksi dengan teman sekolah, menyelesaikan sekolah. baik dan tidak akan ada pekerjaan untuk orang-orang seperti anak-anak mereka.

Namun dalam hal ini orang tua mempunyai harapan terhadap kesehatan agar anaknya dapat bersekolah, belajar membaca, menulis dan mengembangkan potensinya. Dalam hal ini peranan orang tua sangatlah penting dalam proses perkembangan anak seperti :

- 1) Fasilitator Pembelajaran: Orang tua memiliki peran yang krusial sebagai fasilitator dalam pembelajaran ABK di rumah. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, memotivasi, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif bagi ABK.
- 2) Dukungan Emosional: Orang tua adalah sumber dukungan emosional yang sangat penting bagi ABK. Dukungan ini sangat penting dalam masa perkembangan kanak-kanak sampai remaja awal.
- 3) Keterlibatan dalam Pendidikan: Keterlibatan orang tua didefinisikan sebagai hal-hal yang dilakukan orang tua untuk ambil bagian dalam kehidupan anak mereka, termasuk dalam membantu anak dalam proses pendidikan.
- 4) Pemahaman Peran: Orang tua yang mengerti perannya dalam pendidikan anak tidak akan dengan mudah mendisiplinakan seorang guru mereka memahami bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua dan guru.

Tapi dalam hal ini penerimaan anak berkebutuhan khusus sangatlah tidak mudah bagi orang tuanya hal ini disebabkan oleh berbeda faktor seperti lingkungan keluarga dan anggapan sosial tetapi orang tua perlu tau bahwa support terbaik anak adalah orang tua, maka dari itu orang tua harus lebih paham dalam merawat dan mendidik anak-anaknya seperti memperhatikan perkembangan kemampuan serta minat anaknya. Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat aspek menyeluruh dalam penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu:

- 1) Orang tua harus memahami kelebihan dan kekurangan anak. Hal ini mencakup kekuatan, keterampilan, kelemahan dan keterbatasan anak.

- 2) Orang tua hendaknya mempunyai pandangan yang komprehensif, realistis dan obyektif terhadap anak.
- 3) Orang tua membantu dalam proses tumbuh kembang anak.
- 4) Orang tua memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak dengan memberikan kasih sayang, perlindungan dan perhatian kepada anak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang baik dan bijaksana, menjamin semangat dan motivasi, membimbing anak dan berpartisipasi dalam kegiatan anak (Gumilang,dkk 2022).

Melalui upaya bersama, kita dapat mengubah stigma negatif menjadi sikap yang inklusif dan mendorong masyarakat untuk melihat ABK sebagai bagian berharga dari komunitas kita. Dengan mengubah stigma masyarakat, kita akan meningkatkan kualitas hidup ABK dan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Mari bersama-sama mengubah stigma masyarakat untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif bagi semua anak berkebutuhan khusus.

Meningkatkan kualitas ABK bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan semua pihak orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat luas. Lebih dari itu, kita perlu memahami bahwa setiap ABK adalah individu yang unik dengan kebutuhan, bakat, dan aspirasi mereka sendiri. (Akhmad, 2021)

Stigma dan Dampaknya pada ABK

Stigma terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) telah menjadi bagian yang melekat dalam masyarakat. Stigma ini sulit untuk dihilangkan karena telah tertanam dalam budaya yang ada. Meskipun demikian, meskipun stigma tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat diubah. Dengan

mengubah stigma yang ada dalam masyarakat, kualitas hidup ABK dapat meningkat.

Stigma yang tersebar luas di masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mencakup pandangan bahwa ABK tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun, dianggap sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, dianggap tidak berguna, dan sejenisnya. Stigma-stigma ini sering kali muncul karena adanya harapan masyarakat yang membandingkan ABK dengan anak-anak pada umumnya, terutama dalam hal keberhasilan akademik. Namun, sebenarnya masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh ABK. Masyarakat yang memberikan stigma tersebut sebenarnya hanya membutuhkan informasi dan bukti bahwa ABK sebenarnya memiliki potensi yang sama dengan anak-anak pada umumnya.

Menurut Sakinah (2018) Stigma terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki dampak yang cukup signifikan pada kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat timbul akibat stigma terhadap ABK:

1. Rendahnya harga diri
Stigma dapat membuat ABK merasa rendah diri dan merasa bahwa mereka tidak berharga. Mereka mungkin merasa tidak mampu atau tidak dihargai oleh masyarakat karena kondisi atau kebutuhan khusus mereka.
2. Keterbatasan akses
Stigma dapat menyebabkan ABK mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dan kesempatan yang sama dengan orang lain. Mereka mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan, atau fasilitas umum.
3. Isolasi sosial

Stigma dapat menyebabkan ABK merasa terisolasi secara sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan bermakna dengan teman sebaya atau masyarakat umum. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan sosial mereka.

4. Terbatasnya peluang

Stigma dapat membatasi peluang ABK untuk mengembangkan potensi mereka. Masyarakat mungkin memiliki harapan rendah terhadap kemampuan ABK dan tidak memberikan kesempatan yang sama untuk mereka berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.

5. Gangguan kesehatan mental

Stigma dapat menyebabkan ABK mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres. Mereka mungkin merasa tertekan dan cemas karena tekanan sosial dan ekspektasi yang tidak realistis.

Strategi Mengubah Stigma Masyarakat terhadap ABK

Anak-anak berkebutuhan khusus sering mengalami stigmatisasi yang negatif dalam bentuk bahasa yang kasar, ejekan, atau bahkan penolakan fisik. Mereka juga sering menghadapi masalah dalam aspek akademik, sosial, dan emosional. Stigmatisasi ini dapat berdampak buruk pada anak dan keluarganya, menyebabkan kecemasan, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri.

Namun, dukungan sosial, terutama dari orang tua dan anggota keluarga lainnya, dapat memberikan dorongan dan kepercayaan diri kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Dukungan sosial dapat berupa

dukungan emosional, informasi, atau bantuan materi dan peralatan yang diperlukan.

Dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu anak berkebutuhan khusus merasa diterima dan tidak berbeda dari anak-anak lainnya. Masalah-masalah ini dapat diatasi melalui pendidikan melalui berbagai jalur, seperti pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, terutama orang tua, dan masyarakat sekitar melalui upaya bersama akan membantu mengurangi stigma yang ada. (Hidayanti, 2011).

Dalam hal pendidikan dan keluarga, terutama peran orang tua, dukungan sosial sangat penting dalam mempromosikan kemandirian anak-anak dengan disabilitas. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta program pendidikan kelompok untuk orang tua, dapat menjadi efektif dalam membantu keluarga anak-anak dengan disabilitas intelektual sedang hingga berat. Program ini dapat mencakup kegiatan pemberdayaan ekonomi, membangun ikatan emosional, meningkatkan komunikasi yang baik, membangun identitas sosial, serta mendorong representasi sosial dalam masyarakat.

Selain itu, kebijakan pemerintah, pekerja sosial, layanan sosial, dan fasilitas umum juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi kehidupan penyandang disabilitas di semua aspek. Dengan upaya bersama, semua pihak ini dapat membantu mengurangi stigma yang ada dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas.

Mengubah stigma negatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) membutuhkan pendekatan yang melibatkan banyak aspek. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan Inklusif: Pendidikan inklusif merupakan pendekatan di mana anak-anak dengan kebutuhan

- husus belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menerima perbedaan yang ada.
2. Dukungan Sosial: Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting untuk membantu mengurangi stigma. Ini termasuk dukungan emosional, informasi, dan bantuan praktis.
 3. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat: Masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang ABK, termasuk potensi dan kebutuhan mereka. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, atau media sosial.
 4. Diskusi dan Dialog: Diskusi dan dialog antara masyarakat dan ABK atau orang tua mereka dapat membantu memahami tantangan yang dihadapi oleh ABK dan cara terbaik untuk mendukung mereka.
 5. Mendorong Partisipasi ABK dalam Kegiatan Masyarakat: Melibatkan ABK dalam kegiatan masyarakat dapat membantu masyarakat untuk melihat kemampuan dan potensi mereka, bukan hanya keterbatasan mereka.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam perkembangan fisik, mental, emosional, atau sosial mereka. ABK dapat memiliki berbagai kondisi, seperti autisme, sindrom Down, gangguan perkembangan, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan lain-lain.

ABK sering kali membutuhkan dukungan ekstra dalam pendidikan, perawatan, dan kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran, terapi fisik atau okupasional, serta dukungan sosial dan emosional. Meskipun ABK mungkin menghadapi

tantangan dalam beberapa aspek kehidupan, mereka juga memiliki potensi dan bakat yang unik. Dengan dukungan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, ABK dapat mencapai perkembangan dan pencapaian yang signifikan dalam kehidupan mereka. Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami, menghormati, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus ini agar mereka dapat hidup secara inklusif dan meraih potensi penuh mereka.

Untuk mengubah stigma terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan secara bersamaan meningkatkan kualitas hidup mereka, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa ABK juga memiliki kemampuan dan potensi yang besar. Mereka dapat memiliki berbagai keterampilan yang berarti mereka bukanlah beban bagi masyarakat. Selain itu, peran orang tua tetap menjadi yang terpenting dalam mendampingi dan mendukung perkembangan ABK.

Pentingnya Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan salah satu cara efektif untuk mengubah stigma ini. Pendidikan inklusif menekankan pada hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk ABK. Dengan pendidikan inklusif, ABK dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan akademik, serta membangun rasa percaya diri (Lazar, 2020).

Pendidikan inklusif adalah pendidikan di mana semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan mendapatkan pendidikan tanpa ada batasan atau hambatan dalam mencari pengetahuan. Dalam pendekatan pendidikan inklusif, anak-anak dengan difabel atau berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama dengan teman sebaya mereka. Mereka berharap untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama

seperti anak-anak pada umumnya, termasuk mendapatkan pendidikan dan melakukan berbagai hal seperti yang diharapkan dari anak-anak lainnya.

Banyak dari kita menyadari betapa pentingnya Pendidikan inklusif dalam masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Pendidikan inklusif juga memiliki dampak positif bagi peserta didik. Hal ini dapat mengembangkan tingkat kreativitas anak-anak dan mendorong daya pikir mereka untuk lebih sering berinovasi dan melakukan hal-hal baru.

Anak Berkebutuhan Khusus merupakan salah satu bentuk keberagaman, seperti perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu dengan kebutuhan khusus, pasti terdapat keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya, di dalam setiap individu juga terdapat kelemahan tertentu, karena tidak ada makhluk yang sempurna. Konsep ini tercermin dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan interaksi antara siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap toleransi dan saling menghargai.

Secara umum pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan:

1. Menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
2. Mengupayakan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung agar semua anak dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan inklusif, hal ini berarti meningkatkan partisipasi siswa dan mengurangi pemisahan mereka dari budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah setempat. Anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat diterima dan belajar di sekolah umum atau reguler.

Di sisi lain, Pendidikan inklusif juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai aspek, seperti pemerintah dan organisasi lain, untuk mendukung keberadaan sekolah inklusif di berbagai daerah. Hal ini termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas pendidik yang efektif. Tujuan dari perhatian dan perbaikan ini adalah untuk meningkatkan dan memfasilitasi sekolah-sekolah inklusif tersebut. (Muniarti & Anastasia, 2016).

Pendidikan inklusif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK). Pendekatan ini memastikan bahwa anak-anak ABK diajarkan dalam lingkungan yang sama dengan rekan-rekan sebayanya tanpa disortir berdasarkan kemampuan atau kondisi mereka. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya menyediakan akses yang setara bagi anak-anak ABK, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial dan emosional.

Salah satu keuntungan utama dari pendidikan inklusif adalah menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak-anak ABK untuk belajar dari interaksi dengan rekan-rekan sebayanya. Ini tidak hanya membantu mereka dalam pengembangan akademik, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja sama yang penting untuk kesuksesan di masyarakat.

Pendidikan inklusif juga memberikan manfaat bagi anak-anak tanpa kebutuhan khusus dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman dan mengajarkan mereka nilai-nilai empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya untuk anak-anak ABK, tetapi juga merupakan investasi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berempati.

Namun, untuk menjalankan pendidikan inklusif dengan efektif, diperlukan sumber daya dan dukungan yang memadai. Guru dan staf pendidikan perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam strategi pengajaran inklusif dan cara mengelola kebutuhan khusus anak-anak ABK. Selain itu, fasilitas fisik dan sumber daya pendukung seperti peralatan khusus dan bahan pembelajaran yang disesuaikan juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak dapat belajar dengan maksimal.

Dalam konteks pendidikan inklusif, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk berkomitmen dalam menyediakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua anak. Hal ini melibatkan kebijakan yang mendukung inklusi, alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif, dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua anak, termasuk anak-anak ABK. Dengan pendidikan inklusif sebagai langkah awal, kita dapat membuka pintu bagi masa depan yang lebih inklusif dan setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka.

Pendidikan inklusif telah diakui secara luas sebagai langkah awal yang sangat penting dalam memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK). Pendekatan ini memastikan bahwa anak-anak ABK diajarkan dalam lingkungan yang sama dengan rekan-rekan sebayanya tanpa disortir berdasarkan kemampuan atau kondisi mereka. Dalam hal ini, para ahli telah mengidentifikasi beberapa poin penting yang menunjukkan pentingnya pendidikan inklusif sebagai langkah awal dalam memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak ABK:

1. Akses yang setara:

Pendidikan inklusif memastikan bahwa anak-anak ABK memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak dan bermutu. Menurut Ahuja (2018), akses yang setara terhadap pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Dengan memberikan akses yang setara, pendidikan inklusif membuka pintu bagi anak-anak ABK untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

2. Inklusi Sosial dan Emosional:

Pendidikan inklusif juga mempromosikan inklusi sosial dan emosional bagi anak-anak ABK. Menurut Turnbull dan Turnbull (2018), lingkungan belajar yang inklusif memberikan kesempatan bagi anak-anak ABK untuk berinteraksi dengan rekan-rekan sebayanya, yang membantu mereka dalam pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja sama. Inklusi sosial dan emosional ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak ABK merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan pendidikan.

3. Investasi dalam Masyarakat yang Inklusif:

Pendidikan inklusif bukan hanya untuk kepentingan anak-anak ABK, tetapi juga merupakan investasi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berempati. Menurut Forlin et al. (2017), pendidikan inklusif memberikan manfaat bagi semua anak dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman dan mengajarkan mereka nilai-nilai empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan inklusif memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

4. Pengembangan Potensi Maksimal:

Pendidikan inklusif memungkinkan anak-anak ABK untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Menurut Black-Hawkins et al. (2017), lingkungan belajar yang inklusif memberikan kesempatan bagi guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan minat individu anak-anak ABK, serta menyesuaikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendidikan inklusif membantu anak-anak ABK untuk mencapai pencapaian akademik dan perkembangan pribadi yang optimal.

5. Peningkatan Keterlibatan Orang Tua:

Pendidikan inklusif juga dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak ABK. Menurut Hornby (2019), orang tua anak-anak ABK sering kali merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pendidikan ketika mereka melihat bahwa anak-anak mereka diajarkan dalam lingkungan inklusif yang mendukung. Dengan melibatkan orang tua secara aktif, pendidikan inklusif dapat menciptakan sinergi antara rumah dan sekolah untuk mendukung perkembangan anak-anak ABK secara holistik.

6. Persiapan untuk Kehidupan Berkelanjutan:

Pendidikan inklusif juga membantu anak-anak ABK untuk mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan berkelanjutan di masyarakat yang inklusif. Menurut Florian dan Black-Hawkins (2011), pengalaman belajar dalam lingkungan inklusif membantu anak-anak ABK untuk mengembangkan keterampilan adaptasi, kemandirian, dan ketahanan yang diperlukan untuk sukses di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga persiapan untuk kehidupan yang mandiri dan berarti.



Dengan demikian, pendidikan inklusif merupakan langkah awal yang penting dalam memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak ABK dengan memastikan akses yang setara, promosi inklusi sosial dan emosional, serta investasi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berempati.

BAB 3

PERSPEKTIF ORANG TUA MENGENAI PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

Banyak negara sepakat mengenai perlunya menerapkan pendidikan inklusif untuk memerangi diskriminasi dalam pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Internasional tentang Pendidikan untuk Semua, Jomtien 1990 dan prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan bagi para penyandang disabilitas tahun 1993 dan rencana aksi tentang pendidikan khusus tahun 1994 bagi penyandang disabilitas. Darman & Rusyidi (2015).

Sekolah inklusif harus mengenali dan memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, beradaptasi dengan gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda, dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses terhadap rancangan kurikulum yang sesuai, pengorganisasian yang baik, serta pemilihan dan penggunaan metode pengajaran yang tepat, dan membangun kemitraan dengan pihak masyarakat sekitar.

Sekolah inklusif merupakan salah satu bentuk kesetaraan dan cara untuk mencapai pendidikan yang berkeadilan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama besarnya. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan khusus yang mewajibkan semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak bersama teman sebayanya di kelas reguler. Drama & Rusyidi (2015).

Generalisasi berguna untuk (a) kesadaran dan penerimaan terhadap perbedaan, (b) meningkatkan kepekaan dan empati terhadap semua orang, (c) pembelajaran untuk saling membantu terhadap orang lain, dan (d) eksplorasi dan pembelajaran keterampilan khusus dan unik. (seperti belajar tentang bahasa atau gerak tubuh, penggunaan alat bantu) Downing & Peckham-Hardin, 2007 (dalam Andini & Mumpuniarti 2018). Inklusif menyiratkan rasa hormat terhadap perbedaan dan keunikan masing-masing individu serta mencerminkan filosofi keterbukaan terhadap semua orang. Isosomppi & Leavo, 2015 (dalam Andini dan Mampuniarti 2018). Dalam konsep lingkungan terbuka dan inklusif, setiap orang yang tinggal, bekerja dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat merasa aman dan nyaman untuk menuntut hak dan memenuhi kewajibannya. Kerja sama antar berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan ini. Andini dan Mumpuniarti (2018).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ABK yang bersekolah di sekolah inklusif memiliki perkembangan keterampilan sosial yang lebih baik dan interaksi yang lebih baik dengan anak-anak reguler utama yang berpartisipasi dalam masyarakat saat dewasa (Wiener & Tardif, 2004). Dalam penelitian yang dilakukan di University of Denver, Hamilton (2013) menemukan bahwa banyak anak dengan gangguan pendengaran mengembangkan keterampilan berbicara dan berbahasa ketika mereka menggunakan alat bantu dengar dan sering belajar di pra-sekolah secara normal. Keterampilan bicara dan bahasa juga meningkat bila ditempatkan di lingkungan yang kaya bahasa, di mana guru juga didorong untuk merencanakan keterlibatan ahli terapi wicara. Peneliti lain merekomendasikan pembelajaran ABK di sekolah inklusif untuk mendapatkan manfaat dari standar akademik yang lebih

tinggi dan untuk berinteraksi dengan siswa yang lebih cerdas di sekolah reguler (Ruijis, Peetsma, & van der Veen, 2010).

Alimin (dalam jauhari, 2017). Pendidikan inklusif menggambarkan proses pemenuhan beragam kebutuhan semua anak dengan meningkatkan pembelajaran, partisipasi budaya dan sosial serta mengurangi eksklusivitas dalam pendidikan. Pendidikan inklusif melibatkan modifikasi dan perubahan isi, metode, struktur dan cara untuk memenuhi kebutuhan semua anak sesuai kelompok umurnya. Pendidikan inklusif dapat digambarkan sebagai kepedulian untuk memenuhi kebutuhan belajar berbagai jenis siswa, dengan tujuan mendidik guru dan siswa tentang keberagaman, memandang keberagaman sebagai tantangan, dan meningkatkan keberagaman dalam lingkungan belajar. Pendidikan inklusif terus berkembang secara perlahan seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Agar pendidikan inklusif dapat tetap menjadi jawaban nyata terhadap tantangan pendidikan dan hak asasi manusia, perubahan harus terus dilakukan.

Dalam konteks yang luas, pendidikan inklusif mengacu pada non-diskriminasi, persamaan hak dan kesempatan, perjuangan untuk keadilan, akses yang lebih besar terhadap pendidikan untuk semua, peningkatan kualitas pendidikan dan upaya strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk reformasi pendidikan yang menekankan pada wajib belajar sembilan tahun dan upaya mengubah sikap sosial terhadap anak berkebutuhan khusus (Takdir dalam Jauhari, 2017).

Pemahaman Orang Tua terhadap Pendidikan Inklusif

Tanggung jawab utama pendidikan anak-anak mereka di lembaga formal, non-formal atau informal terutama berada di tangan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan

mempunyai dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak, dan khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, peranannya sangat menunjang dalam proses pendidikan. Orang tua harus memahami dimensi nilai-nilai inklusif, seperti kesetaraan, keadilan, keberagaman, nilai kerja sama, menerima kebutuhan khusus setiap siswa dalam proses belajar mengajar (wardani dan Dwiningrum, 2021). Pandangan orang tua mengenai nilai positif pendidikan inklusif berperan dalam menunjang kebutuhan dan keberhasilan pendidikan anaknya.

Pemahaman orang tua terhadap pendidikan inklusif bisa sangat bervariasi. Beberapa orang tua yang memiliki ambisi terhadap pendidikan mungkin melihat pendidikan inklusif sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi anak dan mendukung perkembangan sosial mereka (jesslin & Kurnyawati, 2020). Dalam membangun sistem pendidikan inklusi yang sukses, peran orang tua sangat penting. Kolaborasi, pemahaman kebutuhan anak, dukungan di rumah, advokasi, dan dukungan perkembangan sosial dan emosional adalah langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil (Fanani, 2023).

Namun, ada juga beberapa orang tua yang merasa khawatir akan pengaruh negatif anak berkebutuhan khusus (ABK) kepada anak yang bukan ABK. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada cara pandang atau pemahaman orang tua yang perlu diperbaiki melalui informasi akurat tentang pendidikan inklusi (Nadhirah, 2014).

Secara umum, pendidikan inklusif harus mencakup semua siswa, terlepas dari identitas, latar belakang, atau kemampuan mereka. Meski demikian, masih banyak pemerintah yang belum mendasarkan undang-undang, kebijakan, dan praktik mereka pada prinsip ini. Secara keseluruhan, pendidikan inklusif merupakan kebutuhan

esensial untuk menjamin kehidupan yang lebih bermartabat bagi setiap individu.

Tantangan dan Hambatan Orang tua

Tantangan di sekolah inklusif lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Tidak hanya ABK, teman, guru, dan orang tua juga menghadapi berbagai tantangan di sekolah inklusif.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi orang tua dalam mendukung pendidikan inklusif cukup beragam. Berikut ini beberapa di antaranya:

- a. Salah satu tantangan besar dalam pendidikan inklusif adalah minimnya sarana penunjang. Hal ini bisa berupa kurangnya fasilitas atau alat bantu belajar yang memadai untuk mendukung kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus (Adrian dkk, 2022).
- b. Orang tua diharapkan bisa berkolaborasi dengan guru dan sekolah dalam mengembangkan program pendidikan inklusi. Namun, ini bisa menjadi tantangan jika orang tua merasa tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mendukung perkembangan anak mereka.
- c. Orang tua mungkin merasa bahwa sekolah inklusi kurang dalam hal material dan metode pengajaran, serta dukungan untuk anak berkebutuhan khusus (jesslin & Kurnyawati, 2020).
- d. Stigma negatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus bisa menjadi hambatan besar. Hal ini bisa mempengaruhi cara orang tua dan masyarakat menghadapi pendidikan inklusif (Sari & Hendriani, 2021).
- e. Kebijakan yang kurang mendukung atau kurang aplikatif juga menjadi tantangan. Misalnya, kurangnya

kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif atau kebijakan yang ada namun tidak efektif dalam implementasinya (Sari & Hendriani, 2021).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama antara orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif juga sangat dibutuhkan.

Guru yang bekerja di sekolah inklusif menghadapi banyak tantangan implementasi. Hal ini mencakup kurangnya dukungan, pelatihan dan kurangnya bekerja sama dengan profesional, kesulitan dalam mengelola perilaku siswa berkebutuhan khusus, dan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang tepat. Salend (dalam Jeslin & Kurnyawati, 2020). Lebih lanjut, ABK seringkali dipandang negatif oleh teman-temannya. Tidak diterima oleh teman sekelas menjadikan ABK rentan terhadap perundungan, diabaikan, atau dihindari. Tsang (dalam Jesslin dan Kurniawati 2020) mencatat bahwa siswa umum dan berkebutuhan khusus di sekolah inklusif kesulitan memahami cara berinteraksi antar sesama, namun intervensi di sekolah sejauh ini sebelumnya tidak disadari para guru.

Banyak kendala yang harus dihadapi ABK setiap harinya, bahkan orang tuanya pun menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Orang tua dapat mengatasi stigma terkait disabilitas anak mereka melalui beberapa cara (Jesslin dan Kurniawati 2020). Terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, orang tua mempunyai harapan yang tinggi terhadap kesuksesan dan kontribusi anak-anak mereka kepada masyarakat.

Stigma Masyarakat terhadap Pendidikan Inklusif

Seiring meningkatnya tekanan sosial, permasalahan yang dihadapi anak penyandang disabilitas pun terus bertambah.

Menurut Oliver, terdapat permasalahan dalam cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sehingga membuat anak penyandang disabilitas terus merasa terbatas (Jauhari, 2017). Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan tekanan dan pembatasan terhadap anak penyandang disabilitas sehingga menimbulkan permasalahan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

Pandangan pertama terhadap anak berkebutuhan khusus adalah sudut pandang medis/individu, yang melihat dan membingkai disabilitas sebagai masalah pribadi. Oleh karena itu, cara pandang ini memandang *kecacatan/impairment* sebagai sebuah tragedi pribadi, dan menurut Yulianto (2014), disabilitas selalu menjadi penyebab permasalahan, penyebab gangguan fungsional dan berbagai macam gangguan sosial.

Secara umum, masyarakat mempunyai sikap terhadap penyandang disabilitas sebagai penyandang disabilitas fisik atau mental selalu menjadi beban, tidak berguna, membutuhkan pertolongan dan dikasihani. Sikap negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas terus bersumber dari budaya yang membentuk masyarakat. Misalnya, banyak keluarga yang percaya bahwa mempunyai anak penyandang disabilitas adalah aib sehingga anak tersebut dikurung di rumah, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan tidak bisa mengenyam pendidikan, yang jelas berdampak pada jiwa dan takdir anak.

Jauhari (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sikap dari masyarakat yang negatif antara lain:

Jauhari (2017) dalam penelitiannya Juga mengatakan terdapat sikap dari masyarakat yang kurang menguntungkan seperti :

- a. Masih adanya keraguan terhadap kemampuan dan potensi anak penyandang disabilitas.
- b. Masyarakat masih kurang peduli terhadap anak cacat.

- c. Belum adanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan anak penyandang disabilitas.
- d. Organisasi sosial yang bergerak di bidang disabilitas masih menunjukkan kelemahan dalam pekerjaannya.
- e. Fasilitas umum yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas masih terbatas.

Peran Orang tua dalam Pendidikan Inklusif

Peran orang tua dalam pendidikan menjadi faktor pendukung khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif sangat membutuhkan dukungan orang tua dan keluarganya. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif menimbulkan banyak tuntutan dan harapan di lingkungan sekolah. Siswa inklusi diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mengikuti proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan ABK (Ekawati dan Lian, 2022).

Dalam konteks pendidikan inklusif, peran orang tua dan masyarakat menjadi penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang terbaik. Masukan orang tua dan masyarakat dapat mencakup persetujuan dan evaluasi terhadap penyediaan pendidikan inklusif, partisipasi dalam sosialisasi, dukungan biaya dan peralatan, bimbingan belajar atau aspek lain dari perencanaan dan pelaksanaan pendidikan inklusif (Wardani & Dwiningrum, 2021).

Waktu yang dihabiskan anak di sekolah terbatas dan waktu yang dihabiskan bersama keluarga relatif lama. Untuk itu kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua kondisi ini harus diselaraskan agar waktu yang digunakan anak untuk memperoleh pengalaman belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Tarmansya, (dalam Ekawati & Lian, 2022).

Sebagaimana dipaparkan Hewett & Frank, 1968 (dalam Nurfadella, 2021) tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus:

1. Menjadi mitra utama dalam membantu anak mencapai tujuan pengasuhan dan pendidikannya.
2. Menjadi pendukung yang mengetahui, peduli dan melindungi hak anak untuk memperoleh manfaat layanan pendidikan sesuai dengan ciri khususnya.
3. Merupakan sumber informasi yang lengkap dan akurat tentang perilaku masa kecil anak.
4. Sebagai seorang guru, bertugas mengajar anak. Tentang kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah.
5. Sebagai alat diagnosa Untuk mengetahui hakikat dan sifat kebutuhan khusus dan khususnya kemungkinan pengobatan di luar jam sekolah.

Melihat alasan di atas dan sikap orang tua terhadap ABK, terlihat bahwa partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya merupakan faktor penting dan penentu dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum ABK bersama orang tua. dan melibatkan para ahli dalam pengambilan keputusan terkait proses pembelajaran ini.

Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan inklusif. Mereka adalah wali anak dan memberikan informasi penting tentang situasi anak jika terjadi diskriminasi. Sebagai orang pertama yang mengetahui situasi anak sebelum mereka meninggalkan sekolah. (Ferrell dalam Jesslin dan Kurniawati, 2020). Agar orang tua dapat berpartisipasi dalam pendidikan ABK, penting untuk memahami sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya (Swick & Hooks dalam Jesslin & Kurniawati, 2020). Perspektif orang tua dapat berkontribusi pada kemitraan antara orang tua dan sekolah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Oleh

karena itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif orang tua tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Menurut Oxford Advanced American Dictionary (dalam Jeslin dan Kurniavati, 2020) Perspektif dapat diartikan sebagai cara berpikir dan mengekspresikan diri yang unik. kemampuan berpikir obyektif terlepas dari pentingnya masalah atau keputusan mengenai anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Adapun kesimpulan terkait pembahas tentang perspektif orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) mengenai pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui tinjauan literatur sistematis, ditemukan bahwa secara umum, orang tua memiliki perspektif positif dan mendukung keberadaan sekolah inklusif.

Pendidikan inklusif diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk ABK, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan di sekolah reguler bersama-sama dengan peserta didik reguler. Meskipun ada banyak manfaat yang didapat dari pendidikan inklusif, namun banyak juga perdebatan mengenai bagaimana mengimplementasikannya, mengingat pendidikan inklusif merupakan konsep yang kompleks.

Dalam pelaksanaannya, banyak tantangan yang dihadapi di sekolah inklusif, tidak hanya oleh ABK, namun juga oleh teman, guru, dan orangtua. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya dukungan, pelatihan, dan waktu untuk berkolaborasi dengan para ahli, serta kesulitan dalam menghadapi perilaku siswa berkebutuhan khusus dan dalam mendesain dan mengimplementasikan instruksi yang sesuai. Selain itu, seringkali ABK menerima perlakuan yang negatif dari teman-teman sekelasnya.

Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memiliki manfaat yang signifikan bagi ABK,



namun pelaksanaannya memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari semua pihak yang terlibat, termasuk sekolah, komunitas, pemerintah, dan keluarga.

BAB 4

MELAWAN STIGMA DISKRIMINATIF STRATEGI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Hamidah (2022) menjelaskan orang-orang dengan disabilitas sering kali menjadi sasaran diskriminasi, menghadapi keterbatasan akses, dan kurang mendapatkan penghargaan. Mereka memiliki kondisi fisik atau mental yang berkurang, yang berhubungan dengan struktur tubuh mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam bekerja atau melakukan tindakan. Di Indonesia, orang-orang dengan disabilitas sering kali dilihat dengan stigma negatif, salah satunya adalah karena banyak dari mereka yang ditemukan di lampu merah kota, meminta-minta, dan di tempat-tempat umum menunjukkan kekurangan mereka dengan harapan mendapatkan simpati dan uang. Disabilitas melibatkan kondisi mental atau fisik yang tidak sempurna. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam melakukan tindakan dan pembatasan partisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang dengan disabilitas. Pembatasan partisipasi ini adalah masalah yang dihadapi oleh orang-orang, khususnya mereka dengan disabilitas, dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ini mencerminkan interaksi antara orang-orang dengan disabilitas dan masyarakat di lingkungan mereka. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan dengan kondisi fisik atau mental yang tidak sempurna, tetapi juga merupakan fenomena kompleks dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi khusus untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah, hambatan, dan stigma negatif dalam lingkungan sosial bagi orang-orang dengan disabilitas. Dalam percakapan sehari-hari, orang-orang dengan disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat dan memiliki keterbelakangan mental, banyak orang menganggap mereka sebagai orang yang tidak produktif dan tidak dapat

bertanggung jawab, sehingga peran, hak, dan kesempatan mereka sering kali diabaikan. Di Indonesia, orang-orang dengan disabilitas dikategorikan menjadi lima, berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda atau multi.

Stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu tantangan yang masih merajalela dalam masyarakat saat ini. Terlalu sering, orang dengan disabilitas dihadapkan pada stereotip negatif, diskriminasi, dan pengucilan, yang semuanya merupakan produk dari kurangnya pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang pengalaman hidup mereka. Stigma ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses kesempatan yang sama dengan yang lainnya, tetapi juga merusak harga diri dan kesejahteraan psikologis mereka.

Melawan stigma ini bukan hanya tentang menciptakan kebijakan yang inklusif atau memberikan aksesibilitas fisik semata, tetapi juga tentang mengubah persepsi kolektif masyarakat terhadap disabilitas secara keseluruhan. Perlu dipahami bahwa disabilitas bukanlah suatu hambatan yang harus diatasi, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman manusia. Dengan memahami dan menghargai perbedaan ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berempati.

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan mereka. Stigma ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat, mengurangi kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan yang layak. Selain itu, stigma juga dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional penyandang disabilitas, serta membatasi potensi mereka

untuk berkembang dan berkontribusi secara penuh dalam masyarakat (Nations, 2007).

Meskipun ada kemajuan dalam kesadaran akan pentingnya inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, stigma tersebut masih terus ada dan mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan memperjuangkan kesetaraan bagimereka.

Stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan fenomena yang masih merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Terlalu sering, individu dengan disabilitas dihadapkan pada perlakuan tidak adil, stereotip negatif, dan bahkan pengucilan sosial. Stigma ini tidak hanya menghambat kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga mengganggu perkembangan pribadi dan kesejahteraan psikologis mereka. Pentingnya memahami dan mengatasi stigma terhadap penyandang disabilitas tidak bisa dilebih-lebihkan. Stigma ini tidak hanya bersifat merugikan bagi individu yang terkena dampaknya, tetapi juga merusak bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan menghambat potensi individu, mengurangi keberagaman, dan menciptakan ketidaksetaraan yang tidak perlu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi stigma ini tidak hanya merupakan tindakan moral yang tepat, tetapi juga merupakan keharusan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam pendahuluan ini, kami akan menggali lebih dalam tentang sumber stigma terhadap penyandang disabilitas, dampaknya yang luas, serta pentingnya untuk memperjuangkan kesetaraan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap disabilitas. Dengan memahami kompleksitas dan dampak negatif dari stigma ini, kita dapat

membuka jalan menuju perubahan yang lebih positif dan inklusif dalam masyarakat kita.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang efektif untuk mengatasi stigma dan memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi stigma, seperti budaya, norma sosial, dan kebijakan publik, kita dapat mengidentifikasi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mencapai perubahan positif (Goffman, 2013).

Dengan adanya komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan bahwa kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyoroti pentingnya mengubah persepsi, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih baik dan lebih inklusif bagi semua individu.

Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat dan memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Berbagai temuan dari penelitian dan diskusi dalam literatur menyoroti pentingnya kesadaran akan stigma yang masih menghadang integrasi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Pertama, pengetahuan yang lebih baik tentang pengalaman dan kebutuhan penyandang disabilitas diperlukan untuk mengatasi stereotip dan prasangka yang ada. Program pendidikan dan kampanye sosial telah terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk merubah sikap masyarakat menjadi lebih inklusif dan mendukung kesetaraan

menjadi krusial. Perubahan ini mencakup pengembangan kebijakan inklusi di berbagai sektor, promosi budaya organisasi yang inklusif, dan advokasi untuk perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang status disabilitas.

Di samping itu, diperlukan dukungan komunitas yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan inklusi dan dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan langkah penting dalam memperjuangkan kesetaraan.

Alhasil, perubahan yang signifikan dalam persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas memerlukan kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama dari berbagai pihak. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil dan mengurangi keberagaman dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang secara maksimal.

Diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Diskriminasi terhadap Anak dengan Kebutuhan Khusus merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang masih sering terjadi di masyarakat. ABK seringkali menghadapi hambatan dan stigma yang menghalangi akses mereka terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang-peluang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh diskriminasi ini, di mana anak-anak ABK sering diabaikan atau diisolasi dari lingkungan pendidikan yang inklusif. Kurangnya dukungan dan pengetahuan yang memadai tentang kebutuhan khusus anak-anak ABK sering kali menyebabkan mereka tertinggal dalam hal perkembangan dan pencapaian akademik.

Selain itu, diskriminasi terhadap anak ABK juga dapat berdampak pada aspek sosial dan psikologis kehidupan mereka. Stigma dan perlakuan tidak adil dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan harga diri pada anak-anak ABK, yang kemudian berpotensi mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan dengan rekan-rekan sebayanya. Ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi juga dapat menghambat kemampuan anak-anak ABK untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam hal kesehatan dan kemandirian.

Untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak-anak ABK, diperlukan upaya yang menyeluruh dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Langkah-langkah konkret seperti menyediakan pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak ABK, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan potensi anak-anak ABK, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap mereka, sangatlah penting untuk memastikan bahwa anak-anak ABK memiliki akses yang setara dan dihormati dalam semua aspek kehidupan mereka.

Berikut adalah beberapa contoh diskriminasi yang mungkin dialami oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK):

1. Diskriminasi di Sekolah:

Anak-anak ABK seringkali mengalami diskriminasi di sekolah, baik dalam bentuk penolakan untuk diterima sebagai murid, penempatan mereka dalam kelas terpisah tanpa alasan yang jelas, atau kurangnya dukungan yang memadai untuk kebutuhan khusus mereka. Misalnya, anak-anak dengan autisme mungkin dilarang untuk masuk sekolah reguler dan diarahkan ke

sekolah khusus tanpa mempertimbangkan potensi dan kebutuhan mereka.

2. **Stigma dan Perlakuan Tidak Adil dari Teman Sebaya:**
Anak-anak ABK seringkali menjadi sasaran stigma dan perlakuan tidak adil dari teman sebaya mereka. Mereka mungkin diejek, diabaikan, atau bahkan diintimidasi karena perbedaan mereka. Contohnya, anak dengan gangguan pendengaran mungkin dipermalukan atau diabaikan oleh teman-teman mereka karena kesulitan berkomunikasi.
3. **Kurangnya Akses Terhadap Fasilitas dan Layanan:**
Anak-anak ABK seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas dan layanan yang sama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus. Misalnya, anak-anak dengan mobilitas terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses gedung sekolah yang tidak memiliki fasilitas aksesibilitas seperti tangga atau lift yang memadai.
4. **Diskriminasi di Tempat Kerja:**
Ketika anak-anak ABK tumbuh dewasa dan memasuki dunia kerja, mereka juga mungkin mengalami diskriminasi dalam proses perekrutan, promosi, atau perlakuan di tempat kerja. Misalnya, mereka mungkin diabaikan untuk promosi atau diberikan tugas-tugas yang kurang bergengsi hanya karena kebutuhan khusus mereka.
5. **Diskriminasi di Layanan Kesehatan:**
Anak-anak ABK juga rentan mengalami diskriminasi di layanan kesehatan. Mereka mungkin tidak mendapatkan perawatan medis yang sama dengan anak-anak lainnya atau diabaikan dalam proses diagnosis dan perawatan medis hanya karena kebutuhan khusus mereka.

6. Keterbatasan Akses Terhadap Kegiatan Sosial dan Rekreasi:

Anak-anak ABK seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap kegiatan sosial dan rekreasi karena kurangnya aksesibilitas atau kurangnya dukungan untuk kebutuhan khusus mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau tidak dapat mengakses tempat-tempat rekreasi umum karena kurangnya fasilitas aksesibilitas.

Strategi dan pemberdayaan penyangga disabilitas

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan untuk membantu seseorang yang mampu untuk ikut berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan pengaruh mempengaruhi kehidupannya. Seseorang yang mendapatkan keterampilan, kekuasaan dan pengetahuan dalam proses pemberdayaan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap kehidupan dirinya sendiri maupun kehidupan orang disekelilingnya. (Hendrayani, 2019)

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan tujuan. Dalam konteks proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kapabilitas kelompok yang rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sedangkan dalam konteks tujuan, pemberdayaan mengarah pada hasil atau kondisi yang diharapkan dari perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Ini termasuk memiliki kepercayaan diri, mampu mengungkapkan aspirasi, memiliki sumber penghasilan, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan

mandiri dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Definisi pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Berdasarkan yang saya temukan di kota Enrekang yang menderita disabilitas didampingi oleh beberapa orang mengajari disabilitas tersebut dengan kerajinan tangan dengan menjahit sepatu seseorang yang rusak. Dan apa bila sepatu tersebut sudah di jahit bisa dipake kembali oleh pemiliknya dan dibayar oleh pemilik sepatu tersebut. maka dari situlah penyandang disabilitas bisa terpenuhi kehidupan sehari-harinya juga tidak bosan di rumah seharian karena sudah ada kesibukan diluar rumah. Selain itu penyandang disabilitas juga bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Strategi Pemberdayaan Ada 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan ketika melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, yaitu (Wahyuni, 2018).

1. Motivasi. Dalam hubungan ini, masyarakat didorong untuk dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Misalnya, kanggota keluarga miskin didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan Peningkatan kesadaran masyarakat, misalnya, dicapai melalui pendidikan dasar pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan

vokasional dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3. Manajemen diri Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah system. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
4. Mobilisasi sumber Mobilitas sumber daya masyarakat dibutuhkan pengembangan suatu metode untuk menghimpun sumber-sumber indivisual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan system penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
5. Pembangunan dan pengembangan jaringan Pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat

diperlu dilakukan dengan peningkatan kemampuan para individu yang menyandang disabilitas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas ini berdasar pada teori Wilson dalam britania (2023) tentang proses pemberdayaan individu yang terdiri dari 4 aspek yaitu awaking (penyadaran), understanding (pemahaman), harnessing (pemanfaatan), dan using (pembiasaan).

1. Penyadaran (awakening)

Pada tahap penyadaran, masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Penyadaran yang dilakukan oleh Tiara Handicraft kepada penyandang disabilitas ialah mengidentifikasi atau mengamati bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk diberdayakan. dari masalah kecil yang ada disekitar kita simpelnya kayak makan. disabilitas tanpa tangan, tanpa jari, tanpa lengan kita lihat bagaimana dia makan meskipun dia tanpa tangan, kita bisa lihat dari dia pakai sisa tangannya yang ada atau dia tidak punya tangan tetapi pakai kaki untuk memegang sendok ketika kita bisa lihat cara mereka mengatasi masalah makan dengan seperti itu nanti untuk pekerjaan sama dia akan melakukan pendekatan dengan cara yang sama meskipun dia tanpa tanga itu kalau kasus disabilitas tanpa tanganya, kalau yang kaki dan lain lainnya itu kita bias lihat sehari hari dengan tanpa kaki tapi dia mobilitasnya pakai apa kalau dia bisa mengatasi itu cara menyelesaikan pekerjaan bisa juga.

2. Pemahaman (understanding)

Pada tahap pemahaman, masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri disabilitas sendiri, aspirasi disabilitas dan keadaan umum lainnya.

Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak pekerjaan yang layak. Dalam sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial yaitu, pemberdayaan pada penyandang disabilitas, tentunya pengertian yang diberikan adalah berupa wujud bahwa apa yang mereka lakukan ini juga sebuah wujud kesadaran sehingga juga perlu menanamkan rasa empati, kepedulian dan pemahaman tentang difabel kepada setiap orang melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan.

Proses pemberdayaan tahap pemahaman kepada pekerja penyandang disabilitas di Tiara Handicraft dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan dengan memperkenalkan intervensi dini dan prosedur standar keselamatan kerja serta para pegawai Tiara Handicraft juga diberikan jaminan perlindungan social ketenagakerjaan. Target dari proses pemberdayaan pada tahap pemahaman yang dijabarkan di atas adalah untuk memaksimalkan kemampuan miliki serta untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain sehingga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri.

3. Pemanfaatan (Harnessing)

Pegawai penyandang disabilitas Tiara Handicraft mengaplikasikan kemampuan yang dimilikinya untuk bekerja. Pendekatan yang diberikan oleh Tiara Handicraft melalui kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasannya mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi disabilitas lainnya. Tiara Handicraft hanya

mengembangkan, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi mereka dengan baik. Dengan adanya pemberdayaan pada penyandang disabilitas yang dilaksanakan dengan baik dan tepat, maka Tiara Handicraft telah melakukan pemanfaatan dengan baik. Penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

4. Pembiasaan (Using)

Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam prose pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya. Karena pada dasarnya hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Berkaitan dengan pembiasaan pegawai Tiara Handicraft dalam bekerja, tidak terlepas dari fase adaptasi dengan kondisi keterbatasan yang ada untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan pegawai yang normal. Pada awal pastinya mereka mengalami kesulitan tetapi kalau di asah dan belajar lalu dikembangkan dan di gali potensi yang ada di setiap individu itu pasti bisa. Jadi mereka juga diberitahu bahwa disini tidak hanya pekerja saja tapi kamu juga bisa mengembangkan produk-produk, jadi kita berdiskusi bekerjasama juga untuk menghasilkan produk yang bagus.

Menurut Mulyati (2019), dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, mereka didampingi oleh masyarakat untuk melakukan pemetaan, merumuskan masalah, membuat rencana, melaksanakan program kegiatan, dan memantau serta mengevaluasi implementasi program. Selama setiap tahapan proses tersebut, pendamping juga berusaha menciptakan suasana yang kondusif, memberikan masukan

untuk meningkatkan kapasitas, dan membuka akses ke jaringan kerja, peluang, dan kesempatan di luar masyarakat desa.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial penyandang disabilitas, kebutuhan sosial mencakup interaksi dengan orang lain dan menjaga hubungan. Penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik membutuhkan interaksi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam lingkup masyarakat secara luas, untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Hal yang paling penting dalam kehidupan sosial penyandang disabilitas adalah bagaimana mereka dapat mewujudkan strategi untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti membangun kepercayaan diri, mendapatkan dukungan sosial, dan membangun jaringan sosial mereka (Amaliah, 2020).

1. Membangun Kepercayaan Diri

Dia ingin mencoba hal baru dengan mengoptimalkan potensi pendengarannya, kemampuan merasakan, dan ingatannya. Dengan potensi-potensi ini, dia ingin menjadi seorang tukang pijat. Dengan demikian, dia bisa memenuhi kebutuhan sosialnya dan merasakan kembali kepercayaan diri yang mungkin sempat hilang, sehingga tidak lagi merasa minder dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

2. Mendapatkan Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang didapatkan sesama disabilitas itu bisa berupa kesempatan untuk bisa saling berbagi pengalaman antar anggota PPDI Sultra dan saling memberi semangat agar teman-teman sesama disabilitas tidak merasa sendiri dan tidak merasa minder menjadi disabilitas. Dan dukungan yang mereka dapatkan bisa memupuk rasa percaya diri mereka untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki, berani bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dukungan sosial utamanya bagi para penyandang disabilitas itu tentunya tidak pernah jauh dari dukungan keluarga. Seperti halnya penyandang disabilitas TunaNetra, disabilitas mental yang sangat membutuhkan dukungan sosial yang berasal dari keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan sebagai lingkungan terdekat. Dimana keluargalah yang paling mengerti dan memahami kondisi yang dialami oleh para penyandang disabilitas.

3. Membangun Jaringan Sosial

Jaringan sosial pada dasarnya dibentuk oleh rasa saling mengenal, saling memberi informasi, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam menyelesaikan atau mengatasi berbagai situasi. Untuk membangun jaringan sosial, penting untuk memperluas relasi atau pertemanan. Dengan memiliki banyak teman, ini dapat membantu penyandang disabilitas dalam membangun kerja sama yang didasarkan pada kepercayaan seseorang. Hal ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan hubungan sosial mereka dengan orang lain.

Strategi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penyandang disabilitas, menurut Amalia (2020), adalah cara untuk mempertahankan kehidupan seseorang, namun harus berkelanjutan dan mampu menghasilkan. Memenuhi kebutuhan ekonomi bagi penyandang disabilitas bukanlah hal yang mudah. Bahkan bagi orang dengan fisik yang sempurna, memenuhi kebutuhan mereka sendiri bisa menjadi tantangan, apalagi jika mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup. Diskriminasi dan penolakan dalam pekerjaan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, membuat mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Namun, hal ini

berbeda bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDI Sultra. Mereka berusaha untuk memastikan kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi dan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian, anggota PPDI Sultra memiliki berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

1. Pelatihan

Pelatihan adalah proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang memberikan individu keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Melalui pelatihan, penyandang disabilitas dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan bidang usaha yang mereka tekuni.

2. Wirausaha

Melibatkan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Ini merupakan cara untuk meningkatkan taraf ekonomi seseorang. Dalam berwirausaha, diperlukan keberanian untuk menghadapi risiko dan kerja keras untuk menjaga usaha. Menjadi seorang wirausaha membutuhkan upaya yang menciptakan nilai ekonomi melalui kerja keras, ketekunan, dan kreativitas. Melalui usaha wirausaha, seseorang dapat menghasilkan pendapatan yang memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Penting untuk mencatat bahwa pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang lemah dan patut disayangi tidaklah benar.

3. Pekerjaan sampingan

Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan selain pekerjaan utama. Pekerjaan ini biasanya dilakukan setelah pekerjaan utama selesai. Pekerjaan sampingan dapat meningkatkan pendapatan seseorang jika pekerjaan utama tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Pentingnya melawan stigma diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan mengubahnya menjadi tindakan pemberdayaan. Ini dapat membantu penyandang disabilitas menjadi bagian aktif dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bukan hanya menjadi objek belas kasihan.

Dalam pemenuhan kebutuhan sosial penyandang disabilitas, kebutuhan sosial meliputi interaksi dengan orang lain dan menjaga hubungan. Penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik membutuhkan interaksi yang baik dengan orang-orang di sekitar mereka, termasuk dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Hal yang paling penting dalam kehidupan sosial penyandang disabilitas adalah bagaimana mereka dapat mewujudkan strategi untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, seperti membangun kepercayaan diri, mendapatkan dukungan sosial, dan membangun jaringan sosial (Amaliah, 2020).

Peranan Orang Tua

Orang tua merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk sosial dalam interaksi dengan kelompoknya. Soekanto (2006) menyatakan bahwa orang tua merupakan unit sosial terkecil yang secara alamiah mempunyai kewajiban dalam mendidik anaknya. Orang tua secara tradisional membesarkan anak-anak mereka dari generasi ke generasi.

Ritzer (2008), Karteno menyatakan bahwa orang tua merupakan unit sosial terkecil yang memberikan landasan utama bagi perkembangan seorang anak. Karena anak-anak menghabiskan sebagian besar hidupnya di lingkungan rumah, maka peran orang tua sangat penting dalam keluarga, terutama ketika anak masih dalam pengasuhan atau ketika

anak sudah beranjak besar. Sekolah Dasar yaitu usia 0 sampai 12 tahun, terutama peran ibu. Orang tua bertanggung jawab membesarkan anak.

Orangtua dapat menjadi advokat yang kuat untuk anak-anak mereka dengan menyebarkan pemahaman tentang autisme kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang autisme, stigma sosial dapat berkurang dan masyarakat akan lebih memahami kebutuhan dan potensi anak-anak dengan autisme (Nurhasanah, P., Rini, F. : 2019).

Orang tua juga dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Melalui terapi dan pendidikan khusus, anak-anak dengan autisme dapat belajar cara berkomunikasi dengan lebih efektif dan berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Orang tua dapat mendukung proses ini dengan memberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan sosial dalam situasi sehari-hari.

Selain itu, penting bagi orang tua untuk membangun jaringan dukungan yang kuat. Bergabung dengan kelompok pendukung orang tua autisme atau organisasi komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan informasi yang berguna. Orang tua dapat saling berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya yang dapat membantu dalam menghadapi stigma sosial (Ika Firma, D. P., Asep, S. :2020).

Tidak kalah pentingnya, orang tua juga perlu menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Menghadapi stigma sosial bisa menjadi tantangan yang berat, dan penting bagi orang tua untuk merawat diri sendiri agar dapat memberikan dukungan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mencari waktu untuk beristirahat, menjaga pola makan yang sehat, dan mencari dukungan dari orang lain adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan.

Dalam menghadapi stigma sosial terkait autisme, peran orang tua sangatlah penting. Dengan menjadi advokat, mendukung perkembangan sosial anak-anak, membangun jaringan dukungan, dan menjaga kesehatan diri sendiri, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghadapi stigma sosial dengan lebih baik dan mencapai potensi penuh mereka.

Stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus tentu berdampak pada kepercayaan diri anak dan keluarganya, namun bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah, masyarakat, dan orang tua, kerjasama yang maksimal sangat diperlukan.

Menurut Handojo (2008) autisme suatu kelainan yang mengganggu perkembangan perilaku anak dan dimulai sebelum usia tiga tahun. Autism ditandai dengan gangguan dalam sosialisasi, komunikasi, perilaku autis, dan kesulitan mengatur emosi.

Berdasarkan pada Individuals with Disabilities Education (IDEA) karya Rahardja dan Sujarwanto (2010) yang menyatakan bahwa autisme merupakan gangguan perkembangan yang secara signifikan berdampak pada kemampuan berbahasa, komunikasi nonverbal, dan interaksi sosial. biasanya terjadi sebelum usia 3 tahun dan berdampak negatif pada prestasi akademik anak.

Karakteristik yang umumnya dikaitkan dengan autisme termasuk melakukan aktivitas berulang atau gerakan stereotip, penolakan terhadap perubahan lingkungan atau rutinitas, dan respons yang tidak tepat terhadap pengalaman sensorik. Ciri-ciri anak autis dalam beberapa aspek perkembangan sebagai berikut (Khairunisa, R., Ana, R., Muhammad, N. J. : 2018):

1. Komunikasi

- a. Terlambatnya dalam berbahasa atau tidak pernah berbicara
- b. Anak seperti tuli sulit untuk berbicara
- c. Kata-kata yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan arti
- 2. Interaksi sosial
 - a. Penderita autisme lebih suka menyendiri
 - b. Tidak ada kontak mata atau sangat sedikit, bahkan menghindari kontak mata
 - c. Tidak berminat bermain dengan teman
- 3. Gangguan sensorik
 - a. Sangat sensitif terhadap sentuhan, tidak suka dipeluk
 - b. langsung menutup telinga bila mendengar suara keras
 - c. senang mencium dan menjilat mainan dan benda
- 4. Pola bermain
 - a. Umumnya tidak suka bermain bersama teman
 - b. tidak suka bermain dengan teman sebaya
 - c. tidak kreatif atau imajinatif
- 5. Perilaku
 - a. Mungkin bertindak berlebihan (hiperaktif) atau berperilaku buruk (hipoaktif)
 - b. Menampilkan perilaku yang merangsang diri sendiri seperti melambai dan mengayun seperti burung
 - c. Tidak menyukai perubahan
- 6. Emosional
 - a. Marah tanpa alasan
 - b. Tantrum (amukan yang tidak terkendali) jika dilarang atau keinginannya tidak dikabulkan.
 - c. Terkadang dia suka menyerang dan menghancurkan

Menurut Maria & Rizki (2020) Anak autisme pada umumnya dapat memperoleh pengetahuan matematika,

namun memerlukan bantuan benda konkrit untuk melakukannya. Metode yang dapat digunakan adalah dengan mengulang tugas berkali-kali hingga terbentuk skema pengetahuan pada struktur memori.

Anak autisme bisa belajar, namun memerlukan bantuan dan kreativitas dari guru dan orang tua agar tetap fokus, termasuk menyediakan media pembelajaran yang disukai anak. Gangguan perkembangan yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku seseorang. Untuk mencapai hasil yang optimal bagi tumbuh kembang anak autisme, sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan terapi nutrisi untuk menstabilkan konsentrasi anak autisme. Serta orang tua memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak. Membantu mereka menghadapi stigma sosial yang mungkin terjadi (Echa, S., Rodia, A., : 2022).

Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan sangat membantu perkembangan dalam mencapai tumbuh kembang anak autisme secara optimal. Dengan menyediakan waktu untuk beraktivitas bersama anak, melakukan kontak ekstensif dengan anak, memberikan dukungan finansial, mengasuh anak, dan bermain dengan anak.

Orang tua merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi anaknya sehingga hal ini sangatlah penting. Pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini akan mengarahkan orang tua untuk secara khusus mencari solusi partisipatif yang mereka harap dapat menyemangati anak-anak mereka. Orang tua dari anak autisme mempunyai pola asuh yang unik karena kondisi anak autisme berbeda dengan anak normal. Orang tua dari anak autisme perlu memiliki pengetahuan khusus tentang cara merawat dan membesarkan anak autisme.

Hal ini disebabkan karena anak autis mempunyai masalah pendengaran dan komunikasi, serta kurangnya kontak mata dan respon wajah yang buruk. Untuk mendidik anak autis agar mandiri dalam beraktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, buang air kecil, dan buang air besar, orang tua harus sabar melatih anaknya agar patuh mengikuti apa yang diajarkan (Ika Sandra, D., dkk : 2023).

Dalam hal ini umumnya, selain kemampuan psikomotorik, kognitif, dan emosional, orang tua juga harus menjaga fisik, mulai dari pemberian makan dan penghidupan yang layak. Semua anak mulai belajar melalui kontak dengan lingkungan terdekatnya, terutama ibunya. Mereka kemudian belajar melalui kontak dengan ayah dan anggota keluarga lainnya, dan secara bertahap melalui lingkungan yang lebih luas.

Jika keluarga tidak lagi mendukung pengalaman belajar pertama anak, maka anak berisiko menghadapi hambatan pada tingkat berikutnya yang lebih komprehensif. Dan hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik dari segi potensinya maupun perkembangan psikologisnya.

Dengan demikian penting bagi orangtua dalam menghadapi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Dengan beberapa usaha yang bisa dilakukan:

Edukasi Masyarakat: Orang tua dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang kondisi anak berkebutuhan khusus kepada masyarakat sekitar. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau diskusi terbuka.

Membangun Jaringan Dukungan: Orang tua juga dapat membantu membangun jaringan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus. Jaringan ini bisa melibatkan keluarga,

teman, guru, dan profesional lainnya yang berhubungan dengan anak.

Menghadapi Stigma dengan Positif: Orang tua harus menghadapi stigma dengan sikap positif dan tidak membiarkan stigma tersebut mempengaruhi cara mereka memandang atau merawat anak mereka.

Advokasi: Orang tua dapat menjadi advokat bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka dapat berjuang untuk hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan perawatan yang tepat.

Mendukung Anak: Yang terakhir dan yang paling penting, orang tua harus selalu mendukung anak mereka. Dukungan ini bisa berupa memahami kebutuhan anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, dan membantu anak mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri.

Peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan autisme. Beberapa poin penting yang bisa kita ambil adalah:

1. Pemilihan pengasuhan dan penanganan yang tepat untuk anak usia dini berkebutuhan khusus sangat diperlukan. Ini bisa melibatkan kerjasama antara lingkungan rumah dan sekolah.
2. Orang tua memiliki peran penting dalam memperhatikan terapi diet yang dapat membantu menstabilkan fokus anak.
3. Orang tua juga berperan sebagai advokat bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus.
4. Dukungan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus memiliki peran yang sangat vital. Orangtua menghadapi tantangan dan peranan utama dalam mengasuh dan membesarkannya.

Dalam konteks menghadapi stigma sosial, dukungan dan peran orang tua menjadi sangat penting. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghadapi tantangan dan stigma sosial yang mungkin mereka temui.

Dukungan Sosial

Pada fase pertama yang dimana mulai dari masa kanak-kanak menuju ke fase dewasa dan berlanjut ke fase lansia atau disebut dengan lanjut usia, sehingga manusia melawati proses atau tahap perumbuhan dari fisik maupun dengan psikis. Dimasa pertumbuhan, individu akan melwati beberapa aspek yang dapat dkembangkannya agar individu dapat melangsanakan atau melakukan tugas perkembangannya yang secara optimal sehingga akan merasakan kesejahteraan didalam dirinya sendiri (Anggraeni dkk, 2021.)

Di dalam perkembangan ataupun pertumbuhan manusia tentunya ingin mempunyai fisik yang sehat, mental yang baik serta lingkungan sosial sekitar yang selalu memberikan sebuah dukungan. Akan tetapi tidak semua manusia terlahir dengan normal atau fisik yang sehat, malahan diberikan atau dikarunvakan dengan mempunyai keterbatasan fisik attau biasa dvsebut dengan penyandang disabilitas (Angggraeni dkk, 2021). Peyandang disabilitas dapat diartikan dengan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, sensorik ataupun dengan mentalnya sehingga memerlukan jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengalami hambatan ataupun kesulitan dalam berpartisipasi dengan warga atau di sekitarnya.

Dengan mempunyai keterbatasan fisik yang dialami, individu tentunya mengalami pengucilan sosial atau kurangnya kesejahteraan sosial dikarenakan keterbatasan fisik yang ia

milikinya sehingga tentunya masalah dalam psikososialnya akan menjadi kekhawatiran, isolasi dan ketergantungan dan orang yang mengalami disabilitas seringkali dianggap rendah dan tidak memiliki kemampuan sehingga memperoleh diskriminasi dari lingkungan masyarakat di sekitar mereka (Saputri dkk, 2019).

Peyandang disabilitas tentunya ingin mempunyai permasalahan sosial yang baik yang berkaitan dengan masyarakat yang ada disekitarnya karena akan berdampak berbagai aspek seperti halnya aspek ekonomi, mental, serta dengan sosialnya yang mampu mempengaruhi kesejahteraan bagi para payandang disabilitas (Indrakentjana, 2015).

Anak yang penyandang disabilitas atau disingkat dengan APD tentunya memiliki hak yang sama agar terpenuhi semua dalam kebutuhan hidupnya seperti halnya mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari hal-hal yang meengancam didalam hak-hak mereka seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentannng Penyandang Disabilitas (Prayogi, 2022).

Anak yang memiliki keterbatasan fisik atau peyandang disabilitas akan sulit melakukan penyusunan diri dengan lingkungannya sehingga mengalami hambatan-hambatan disekitar mereka. Hambatan-hambatan tersebut akan muncul akibat dari ketakutan-ketakutan didalam dirinya sendiri seperti halnya kurangnya percaya diri, motivasi serta tentunya ketakutan dalam lingkungan sosial sehingga memerlukan dukungan sosial agar mendapatkan suatu kesenangan, penghargaan, perhatian serta kesejahteraan yang didapatkan dari orang lain ataupun didalam sebuah sekelompok. Dengan adanya kesejahteraan sosial atau dukungan sosial, anak disabilitas akan mudah atau mampu memnuhi setvap hak yang dimilikinya seperti halnya didalam dunia pendidikan untuk mencapai prestasi mereka seperti halnya mencapai hak mereka atau kebutuhan mereka sehingga kesejahteraan sosial

sangatlah penting bagi peyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan yang dimilikinya serta mencapai tujuan yang diinginkan (Rosalina & Apsari, 2020).

Orang dengan disabilitas fisik bisa merasa bahagia ketika mereka merasa positif dan optimis tentang kehidupan mereka secara emosional, dan merasa puas dengan kehidupan mereka secara intelektual. Interaksi sosial yang positif dapat memberikan dukungan yang berarti bagi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kondisi psikologis mereka, membuat mereka lebih positif daripada sebelumnya sehingga Penyandang disabilitas fisik sering menghadapi dua bentuk perlakuan negatif, yakni pemberian label berdasarkan penampilan fisik dan kurangnya aksesibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya orang lain, mereka juga menginginkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Individu yang merasa sejahtera cenderung memiliki rasa percaya diri yang kuat, yakin akan diterima oleh banyak orang, memiliki ketahanan fisik yang baik, dapat mengatasi masalah dan stres, serta memiliki tujuan hidup yang jelas (Fajar, 2020).

Individu yang mengalami disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mengontrol diri, baik di rumah maupun di lingkungan luar, serta perlu bergantung pada bantuan orang lain. Mereka yang lahir dengan disabilitas cenderung memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri, sering menyalahkan diri atas keterbatasan yang dimiliki, yang pada gilirannya mempengaruhi pandangan mereka terhadap masa depan. Hal ini dapat mengakibatkan kesejahteraan psikologis yang negatif, di mana mereka kurang percaya diri dan sulit menerima diri sendiri dan kondisinya (Rahmania dkk, 2019).

Penyandang disabilitas sering merasa sulit menerima keadaan diri, yang dapat menyebabkan kurangnya kebahagiaan

dan tekanan psikologis. Semua ini menjadi hambatan bagi mereka untuk merasa sejahtera secara psikologis, di mana orang yang memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain, mampu membuat keputusan sendiri, mengatur perilaku mereka, menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan mereka, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan menggali potensi diri untuk dikembangkan, akan merasa lebih bahagia dan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik (Rahmania dkk, 2019).

Dukungan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kecemasan pada individu. Adanya dukungan sosial membuat individu merasa dicintai, dihargai, dan merasa sebagai bagian dari suatu kelompok. Hal ini berdampak positif pada individu, di mana mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat, merasa diterima, disayangi, diperhatikan, dan diakui oleh orang lain. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan dukungan fisik ini, penyandang disabilitas belajar untuk percaya pada orang lain, yang kemudian membuat mereka yakin bahwa orang tersebut mampu memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Dukungan sosial dapat diukur menggunakan Skala Dukungan Sosial, yang mencakup aspek-aspek dukungan sosial (Mustafa, 2013).

Disabilitas fisik sering kali mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Penyandang disabilitas sering kali diabaikan oleh masyarakat, dan mereka mengalami berbagai hambatan karena terbatasnya partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan. Pengabaian dari masyarakat dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penyandang disabilitas fisik, seperti merasa rendah diri dan kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang yang mengalami disabilitas dan penyakit cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada orang yang sehat dan tidak memiliki

keterbatasan fisik. Remaja yang normal cenderung lebih mudah beradaptasi dengan kondisinya dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Secara umum, kategori orang penyandang disabilitas memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada populasi orang yang normal (Rahmah, 2018).

Kualitas hidup yang rendah memang bisa menjadi tantangan besar bagi penyandang disabilitas fisik. Sulitnya untuk memaknai secara positif tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagaimana orang normal pada umumnya bisa membuat mereka merasa terisolasi dan tidak puas dengan hidup mereka. Penting bagi kita untuk memberikan dukungan dan empati kepada mereka, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan begitu, mereka bisa merasa lebih termotivasi dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Bagi penyandang disabilitas fisik yang dapat berpartisipasi dalam bidang-bidang tertentu, seperti olahraga, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, dukungan sosial sangat penting bagi mereka. Karena secara fisik mereka memiliki keterbatasan yang berbeda dengan orang-orang yang fisiknya normal, mendapatkan dukungan sosial dapat membantu mereka memaknai hidup secara lebih positif (Rahmah, 2018).

Dengan keterbatasan fisik atau disabilitas, mereka juga membutuhkan peran dukungan terutama dalam sosial atau dilingkungan masyarakat itu sendiri agar mereka mendapatkan hak yang mereka inginkan seperti halnya perhatian ataupun kesenangan yang ia capai. Dukungan sosial menurut beberapa para artikela menyatakan bahwasanya sangatlah penting bagi para disabilitas terutama dalam fisik karena berbeda dengan hal normal sehingga mereka membutuhkan hal tersebut agar mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan. Dan para masyarakat atau disekitaran penyandang disabilitas tentunya

mampu memberikan bantuan atau motivasi agar para disabilitas senang dan bukan hanya dari lingkup keluarga saja mendapatkan support system malahan juga mendapatkan dari lingkungan sosial ataupun masyarakat agar para peyandang disabilitas tidak mudah putus asa ataupun menyerah.

Penyandang disabilitas atau biasa disebut dengan keterbatasan fisik yang dimiliki sejak lahir ataupun mendapatkan kejadian seperti kecelakaan baik didalam keterbatasan inteektual, mental, ataupun sensorik dalam wakttu yang jangka panjang sehingga a mengalami keterbatasan didalam interaksi sosialnya ataupun didalam lingkungannya ataupun didalam pendidiknya, disabilitas seperti halnya tuna rugu, wicara, down syndrome, tuna netra dan lain sebagainya yang sangat berpengaruh dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka (Rosalina & Apsari, 2020).

Penyandang disabilitas merupakan individu atau seseorang yang secara fisik, kognitif, psikologis serta sosial yang mempunyai berbagai hambatan dalam mencapai sebuah tujuan serta memenuhi kebutuhan yang secara maksimal dan ingin memenuhi segala hak tugas didalam perkembangannya agar merasakan kesenangan didalam dirinya sendiri, tentunya ingin berinteraksi sosial seperti seseorang yang normal lainnya, diterima keberadaannya dan tidak ingin dikucilkan sehingga para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan sosial dari orang sekitarnya (Hayyu & Mulyana, 2015).

Penyandang disabilitas sering menghadapi pandangan negatif dari lingkungan mereka, seperti stigma dan perilaku diskriminasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widyastutik & Pribadi (2020), stigma yang diberikan pada penyandang disabilitas dapat menyebabkan pengucilan dalam kehidupan sosial. Pengucilan ini terjadi karena perbedaan fisik yang mencolok antara penyandang disabilitas dan orang

normal. Stigma bisa berupa pengucilan, ejekan, hinaan, dan bahkan tindakan kekerasan. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan disabilitas masih belum sepenuhnya diterima. Mereka masih percaya bahwa penyandang disabilitas adalah ancaman, lemah, dan merugikan, sehingga keberadaan mereka dihindari (Dayanti & Pribadi, 2022).

Penyandang disabilitas terdiri dari empat jenis, yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Mereka bisa mengalami satu jenis disabilitas atau lebih, baik secara bersamaan atau secara berurutan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh tenaga medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi, termasuk kurangnya tempat di masyarakat dan keluarga. Mereka sering kali tidak diperlakukan sama seperti anak-anak lainnya dan dianggap lemah, tidak berdaya, dan hanya memerlukan belas kasihan. Hak-hak mereka sering diabaikan, termasuk hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, serta kemudahan mengakses fasilitas umum (indahni dkk, 2023).

Fajar (2020) mengemukakan bahwasanya masalah yang sering terjadi pada penyandang disabilitas meliputi keterbatasan dalam hal motorik, gangguan psikologis seperti kecemasan akan masa depan, depresi, kurangnya kontrol impuls, kesulitan dalam penerimaan diri, motivasi rendah, dan masalah dalam pengendalian diri. Selain itu, terdapat masalah kurangnya kesejahteraan seperti penyesuaian diri yang rendah, kurangnya dukungan sosial, dan interaksi sosial yang kurang memuaskan, terutama saat berada di tempat umum. Hal ini membuat penyandang disabilitas merasa bahwa hidup mereka belum sejahtera, terutama karena merasa belum dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang mereka sayangi, kesulitan mencari pekerjaan karena keterbatasan fisik, dan merasa gelisah.

Dukungan sosial diperlukan sebagai bagian dari hubungan interpersonal yang menunjukkan rasa puas secara batin dan emosional pada diri seseorang dalam berbagai keadaan yang penuh tekanan. Dengan dukungan sosial, seseorang dapat merasa diperhatikan, dicintai, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi masalah dan memiliki rasa percaya diri yang baik. Oleh karena itu, rasa percaya diri ini dapat membuat individu merasa puas terhadap hidupnya (Fajar, 2020). Dukungan sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah kurangnya dukungan sosial, terutama karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian dari keluarga mereka (Muktiwibowo & Prayogi, 2022).

Sehingga para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan sosial agar mampu meningkatkan percaya diri didalam dirinya sendiri yang dimana dirinya dianggap sebagai umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa dirinya dicintai, diperhatikan, dihargai, dan dihormati. Ini melibatkan keberadaan, kesediaan, dan kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, yang menghargai dan menyayangi kita, serta terlibat dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik sehingga dukungan sosial sangatlah penting bagi orang yang mengalami disabilitas baik didalam fisik, sensorik, mental ataupun dengan intelektual mereka (Siregar dk, 2019).

Dengan adanya dukungan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dukungan juga dapat memberikan sumber daya dalam lingkungan hidupnya sehingga dapat mencapai kualitas

hidup sesuai dengan keinginan atau pilihan mereka (Ningsih & Susanti, 2019).

Menurut Siregar dkk (2019) menyatakan bahwasanya, ada beberapa jenis di dalam dukungan sosial yang dapat digunakan dalam penyandang disabilitas yaitu Ada beberapa jenis dukungan sosial, yaitu:

1. Dukungan penghargaan: Dukungan ini mencakup penghargaan positif kepada orang lain, dorongan, persetujuan atas ide atau perasaan individu, memberikan semangat, dan memberikan perbandingan positif. Ini juga mencakup memiliki seseorang yang dapat diajak bicara tentang masalah mereka, menunjukkan bahwa individu dihargai dan diterima apa adanya.
2. Dukungan emosional: Dukungan ini terkait dengan aspek emosional, seperti menjaga keadaan emosi, afeksi, atau ekspresi. Ini mencakup ekspresi empati, kepedulian, dan perhatian pada individu, memberikan rasa nyaman, memiliki dan perasaan dicintai. Dukungan ini lebih fokus pada pemberian semangat, kehangatan, cinta kasih, dan emosi, serta melibatkan perhatian, rasa percaya, dan empati agar individu merasa berharga. Dukungan ini penting dalam menghadapi situasi yang dianggap tidak dapat dikontrol.
3. Dukungan instrumental: Dukungan ini melibatkan pemberian sesuatu dalam bentuk bantuan nyata atau alat.
4. Dukungan informasi adalah memberikan solusi pada suatu masalah dengan menyediakan informasi, memberikan saran langsung, atau memberikan umpan balik tentang kondisi individu dan tindakan yang harus diambil. Dukungan ini membantu individu mengenali masalah yang sebenarnya dan memberikan solusi,

nasehat, penghargaan, saran, atau umpan balik mengenai tindakan yang telah dilakukan.

5. Dukungan jaringan adalah perasaan individu sebagai bagian dari kelompok. Ini dapat berupa menghabiskan waktu bersama orang lain dalam aktivitas rekreasi di waktu senggang atau menemani seseorang saat istirahat atau rekreasi.

Salah satu karakteristik manusia adalah kebutuhan akan interaksi sosial. Dukungan sosial merupakan bentuk pengakuan dari orang lain bahwa seseorang dihargai, diperhatikan, dihormati, dicintai, dan merupakan bagian dari jaringan hubungan yang saling menguntungkan. Ini melibatkan penerimaan dukungan dari orang-orang terdekat individu, termasuk dukungan keluarga, dukungan dari teman-teman, dan dukungan dari orang-orang penting di sekitar individu (Anggereni & Hijrinti, 2023).

Dukungan sosial sangat penting bagi penyandang disabilitas karena lingkungan pertama yang dapat menjadi sumber dukungan alami bagi penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar untuk percaya diri dan merasa diterima oleh lingkungan mereka. Jenis dukungan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas meliputi dukungan emosional, informasi, dan bantuan materi atau alat bantu. Dukungan sosial ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan psikologis penyandang disabilitas karena membantu mereka merasa tidak berbeda dari anak-anak normal, serta memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan penghargaan yang sangat berarti bagi mereka (Widhianti dkk, 2022).

Para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan moral sebagai kebutuhan utama untuk memperkuat keyakinan dan semangat mereka dalam mencapai cita-cita. Dukungan ini bisa datang dari berbagai sumber seperti pasangan, keluarga,

tetangga, teman, rekan kerja, perawat, atau tenaga ahli kesehatan dan kesejahteraan. Semua aktor sosial di sekitar penyandang disabilitas berperan dalam memberikan dukungan ini. Cohen dan rekan-rekannya mengidentifikasi empat bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas, yaitu bantuan nyata, penilaian atau penghargaan, dukungan terhadap harga diri, dan dukungan dalam merasa termasuk dan memiliki afeksi kebersamaan (Alfariz, 2017).

Penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan sosial tetapi tidak ingin disayangkan oleh orang lain. Mereka menginginkan dukungan, kenyamanan, dan penghargaan saat mereka melakukan sesuatu. Sarafino (1994) menjelaskan bahwa dukungan sosial adalah tentang memberikan kenyamanan, merawat, atau menghargai orang lain. Meskipun setiap individu membutuhkan perhatian, dukungan, dan kenyamanan dari orang lain, mereka tidak ingin dipandang sebagai objek simpati. Dengan demikian, dukungan sosial ini lebih berfokus pada memberikan kenyamanan, perhatian, dan penghargaan kepada orang lain (Rahmania dkk, 2019).

Sehingga peran dalam dukungan sosial sangatlah penting bagi setiap manusia baik itu manusia yang normal ataupun mempunyai keterbatasan fisik, sebagai manusia normal tentunya tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain ataupun bantuan dalam sosial sehingga begitupun yang dirasakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, intelektual ataupun mental, ia juga membutuhkan sebuah dukungan baik dalam dukungan keluarga ataupun didalam dukungan sosial yang membuat dirinya diperhatikan tanpa dikucilkan oleh lingkungannya sendiri.

Berdasarkan pemahaman ataupun pembahasan di atas bahwasanya, penyandang disabilitas tentunya ingin mendapatkan dukungan sosial agar dirinya tidak merasakan

terkucilkan di lingkungan masyarakat, peyandang disabilitas ingin juga diberikan semangat, motivasi, perhatian agar dirinya terus bersemangat menjalankan sebuah kehidupan yang membuat dirinya mengalami berbagai hambatan di dalam perkembangan ataupun pertumbuhan yang ia lewati. Penyandang disabilitas juga ingin mencapai kesejahteraan didalam kehidupannya sendiri agar mendapatkan penghargaan ataupun kesenangan didalam dirinya dan tidak muda mengalami putus asa, sehingga dukungan-dukungan yang diberikan kepada peyandang disabilitas ini sangatlah penting bagi mereka, baik dalam dukungan keluarga ataupun dukungan dalam sosial, bukan hanya itu dukungan sosial juga dapat meningkatkan percaya diri bagi para peyandang disabilitas yang dianggap sebagai umpan balik bahwa dirinya sedang diperhatikan, dicintai, ataupun dihormati oleh orang lain. Sehingga adapun beberapa bentuk dukungan sosial bagi penyandang disabilitas seperti halnya dukungan penghargaan, emosional, instrumental, informasi ataupun jaringan. Para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan moral sebagai kebutuhan utama untuk memperkuat keyakinan dan semangat mereka dalam mencapai cita-cita. Dukungan ini bisa datang dari berbagai sumber seperti pasangan, keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, perawat, atau tenaga ahli kesehatan dan kesejahteraan dan Dukungan sosial ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan psikologis penyandang disabilitas karena membantu mereka merasa tidak berbeda dari anak-anak normal, serta memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan penghargaan yang sangat berarti bagi mereka.

BAB 5

KECACATAN BERPIKIR SESEORANG TERHADAP KELOMPOK DIFABEL

Sebagai orang yang paham sepakat bahwa demokrasi perlu diadopsi dan diperkuat. Alasan utamanya adalah untuk mencegah munculnya pemimpin diktator yang membungkam suara rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Sistem diktator, yang sering kali berakar pada monarki, memusatkan kekuasaan di tangan satu orang, sehingga menghambat partisipasi publik dan menghambat kemajuan. Terdapat sepuluh prinsip utama yang mendasari pentingnya demokrasi, yaitu: Mencegah tirani dan penindasan, Menjamin hak-hak dasar dan fundamental bagi semua warga Negara, Memberikan kebebasan umum dan hak berekspresi, Mendukung hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, Mendorong otonomi moral dan tanggung jawab pribadi, Memfokuskan pada pengembangan manusia dan peningkatan kualitas hidup, Melindungi kepentingan dasar dan hak asasi manusia, Menjamin kesamaan politik dan hak partisipasi bagi semua warga Negara, Menghasilkan produk demokrasi modern yang bermanfaat bagi masyarakat, Mempromosikan perdamaian dan stabilitas antar Negara (Fikri, 2016).

Dari prinsip demokrasi diatas suatu nilai yang dipegang untuk dapat megembangkan bentuk pemerintahan yang demokratis, ketika prinsip demokrasi tidak dapat dijalan dengan semestinya pemerintah di negara itu akan ricuh dan sulit ditegahkan (Putri, 2020).

Sepuluh prinsip demokrasi mendefinisikan sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi kelompok minoritas, dan yang terpenting, melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya memusatkan kekuasaan pada kelompok elit, tetapi membuka

kesempatan bagi elemen-elemen masyarakat non-elit untuk turut serta dalam rotasi kekuasaan, sehingga mencegah munculnya tirani.

Kenyataannya sistem demokrasi tidak sesuai yang dipikirkan, marginalisasi kelompok minoritas masih sering terjadi, kenyataan berbanding terbalik dengan realitas menunjukkan demokrasi secara perilaku belum terlaksanakan secara maksimal. Di Indonesia konteks demokrasi sudah lama diterapkan akan tetapi masih muncul marginalisasi terhadap berbagai kelompok baik dari suku, agama, golongan dan kelompok yang mengalami keterbatasan baik dari segi fisik, psikis, dan sensorik yang biasa disebut dengan sekelompok difabel.

Dilihat dari keberadaan kaum difabel bahwa pada tahun 2023 di Indonesia jumlah mereka relatif bertambah banyak. Kelompok dengan jumlah besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap kelompok tersebut untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan permasalahannya. Data dari WHO, Bank Dunia, dan ILO menunjukkan bahwa jumlah kelompok ini terus meningkat. Oleh karena itu, analisis terhadap kelompok ini menjadi sebuah urgensi. Jumlah data yang diperoleh berkisar 22,27 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah terbanyak kaum difabel ini pada usia lanjut (Supanji, 2023).

Di balik senyuman dan optimisme mereka, banyak penyandang difabel yang masih harus berhadapan dengan realita kelam. Mereka sering menerima perlakuan tidak menyenangkan, stigma negatif, dan stereotip dari orang-orang sekitar. Diskriminasi pun kerap kali mereka alami, mulai dari bullying, dikucilkan, hingga minimnya akses pendidikan dan lapangan pekerjaan (Jamal, 2017).

Dalam konteks sosial, kaum difabel dipandang sebagai kelompok yang tidak termasuk dalam struktur masyarakat, sehingga perlu adanya eksklusivisme ke dalam struktur sosial lainnya. Anggapan bahwa difabel merupakan patologi dalam masyarakat, mempertajam perspektif bahwa difabel harus direhabilitasi dalam suatu tempat khusus. Dengan kata lain, bahwa keberadaan kaum difabel dalam masyarakat lebih cenderung sebagai objek daripada sebagai subjek dari masyarakat, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya sebagai manusia yang berinteraksi sosial di dalam suatu masyarakat.

Kecacatan berpikir seseorang terhadap kaum difabel merupakan suatu pikiran yang salah, karena ada aspek perasaan dan perspektif yang salah tentang suatu hal. Ketika perspektif seseorang tentang suatu hal menjadi terbatas dan terbatas, perasaan yang salah akan secara bertahap berakar dan mengarah pada pola pikir yang dikenal sebagai "kecacatan berpikir". Menurutny, semakin liar kecacatan berpikir yang dipertahankan akan menyebabkan stigmatisasi negatif terhadap suatu hal. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas adalah salah satu contoh stigma liar yang masih ada di Indonesia. Stigma yang tidak masuk akal ini terutama merusak kaum difabel di Indonesia yang berbhineka. Mereka sering dihadapkan pada diskriminasi, pengabaian, atau perlakuan tidak adil karena pandangan sempit dan tidak tepat tentang apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang dapat mereka berikan untuk masyarakat (Ansori, 2023).

Penyandang disabilitas netra itu menjelaskan Stigma sebagai "konsep atau persepsi yang merendahkan atau mencemarkan citra seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap berbeda dari norma sosial."

Pandangan masyarakat terhadap kaum difabel masih beragam dan kompleks. Di satu sisi, banyak orang yang sudah mulai memahami dan menghargai kaum difabel. Mereka melihat bahwa kaum difabel memiliki potensi yang sama dengan orang lain dan mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Namun, di sisi lain, masih ada juga orang yang memiliki pandangan negatif terhadap kaum difabel. Mereka sering melihat kaum difabel sebagai beban masyarakat dan tidak mampu hidup mandiri. Pandangan ini tentu saja keliru dan harus diluruskan.

Beberapa pandangan negatif masyarakat pada kaum difabel yaitu: Kaum difabel adalah beban masyarakat, kaum difabel tidak mampu hidup mandiri, kaum difabel adalah orang yang berbeda dan tidak normal, kaum difabel tidak bisa berprestasi. Sehingga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang berpotensi buruk pada kaum difabel tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan dan inklusi. Kita perlu memahami bahwa kaum difabel adalah manusia yang sama dengan orang lain dan mereka memiliki hak yang sama untuk hidup dengan bahagia dan sejahtera.

Kelompok Difabel

Kelompok difabel adalah sekelompok orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah "difabel" lebih sopan digunakan dibandingkan dengan "cacat" atau "penyandang disabilitas" karena menekankan pada kemampuan dan potensi mereka, bukan pada kekurangannya.

Istilah difabel merupakan label baru yang disahkan oleh pemerintah melalui undang-undang untuk menggantikan istilah "cacat" bagi orang-orang yang memiliki perbedaan fisik

atau mental. Sebelumnya, terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan bagi mereka. Namun, istilah "cacat" dianggap kurang tepat dan merendahkan, sehingga digantikan dengan istilah "difabel" yang lebih positif dan menekankan pada kemampuan dan potensi mereka.

Penggunaan istilah "cacat" untuk penyandang disabilitas sudah tidak tepat dan digantikan dengan istilah "disabilitas" melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah "disabilitas" dianggap lebih relevan dan manusiawi karena tidak mereduksi nilai dan potensi manusia.

Perubahan istilah dari "cacat" menjadi "Penyandang Disabilitas" belum sepenuhnya diterima oleh semua kalangan. Masih terdapat perdebatan dan diskusi tentang istilah yang paling tepat untuk digunakan.

Kata "disabilitas" memiliki makna negatif karena berasal dari kata "disable" yang berarti "tidak mampu". Oleh karena itu, para pemerhati dan komunitas difabel lebih memilih istilah "difabel" yang memiliki makna lebih positif dan menekankan pada kemampuan mereka. Istilah "difabilitas" berasal dari kata "difable" yang berarti "berbeda kemampuan". Peneliti memilih istilah ini karena menekankan pada perbedaan kemampuan individu, bukan pada kekurangannya, dan tidak mengandung unsur diskriminatif (Fibrianto, 2018).

Berikut beberapa jenis difabel: Difabel fisik: memiliki keterbatasan pada anggota tubuh, seperti tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu. Difabel mental: memiliki keterbatasan pada kemampuan berpikir dan berperilaku, seperti autisme, *down syndrome*, dan *schizophrenia*. Difabel intelektual: memiliki keterbatasan pada kemampuan belajar dan memahami informasi, seperti tunagrahita. Difabel sensorik:

memiliki keterbatasan pada kemampuan melihat, mendengar, atau berbicara, seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara.

Kelompok difabel memiliki hak yang sama dengan orang lain, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas. Masyarakat perlu memberikan dukungan dan aksesibilitas yang memadai agar kelompok difabel dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat (Lukita, 2024).

Berikut beberapa contoh dukungan yang dapat diberikan kepada kelompok difabel:

1. Memberikan aksesibilitas: menyediakan fasilitas yang ramah difabel, seperti jalur khusus, lift, dan toilet khusus.
2. Memberikan pendidikan: menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi difabel.
3. Memberikan kesempatan kerja: memberikan kesempatan kerja yang sama bagi difabel dengan orang lain.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat: mengedukasi masyarakat tentang difabel dan hak-haknya.

Dengan dukungan dari masyarakat, kelompok difabel dapat hidup mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Difabel bukan Beban, Melainkan sebuah Kekuatan

Stigma difabel, problematika sosial yang sudah lama tertanam di berbagai budaya. Dampaknya, mereka sering mengalami diskriminasi, terpinggirkan, dan kesulitan mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Bullying terhadap difabel pun masih marak terjadi, baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Manusia dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Keunikan tersebut bisa berupa kelebihan maupun kekurangan. Kekurangan yang bersifat fisik

maupun non-fisik, sering disebut sebagai "cacat". Difabel adalah individu istimewa yang memiliki cara unik untuk menjelajah dunia. Kursi roda, bagi mereka yang tidak memiliki kaki, bukan hanya alat mobilitas, tetapi juga simbol kekuatan dan ketekunan dalam menaklukkan berbagai rintangan. (Maftuhin, 2016).

Stigma dan paradigma terhadap difabel harus diubah. Stigma ini dapat terjadi secara eksplisit (terbuka) dan implisit (tersembunyi). Difabel sering dipandang sebelah mata dan dianggap tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara setara dengan orang non-difabel. Namun, anggapan ini keliru. Difabel memiliki kemampuan dan potensi yang sama. Untuk mewujudkannya, mereka membutuhkan wadah untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka. (Arifin, dkk. 2020).

Kaum difabel sering mengalami peminggiran dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Keterbatasan fisik mereka sering disalahartikan sebagai ketidakmampuan untuk menjadi produktif dan menjalani kehidupan normal. Akibatnya, mereka menghadapi berbagai hambatan, seperti penolakan di sekolah umum, kurangnya akses informasi dan perangkat seleksi kerja yang ramah difabel, penolakan di lapangan kerja, minimnya fasilitas publik yang ramah difabel, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah untuk atlet difabel di tingkat dunia, serta stigma negatif yang melekat pada mereka.

Namun, di balik semua itu, kaum difabel memiliki kemampuan dan potensi yang sama seperti orang lain. Potensi tersebut dapat dikembangkan secara mandiri dengan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah difabel, sehingga mereka dapat

mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara maksimal kepada bangsa dan negara. (Ningrum, 2021)

Interaksi sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Interaksi ini terjadi dalam berbagai kelompok masyarakat, termasuk di antara anak-anak. Bagi anak-anak normal, interaksi sosial merupakan hal yang mudah dan natural. Namun, bagi anak difabel, interaksi sosial dapat menjadi lebih sulit. Hal ini disebabkan oleh kelainan fisik atau mental yang mereka miliki. Kelainan ini dapat membuat mereka kesulitan dalam berkomunikasi, memahami isyarat sosial, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. (Idaini, 2021)

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama difabel. Kurangnya kepercayaan dari pihak-pihak terkait untuk mempekerjakan difabel menjadi faktor utama. Hal ini mendorong difabel untuk berwirausaha demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, wirausaha juga memiliki risiko, seperti modal dan keterampilan yang harus dikuasai di tengah keterbatasan fisik. Meskipun di tingkat global kepedulian terhadap difabel mulai meningkat, hal ini belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Dibuktikan dengan masih banyaknya difabel yang mengalami diskriminasi dan stigma. Penetapan Hari Penyandang Cacat Sedunia pada tanggal 3 Desember belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum diketahui banyak orang.

Pandangan masyarakat terhadap difabel di Indonesia masih belum ideal. Difabel sering kali dipandang sebelah mata dan dikasihani. Hal ini membuat difabel merasa termarginalisasi dan dikucilkan. Keluarga yang memiliki anggota difabel pun tak jarang merasa malu dan menyembunyikan mereka. Hal ini disebabkan oleh "budaya aib" yang masih melekat di masyarakat Indonesia. Penampilan fisik difabel dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dan memalukan.

Difabel di Indonesia juga harus berhadapan dengan sistem yang kaku dan tidak ramah difabel. Sistem pembagian kerja dan interaksi sosial di masyarakat belum mengakomodasi kebutuhan difabel. Perusahaan pun masih enggan mempekerjakan difabel karena dianggap memiliki keterbatasan yang dapat menghambat kinerja. Kinerja difabel diragukan dan dianggap lambat sehingga tidak sesuai target. (Setyaningsih, 2016)

Perbincangan tentang kelompok difabel muncul karena jumlah mereka yang cukup signifikan. Memahami keberadaan mereka menjadi penting karena populasinya yang besar. Data dari WHO, Bank Dunia, dan ILO menunjukkan bahwa terdapat sekitar 15% difabel dari populasi dunia, atau setara dengan satu miliar orang. Di antara mereka, paling sedikit 785 juta difabel berada dalam usia kerja. Di Indonesia sendiri, data Pusdatin Kemensos tahun 2010 menunjukkan jumlah difabel mencapai 11.580.117.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar dan terus meningkat. Pada tahun 2012, BPS mencatat 6.008.661 orang dengan berbagai jenis disabilitas, seperti daksa, intelektual, runtu, wicara, netra, dan lainnya. Pada tahun 2015, BPS menemukan 21,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Tahun 2016, Sakernas menunjukkan 12,5% penduduk usia 15 tahun ke atas (sekitar 22,8 juta jiwa) memiliki disabilitas. 1,87% dikategorikan disabilitas berat, dan 10,29% sisanya ringan. Proporsi penyandang disabilitas perempuan lebih banyak (50,09%) dibandingkan laki-laki (49,01%). (Putri, 2020).

Pemenuhan hak-hak kaum difabel adalah bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat. Saat ini, masih banyak kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan mengabaikan hak-hak kaum difabel. Kaum difabel masih menjadi masyarakat kelas dua yang sering terdiskriminasi secara sosio-kultural dan politik. Alienasi dan subordinasi kaum

difabel masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan pemerintah yang belum menyentuh secara universal aspek-aspek difabilitas juga menjadi hambatan bagi kaum difabel untuk mencapai harapan dan cita-citanya. Kajian tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel haruslah memberikan solusi dan peta jalan untuk melepaskan mereka dari diskriminasi. (Fajar, 2019)

Masyarakat masih sering memiliki stigma bahwa kaum difabel tidak sanggup bekerja mandiri. Stigma ini tidak benar dan perlu diubah. Kaum difabel memiliki potensi dan kemampuan yang sama dengan nondifabel. Pemberdayaan difabel adalah solusi untuk membantu mereka mencapai potensi dan kemampuannya. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang menunjang dan mengembangkan keterampilan, baik secara psikologis maupun ekonomi. Pemberdayaan difabel bukan hanya tentang memberikan bantuan (*charity*), tetapi juga tentang memahami kebutuhan mereka. Hal ini includes menciptakan suasana iklim yang kondusif, memperluas potensi, dan melindungi mereka. (Yemima dkk, 2023)

Edi Soeharto (2014) menjelaskan bahwa pembangunan nasional Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan ini dilakukan secara terencana dan terarah dengan berbagai intervensi dan pelayanan sosial. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi sosial. Upaya pemberdayaan difabel di Indonesia saat ini tidak lepas dari pengaruh strategi pembangunan sosial kawasan ESCAP (Komisi Sosial Ekonomi bagi Kawasan Asia Pasifik) yang berpusat di Manila. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga masyarakat, khususnya partisipasi warga difabel di kawasan Asia Pasifik. Penetapan agenda aksi untuk difabel menandakan

komitmen pemerintah di kawasan Asia Pasifik untuk mewujudkan peran warga difabel dalam berbagai aspek kehidupan. (Aesah S, dkk. 2020).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memiliki kebijakan untuk melindungi dan melayani para penyandang difabel, implementasinya masih belum optimal. Diharapkan melalui Organisasi PERCATU (Persatuan Cacat Tubuh), kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan para difabel di Tulungagung dapat terwujud. PERCATU, sebuah organisasi resmi yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung sejak 22 April 2016. Dipimpin oleh Didik Prayitno Kulmanandi (ketua), Tien Budi Sunarsih (sekretaris), dan Komarudin (bendahara), PERCATU memiliki program jangka panjang dan pendek untuk mencapai tujuannya. (Al-Hilal, dkk. 2021)

Lusli (2010) menjelaskan stigmatisasi dari masyarakat menjadi masalah. Taman khusus difabel, misalnya, dapat memicu pelabelan seperti "taman itu hanya untuk difabel". Hal ini merupakan diskriminasi laten yang sering luput dalam pembangunan fasilitas publik. Konsep taman inklusif, meskipun bertujuan baik, dapat menjadi bumerang jika masyarakat melabelkan taman tersebut. Fasilitas publik lain yang tidak mempertimbangkan diskriminasi laten juga berpotensi menimbulkan konflik. Mewujudkan Kota Tanpa Diskriminasi tidak hanya dengan membangun taman inklusif, tapi juga menyediakan aturan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di semua fasilitas publik ruang terbuka. Hal ini bertujuan untuk memudahkan aktivitas dan interaksi mereka dengan warga non-difabel tanpa stigmatisasi. (Niko dkk, 2016)

Pembangunan paradigma di masyarakat adalah kunci untuk meminimalisasi diskriminasi dan pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas. Dengan paradigma baru, disabilitas tidak lagi dilihat sebagai kelompok yang harus

dikucilkan karena dianggap patologis dan defektologis. Perspektif medis tidak lagi menjadi fokus utama dalam pergaulan kemasyarakatan. Dalam sistem demokrasi, kelompok difabel, sebagai kelompok rentan, memiliki hak untuk menilai diri sendiri apakah mereka mampu berkompetisi dalam proses perebutan kekuasaan. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang menghambat proses demokrasi inklusif ini. (Fikri, 2016).

Komunitas Difabel Pinilih terbagi menjadi empat wilayah berdasarkan desa, salah satunya adalah desa Gumregah. Oleh karena itu, komunitas ini disebut sebagai Komunitas Difabel Pinilih Gumregah. Berdasarkan data tahun 2020, komunitas ini memiliki 140 anggota penyandang disabilitas, yang terdiri dari disabilitas fisik, mental, sensorik, dan ganda. Disabilitas mental merupakan kelompok terbesar dengan 40 anggota. Survei terbaru menunjukkan bahwa Komunitas Difabel Pinilih Gumregah memiliki beberapa permasalahan. Diharapkan permasalahan ini dapat diatasi dengan bantuan dan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Berdasarkan survei dan wawancara, diketahui bahwa teman-teman difabel di Pinilih Gumregah memiliki potensi untuk mengembangkan dan memberdayakan perekonomian di sana. Salah satu peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi difabel di Gumregah adalah ide bisnis kue kering. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, mayoritas penyandang difabel di sana adalah perempuan yang mampu diberdayakan untuk membuat kue kering dan momen Ramadhan dan Idul Fitri yang semakin dekat merupakan peluang besar untuk meningkatkan penjualan kue kering. Oleh karena itu, tim PkM Universitas Mercu Buana Yogyakarta bermaksud memberikan pendampingan pelatihan ekonomi kreatif di komunitas difabel Gumregah. Tujuannya agar komunitas tersebut dapat mandiri

dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan di masa depan. (Prahara, dkk. 2023).

Mahasiswa penyandang difabel sering kali mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak potensi dan semangat untuk belajar. Mahasiswa difabel menghadapi berbagai hambatan dalam perguruan tinggi, seperti adaptasi pendidikan, integrasi sosial, pendidikan inklusif, hubungan interpersonal, dan lingkungan yang tidak bersahabat. Empat model pendampingan efektif, yaitu kompetensi, konselor, motivator, dan psychological support, dengan penekanan pada komunikasi yang efektif, termasuk bahasa isyarat, dapat membantu mahasiswa difabel mencapai kesuksesan akademik. (Muallifah, dkk. 2022).

Penelitian kualitatif interdisipliner ini menemukan bahwa Khaidir Sangngaji, seorang ulama difabel, memiliki tempat istimewa di hati para santri dan masyarakat Luwu. Pengalaman dan kecacatannya memotivasi para santri untuk belajar giat dan mencapai kesuksesan seperti dirinya. Di masyarakat, Khaidir Sangngaji dihormati sebagai ulama dan bahkan dipertimbangkan sebagai pemuka agama yang berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Namun, pandangan ini berbeda dengan pandangan sebagian masyarakat ketika Khaidir mencari calon istri. Meskipun dia seorang ulama yang terhormat, pencapaiannya tidak menjamin keberhasilannya dalam berumah tangga. Sebagian masyarakat menganggap disabilitasnya sebagai hal yang sulit diterima. (Rismawidiati, 2022).

Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga dan para relawannya menjadi contoh nyata upaya inklusi dalam pendidikan tinggi, dan penelitian ini akan mengkaji peran

mereka dalam mendukung mahasiswa difabel. Pada tahun ajaran 2015/2016, PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki 53 mahasiswa difabel dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tuna grahita, dan cerebral palsy. Pendampingan yang dilakukan PLD UIN Sunan Kalijaga tidak dimaksudkan untuk memanjakan atau mengeksklusifkan mahasiswa difabel, tetapi untuk mengajarkan kemandirian dan membantu mereka lepas dari rasa ketergantungan. Pendampingan ini terbagi dalam beberapa kategori, sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. (Shofa, 2016).

Pak Sadikin menunjukkan keberanian luar biasa dalam mengejar mimpinya sebagai seniman. Keberaniannya terinspirasi oleh prinsip stoikisme, yang memungkinkannya menantang stigma terhadap penyandang difabel di dunia seni. Pak Sadikin berani memilih jalan sebagai pelukis meskipun ada keraguan dalam dirinya. Dia beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, menunjukkan tekadnya untuk mengambil risiko dan mencapai tujuannya. Kewuel (2010) mengamati bahwa meskipun hidup sering kali penuh dengan kesulitan dan penderitaan, kita masih dapat menemukan kekuatan dan potensi dalam diri kita sendiri. Hal ini membantu kita menghindari keputusan dan situasi ekstrem. Kegigihan Pak Sadikin dalam menghadapi rintangan mencerminkan cara seniman difabel mengatasi pengasingan yang mereka alami. (Aprilia, dkk. 2023).

Masyarakat masih memiliki anggapan keliru bahwa kaum difabel tidak mampu bekerja dengan baik. Stigma negatif ini perlu diubah melalui edukasi, salah satunya dengan karya dokumenter. Kisah inspiratif Nugroho, penyandang difabel daksa dengan semangat tinggi, dapat menjadi contoh untuk membangkitkan harapan dan semangat diri sendiri serta orang lain. Pria berusia 44 tahun ini membuktikan bahwa difabel

memiliki harapan, cita-cita, dan kesempatan yang sama dalam berkarir dan bermasyarakat. Keterlibatannya dalam pemerintahan Desa Sidorejo menjadi bukti nyata dan inspiratif bagi warga desa, khususnya difabel. (Livya, dkk. 2023).

Sociopreneurship merupakan pilihan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan sosial untuk membantu sesama. Hal ini dapat dilakukan dengan memberdayakan kaum difabel sebagai pengrajin industri kreatif. Pelatihan dan workshop diberikan kepada para difabel untuk memproduksi berbagai produk kreatif dengan bahan dasar kulit dan non-kulit. Bersama brand Sagata, produk-produk kreatif ini dipasarkan ke pasar nasional dan internasional. Dampak positif dari sociopreneurship ini adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para pengrajin difabel. (Syahril, dkk. 2023).

Pengabdian kepada masyarakat menggunakan strategi pemberdayaan difabel yang terbukti efektif berdasarkan penelitian terdahulu. Dengan strategi ini, diharapkan difabel dapat mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk membantu difabel berkembang. Dengan dukungan ini, difabel dapat memahami diri mereka sendiri dan memaksimalkan kemampuannya. Kinerja difabel dalam mempersiapkan usaha tata rias salon menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang tata rias dan tata busana. Dukungan untuk mengembangkan keterampilan ini sangat disambut baik oleh mitra difabel. Sebagai langkah selanjutnya, akan diadakan Program Kemitraan Masyarakat bagi Difabel. Program ini bertujuan untuk memperdalam keterampilan tata rias dan tata busana para difabel. (Nurhayati, dkk. 2019).

Penelitian terhadap karyawan difabel di Alfamidi menemukan dua hasil yaitu, dukungan lingkungan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi pengembangan

diri. Karyawan difabel yang merasa didukung oleh lingkungannya lebih percaya diri dan ingin mengembangkan diri mereka. Dan kurangnya kepercayaan diri dan hambatan pengembangan diri. Di sisi lain, ada karyawan difabel yang masih merasa kurang percaya diri dan sulit berkembang meskipun mendapat dukungan dari lingkungan. Motivasi dan komunikasi interpersonal (Patriana, 2014) diperlukan untuk mendalami perasaan karyawan difabel yang merasa tidak berguna. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan mendorong pengembangan diri mereka di masa depan. (Lukas, dkk. 2021).

Di Kecamatan Sedayu, terdapat 5 kelompok difabel yang bergerak di bidang jasa, kerajinan, olahan pangan, ankringan, dan jahe merah. Kegiatan ini melibatkan 2 tim pengabdian lain yang berfokus pada peningkatan kemandirian komunitas difabel. Acara dimulai dengan sosialisasi penguatan organisasi dan administrasi untuk komunitas yang baru terbentuk. Dr. Ir. Indardi, M.Si dan apt. Ingenida Hadning, M.Sc, pakar di bidang organisasi dan SDM, menjadi narasumber.

Selanjutnya, fokus beralih ke bidang pangan dengan pelatihan pengolahan pangan halal dan higienis oleh Dr. apt. Hari Widada, M.Sc, Farmasis di bidang kimia dari Halalan Thoyiban Center (HTC UMY). Pelatihan dilanjutkan dengan pengurusan izin PIRT, digital marketing, dan public speaking oleh tim pengabdian lain. Tujuannya agar peserta mendapatkan pengetahuan komprehensif untuk pemberdayaan komunitas difabel. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pengabdian. (Indardi, 2022).

Penelitian ini membahas tentang wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta, yaitu Difa City Tour dan Transport (DCTT), sebuah industri transportasi ojek yang didirikan oleh para penyandang disabilitas. Kehadiran DCTT menimbulkan pertanyaan dan keraguan dari masyarakat

umum. Banyak yang tidak percaya bahwa penyandang disabilitas mampu menjadi pengemudi ojek. Pandangan negatif dan rasa tidak percaya ini datang dari masyarakat umum dan bahkan dari kalangan pemerintah. DCTT hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. DCTT juga merupakan simbol perjuangan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat umum. (Fibrianto, dkk. 2019).

Program ini merupakan bagian dari Program Kampung Batik Betawi (Babe) yang diinisiasi oleh PT PJB UP Muara Tawar. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha konveksi dengan mengintegrasikannya dengan Batik Betawi melalui pelatihan menjahit. Pembinaan dilakukan langsung oleh Anggrek Karya Cacat Berkreas (KCB), sebuah organisasi yang mewadahi masyarakat dengan keterbatasan fisik agar dapat produktif. Untuk memastikan keberlanjutan program, CSR PT PJB UP Muara Tawar bersama Kelompok Anggrek Karya Cacat Berkreasi (KCB) berusaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kelompok, seperti kain dan alat jahit, dari lingkup sekitar. Pembentukan safety net oleh PT PJB UP Muara Tawar merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan anggota kelompok. Hal ini menunjukkan komitmen PT PJB UP Muara Tawar terhadap karyawannya. (Suwandi, dkk. 2022).

Stereotip dan stigma terhadap kaum difabel masih menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan dan inklusi. Stereotip dan stigma ini seringkali keliru dan tidak didasarkan pada fakta. Hal ini menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum difabel di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas. Melawan stereotip dan stigma membutuhkan upaya bersama

dari berbagai pihak, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat, pemerintah dan media.

Beberapa cara untuk melawan stereotip dan stigma, menyebarkan informasi yang benar tentang difabel yaitu memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan dan potensi penyandang disabilitas dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Mempromosikan inklusi yaitu, emberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan dapat membantu mereka mencapai kesuksesan dan menunjukkan kemampuan mereka. Dan memerangi diskriminasi yaitu, elaporkan dan menentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif

Stigma dan Cacat Berpikir Terhadap Kelompok Difabel

Stigma dan kecacatan berpikir terhadap kelompok difabel adalah sebuah masalah yang penting yang perlu dihadapi. Disabilitas atau difabel adalah sebuah kategori yang biasanya disebut sebagai "orang yang tidak normal" atau "orang cacat". Tetapi, kata "cacat" atau "tidak normal" adalah percakapan yang tidak seimbang dan tidak berkesadaran, yang mungkin membuat orang difabel merasa kecil hati atau bahkan terpaksa berada di luar sosial. Masyarakat patriarki dan kontek yang tertentu, seperti kata-kata disabilitas yang kemudian menjadi difabel, merupakan perubahan dari kata-kata cacat atau tidak normal. Stigma terhadap disabilitas dan difabel biasanya berasal dari kenyataan bahwa orang difabel mempunyai cela, aib, atau membawa beban, atau membawa sial.

Stigma dan kecacatan berpikir terhadap kelompok difabel adalah sebuah masalah yang penting yang perlu dihadapi. Stigma adalah atribut yang mengganggu identitas individu dan memperhalangi partisipasi penuh mereka dalam

masyarakat (Mutasim, 2016). Kecacatan berpikir terhadap difabel dapat mempengaruhi kelompok difabel dalam beberapa cara:

Pendidikan: Stigma dan kecacatan berpikir dapat mempengaruhi pendidikan difabel. Masyarakat yang memiliki stigma terhadap difabel dapat membuat difabel lebih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Stigma dan kecacatan berpikir dapat menyebabkan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan difabel, atau membuat difabel lebih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai

Kesehatan: Stigma dan kecacatan berpikir dapat mempengaruhi kesehatan difabel. Penyandang disabilitas yang menginternalisasi stigma publik sebagai stigma diri cenderung memiliki prognosis kesehatan yang lebih buruk.

Kerja: Stigma dan kecacatan berpikir dapat mempengaruhi kerja difabel. Masyarakat yang memiliki stigma terhadap difabel dapat membuat difabel lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka

Sosial: Stigma dan kecacatan berpikir dapat mempengaruhi sosial difabel. Masyarakat yang memiliki stigma terhadap difabel dapat membuat difabel lebih sulit untuk membentuk relasi dan interaksi yang baik dengan orang lain

Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Guru Tunanetra Bima Kurniawan menyebut bahwa kecacatan berpikir yang diterapkan terhadap difabel dapat memicu stigmatisasi negatif terhadap kelompok difabel. Kecacatan berpikir terhadap difabel dapat menyebabkan diskriminasi, pengucilan, peniadaan, pelecehan, atau perlakuan tidak adil yang bersumber dari pandangan sempit dan tidak tepat tentang kemampuan dan kontribusi mereka dalam masyarakat (Yusainy, 2016).

Untuk mengatasi stigma dan kecacatan berpikir terhadap kelompok difabel, perlu dilakukan pendidikan yang ramah terhadap disabilitas, kesetaraan gender, dan pemikiran positif terhadap kelompok difabel. Hal ini akan membantu mendorong perubahan pada masyarakat dan membangun kesadaran yang lebih baik terhadap kelompok difabel.

Kecacatan berpikir (cognitive bias) merupakan hambatan mental yang dapat memengaruhi cara seseorang memandang dan berperilaku terhadap kelompok difabel. Stigma dan diskriminasi terhadap difabel sering kali berakar pada kecacatan berpikir ini. Berikut beberapa contoh kecacatan berpikir yang umum ditemukan dalam konteks difabelitas:

1. Stereotipe dan Prasangka:
 - a. Meyakini bahwa difabel tidak mampu, lemah, atau tidak berdaya.
 - b. Menganggap difabel tidak bisa mandiri dan selalu membutuhkan bantuan.
 - c. Memandang difabel sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat.
2. Generalisasi Berlebihan:
 - a. Menganggap semua difabel sama, tanpa memperhitungkan keragaman individu.
 - b. Menyamaratakan kemampuan dan potensi difabel tanpa melihat perbedaan jenis dan tingkat difabilitas.
 - c. Menggeneralisasi pengalaman hidup difabel berdasarkan stereotip yang ada.
3. Atribusi Internal:
 - a. Menganggap bahwa difabel bertanggung jawab atas kondisinya.
 - b. Meyakini bahwa difabel adalah hasil dari karma atau dosa.
 - c. Melihat difabel sebagai hukuman dari Tuhan.

4. Penyangkalan:
 - a. Mengabaikan atau meremehkan kebutuhan dan hak difabel.
 - b. Menolak untuk mengakui adanya diskriminasi terhadap difabel.
 - c. Menganggap bahwa difabel tidak perlu diperlakukan secara khusus.

Dari berbagai kontes diatas dalam kecacatan berpikir dapat memiliki perubahan negatif yang signifikan terhadap kehidupan difabel, seperti:

1. Stigma dan Diskriminasi: Difabel dapat mengalami pengucilan, pelecehan, dan penolakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
2. Rendahnya Kepercayaan Diri: Difabel dapat merasa rendah diri dan tidak berharga karena stigma dan diskriminasi yang mereka alami.
3. Terbatasnya Aksesibilitas: Difabel dapat terhambat dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik karena prasarana dan kebijakan yang tidak ramah difabel (Keumala, 2016).

Berbagai peristiwa yang telah dialami kelompok difabel dikarenakan masyarakat yang masih berpikir sempit terhadapnya maka dari itu perlu dilakukan upaya edukasi dan sensitisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang difabelitas dan melawan stigma dan diskriminasi. Berikut beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan:

1. Pendidikan dan Kampanye: Memberikan informasi yang akurat tentang difabelitas kepada masyarakat melalui berbagai media.
2. Pelatihan Sensitivitas Difabel: Memberikan pelatihan kepada berbagai pihak, seperti tenaga pendidik, pemberi

layanan publik, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap difabel.

3. Membuat Kebijakan yang Ramah Difabel: Mendorong pemerintah dan organisasi untuk membuat kebijakan dan program yang mendukung difabel.

Dengan mengatasi kecacatan berpikir, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah difabel, di mana difabel dapat hidup dan berkembang dengan penuh potensi.

Dampak Stigma Sosial terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Adapun dampak dari stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus seperti yang dikemukakan oleh (Wibowo & Nurlaila, 2016) yaitu:

1. Stigma sosial dapat menyebabkan isolasi dan perlakuan tidak adil terhadap anak berkebutuhan khusus, yang dapat mengganggu perkembangan dan kesejahteraan mereka. Stigma sosial dapat membuat anak berkebutuhan khusus merasa terisolasi dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Hal ini dapat mengganggu perkembangan mereka secara keseluruhan.
2. Anak berkebutuhan khusus juga dapat mengalami rendahnya harga diri dan kepercayaan diri akibat stigma sosial. Stigma sosial dapat membuat anak berkebutuhan khusus merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri dikarenakan anak-anak ini tidak dihargai dan meragukan kemampuannya sendiri.
3. Stigma sosial juga berdampak pada gangguan emosional dan kesehatan mental anak berkebutuhan

- husus. Stigma sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental anak berkebutuhan khusus. Seperti stres, kecemasan, depresi, atau gangguan emosional lainnya akibat perlakuan dan pandangan negatif dari masyarakat.
4. Dalam hal pendidikan, stigma sosial dapat menghambat anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan yang setara, membatasi akses, serta kesempatan yang sama dengan anak-anak lain dan merendahkan partisipasi dan pencapaian akademik. Stigma sosial dapat menghambat anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman sebayanya.
 5. Dalam kehidupan sosial, stigma sosial dapat menyulitkan anak berkebutuhan khusus dalam membentuk hubungan persahabatan, membuat mereka merasa ditolak dan terpinggirkan, serta meningkatkan risiko terjadinya masalah kesejahteraan mental. Stigma sosial dapat menyulitkan anak berkebutuhan khusus dalam membentuk hubungan persahabatan dan interaksi sosial yang positif.

Mengatasi Stigma Sosial terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Untuk mengatasi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, beberapa langkah yang dapat diambil menurut Simorangkir, dkk (2023) yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan masyarakat umum. Diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Pelatihan juga perlu diberikan kepada tenaga pendidik

- dan masyarakat umum untuk memahami kebutuhan dan potensi anak berkebutuhan khusus.
2. Mendorong inklusi dan partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan individual dan program serta kegiatan yang melibatkan mereka. Poin ini menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan individual anak berkebutuhan khusus. Hal ini melibatkan penyediaan program dan kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.
 3. Membangun lingkungan yang ramah dan mendukung dengan menciptakan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak anak berkebutuhan khusus serta memastikan aksesibilitas fisik dan sosial bagi mereka. Poin ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak mereka serta memastikan aksesibilitas fisik dan sosial yang memadai.
 4. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kampanye anti-stigma dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga. Poin ini menekankan pentingnya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye anti-stigma dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga.

Stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan masalah serius yang masih ada dalam masyarakat. Stigma ini dapat menghambat perkembangan dan partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengatasi stigma ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk mengatasi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga. Pentingnya pendidikan inklusif yang memperhatikan kebutuhan individual anak berkebutuhan khusus tidak dapat diabaikan. Selain itu, pembangunan lingkungan yang ramah dan aksesibilitas fisik dan sosial yang memadai juga harus diperhatikan agar anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus dan penghapusan stigma sosial juga merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Kampanye anti-stigma dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus dapat berkurang dan mereka dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB 6

MAKNA STIGMA SOSIAL TERHADAP DISABILITAS

Penyandang disabilitas sering kali diindentikkan dengan ketidakberuntungan dalam kehidupan dikarenakan kesulitan mendapatkan keadilan dan hak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial serta hambatan dalam akses infrastruktur dan bangunan, menyebabkan mereka sering kali terpinggirkan dan menjadi kaum minoritas yang diabaikan oleh pemerintah. padahal, kelompok disabel ini juga memiliki hak dan kewajiban yang harus setara dengan warga negara lainnya.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.086.661 orang, Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas Tuna netra, 472.855 orang penyandang disabilitas runguwicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan mengurus diri sendiri. Jumlah disabilitas di Indonesia yang banyak maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung prinsip kesetaraan hak bagi mereka, yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini harus didukung dengan fasilitas khusus yang memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak yang setara dengan seluruh masyarakat.

Goffman (Allo, 2022) menyatakan individu yang mengalami disabilitas di anggap sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Masyarakat serta pemerintah sering kali memandang mereka sebagai individu yang tidak dapat melakukan banyak hal tanpa

menimbulkan masalah. karena keterbatasan yang mereka miliki mendapatkan perlakuan buruk yang seringkali mereka terima, mereka bahkan berusaha tidak bergantung pada orang lain dan mempertahankan kemandirian mereka. padahal di sisi lain mereka sama kedudukannya dengan masyarakat lainnya, dan harusnya mendapatkan perlakuan yang spesial karena mereka termaksud kelompok yang rentang, hal ini terjadi untuk memberikan perlindungan HAM mereka dari ancaman orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) memuat mengenai tanggung jawab utama pada pemerintah ialah untuk melakukan perlindungan, penghormatan, penegakan hukum bagi hak asasi manusia. Hak tersebut mencakup segala aspek dalam kehidupan masyarakat serta bersifat menyeluruh bagi masyarakat itu sendiri. salah satunya yaitu memberikan hak berupa perlindungan bagi penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Menurut konstitusi, individu dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk mencapai kesejahteraan melalui akses terhadap pekerjaan dan kesempatan bekerja. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diatur secara khusus dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hak untuk bekerja, menerima imbalan yang adil, dan diperlakukan dengan layak dalam hubungan kerja (Latuconsina, 2014).

Kecacatan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi individu yang mengalami disabilitas untuk memperoleh hak atas kehidupan dan hak untuk mempertahankan hidupnya. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya”. Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang

paling fundamental bagi semua individu. Hak untuk hidup dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Tanpa hak tersebut, hak-hak asasi lainnya tidak memiliki makna (Dewi, 2015).

Peraturan yang mengatur mengenai kesetaraan hak terhadap penyandang disabilitas yaitu stigma atau pandang mengenai kaum difabel tidak bisa di abaikan oleh masyarakat. stigma yang muncul ialah stigma kemampuan. Penyandang disabilitas tidak di pungkiri merasakan stigma tersebut diskriminasi yang berkembang di tengah tengah masyarakat luas dan yang paling di sayangkan, stigma diskriminasi ini terjadi tanpa di sadari oleh masyarakat dan akhirnya menjadi hal yang normal bahkan dalam struktur negara. dampaknya penyandang disabilitas semakin tersisihkan dan di abaikan. Kenyataannya situasi tersebut terjadi pada sektor pekerjaan yang seharusnya menjadi hak bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali. Namun, hal tersebut tidak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan maupun infrastruktur yang sama layaknya bagi masyarakat normal lainnya. karena masyarakat dan terutama pemerintah masih memperlakukan disabilitas sebagai kelompok yang khusus dan di berikan perlakuan yang berbeda dalam segi pekerjaan dengan pertimbangan layak maupun tidak layak untuk posisi tertentu sesuai kualifikasi pekerjaan. Dengan kata lain stigma ableisme ini menunjukan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di anggap tidak setara dan berbeda dari dengan orang normal lainnya (Warjiyati,& Sukamto, 2023).

Juliet Rothman (Hidayatullah dan Pranowo, 2018) mengemukakan bahwa masyarakat serta pemerintah sering kali menempatkan stigma pada individu yang mengalami disabilitas bahkan pada tatanan sosial yang tidak adanya dukungan terhadap kelompok mereka. Seperti halnya warga

negara pada umumnya, penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ini tidak hanya berkaitan dengan rehabilitasi sosial atau bantuan sosial saja, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan yang menyangkut hak mereka. Perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ini menunjukkan bahwa "Masalah disabilitas masih dianggap sebagai masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Perhatian terhadap penyandang disabilitas masih harus ditingkatkan, terutama dalam hal aksesibilitas layanan di berbagai fasilitas dasar dan dalam mengatasi diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung."

Pemahaman negatif terhadap manusia dengan disabilitas dan pribadi tanpa disabilitas dipengaruhi oleh pengaruh normalisme. Normalisme menciptakan konsep keindahan yang semu, yang mempengaruhi persepsi terhadap pribadi dengan disabilitas mental, di mana mereka dianggap "tidak mampu" untuk mencapai standar "normal" dalam keindahan. Tekanan untuk menjadi normal membuat penyandang disabilitas tidak bisa menikmati hidup sepenuhnya, karena mereka mengalami gangguan tertentu yang mempengaruhi kebebasan dan penerimaan mereka oleh masyarakat. Isu nilai kemanusiaan ini memicu stigma ableisme, dimana masyarakat memiliki prasangka dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental. Hal ini tercermin dalam pola pikir "ableism" yang menganggap orang dengan disabilitas memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas (Arjuna, 2022).

Ableisme yang dilakukan seperti tindakan-tindakan dengan sengaja untuk mengejek, menghindari, mempermalukan, bahkan merugikan penyandang disabilitas,

meskipun ada juga yang tidak menyadari dan tidak sengaja melakukannya. Penyandang disabilitas sering dianggap tidak kompeten, yang pada akhirnya menyebabkan non-disabilitas merasa simpati dan kasihan terhadap mereka. Meskipun simpati ini dapat mendorong interaksi dengan penyandang disabilitas, pandangan tentang ketidak kompetenan juga bisa mengarah pada perilaku-perilaku yang membuat tidak nyaman, seperti berbicara dengan mereka seperti anak kecil atau menawarkan bantuan yang tidak diminta. Di sisi lain, penyandang disabilitas sering dianggap lebih penyayang, ramah, dan hangat daripada non-disabilitas. Namun, ketika mereka tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, mereka sering kali dihubungkan dengan sikap negatif. Hal ini menciptakan ekspektasi yang tidak adil dan juga memengaruhi cara non-disabilitas berinteraksi dengan mereka (Aliffah & Hamdan, 2024).

Di Indonesia, penyandang disabilitas diperlakukan sama seperti warga negara lain. Hal ini diatur dalam UU RI 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Sesuai ketentuan undang-undang ini, penyandang disabilitas juga diperbolehkan menggunakan potensinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat. Artinya, penyandang disabilitas tetap bisa mengikuti segala kegiatan yang ditawarkan negara atau masyarakat. Selain itu, penyandang disabilitas juga harus dapat mengakses layanan publik yang dirancang khusus untuk membantu mereka bepergian.

Menurut Undang-Undang Persamaan Hak untuk Penyandang Disabilitas. Stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan permasalahan yang tidak bisa diabaikan oleh masyarakat. Sinisme terhadap kekuasaan adalah salah satu sinisme tersebut. Penyandang disabilitas dapat menderita akibat stigma ability list (prasangka, prasangka dan diskriminasi) yang melekat di masyarakat. Pasalnya, stigma

tersebut cenderung dilakukan secara tidak sadar oleh masyarakat umum, praktik yang dianggap lumrah bahkan sudah tertanam dalam tatanan negara. Akibatnya, penyandang disabilitas merasa lebih berbeda dan terisolasi.

Hal ini wajar terjadi di tempat kerja di mana setiap orang mempunyai hak untuk bekerja. Sayangnya, hal ini mengabaikan fakta bahwa masyarakat awam lainnya mengecualikan penyandang disabilitas dari pekerjaan nyata. Hal ini didasarkan pada psikologi kompetensi berdasarkan kelas sosial. Artinya, ketika mereka menempatkan penyandang disabilitas pada pekerjaan yang berkualitas, masyarakat dan pemerintah mengklasifikasikan penyandang disabilitas sebagai orang istimewa yang haknya harus dipisahkan dari pekerjaannya, meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan pekerjaan. Artinya, diskriminasi disabilitas mengasumsikan bahwa aktivitas penyandang disabilitas adalah setara dan berbeda atau berbeda dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Dalam konteks ini, penyandang disabilitas mempunyai peran penting sebagai bagian integral dari masyarakat, karena mereka mempunyai hak atas kesempatan kerja yang setara. Dalam masyarakat inklusif, hak atas pekerjaan yang layak merupakan hak yang setara bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas fisik dan mental. Namun, pada kenyataannya kita masih menghadapi tantangan nyata di banyak negara dimana diskriminasi disabilitas (diskriminasi terhadap penyandang disabilitas) menjadi hambatan serius bagi banyak penyandang disabilitas. Stigma ini berdampak pada upaya mereka mencari pekerjaan yang sesuai keterampilan dan kemampuannya.

Pemerintah mempunyai peran besar dalam memerangi stigma disabilitas dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dengan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah

yang tepat, pemerintah dapat mendorong prinsip kesetaraan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Melalui upaya tersebut, pemerintah dapat merangsang perubahan persepsi masyarakat terhadap kemampuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas.

Stigma sosial adalah proses keterasingan sosial dari masyarakat dimana seseorang dikucilkan, dikucilkan, atau ditolak dari suatu identitas sosial. Stigma sosial menciptakan label terhadap seseorang yang dianggap berbeda dari dirinya. Perhitungannya menghasilkan skor negatif atau negatif. Karena akar dari takhayul adalah ekspresi perbedaan fisik, watak atau ras. Demikian pula penyandang disabilitas seringkali dirugikan karena masyarakat memandang kemampuannya terbatas, hal ini terlihat jika dibandingkan dengan hambatan moral atau ras yang dihadapi seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut, solusi yang diharapkan dari pemerintah adalah dengan dibuatnya dokumen hukum yang dapat memberikan hak yang memadai kepada seniman. Pemerintah juga mempunyai hak untuk memperkuat sistem hukum yang melindungi hak-hak mereka di tempat kerja. Hal ini termasuk melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas hukum, dan mengkriminalisasi pelanggaran hukum yang melindungi hak-hak tersebut oleh perusahaan. Pemerintah fokus pada pengembangan keterampilan dan perjuangan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak, sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan peluang kerja yang layak bagi setiap individu, apapun penampilan fisiknya. atau keterbatasan psikologis.

Stigma Sosial

Stigma diartikan sebagai sifat negatif yang terdapat pada diri seseorang yang disebabkan oleh pengaruh

lingkungan. Menurut Sced dan Brown (Nisa, 2018) dalam majalah tersebut, stigma adalah fenomena yang terjadi ketika label atau stereotip diberikan pada seseorang dan diskriminasi.

Stigma ini bukan tanpa alasan, melainkan karena ada hal lain dalam diri orang tersebut yang dianggap tidak pantas. Sedangkan seperti yang diungkapkan Goffman dalam majalah tersebut (Dhairyya dan Herawati 2019), stigma adalah segala bentuk ciri fisik dan sosial yang melekat pada tubuh seseorang, sehingga menurunkan identitas sosial seseorang dan menolak orang tersebut.

Ada dua tipe orang yang kasihan pada orang dan menolong orang yang menyakiti orang. Tipe pertama adalah orang-orang yang mempunyai antagonisme sosial yang sama, sehingga bisa memberikan nasehat atau bantuan karena pernah mengalami hal serupa. Tipe kedua adalah orang yang dekat dengan orang yang bosan karena keadaan tertentu. Goffman memberi istilah “intelektual” pada tipe orang kedua.

Sebelum seseorang menjadi "bijaksana", ia harus menunggu untuk menerima siklus tersebut. Lebih lanjut, Goffman membagi orang-orang yang termasuk dalam istilah “ahli” menjadi dua kategori, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan orang-orang yang bosan dalam pekerjaannya, seperti polisi,; terapis, dan orang-orang yang terhubung dengan individu di komunitas. mereka yang bosan, seperti keluarga, teman, dan lain-lain.

Stigma Ableisme

Stigma ableisme telah menjadi akar dan termanifestasi dalam praktik diskriminasi yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas masih sering dipersepsikan sebagai individu yang berbeda dan tidak berdaya di tempat kerja, bahkan sering dianggap lebih lemah daripada individu normal yang tidak memiliki keterbatasan fisik, mental, atau

sensorik, hal ini tercermin dari stigma terhadap penyandang disabilitas. Stigma ableisme mampu melebihi orang normal dan menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas. Terlihat bahwa banyak tempat kerja masih memprioritaskan kualifikasi yang hanya berlaku untuk individu normal, tanpa memperhitungkan hak yang sama bagi penyandang disabilitas.

Stigma ableisme menciptakan penderitaan yang signifikan bagi individu dengan disabilitas. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan, mengejar pendidikan, atau memperoleh akses yang sama ke ruang publik. Lebih lanjut, stigma ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka, serta menghambat integrasi dan perasaan keterlibatan dalam masyarakat. Beberapa faktor yang berperan dalam stigma terhadap kemampuan meliputi kurangnya pemahaman tentang disabilitas, kurangnya pengetahuan akan potensi individu dengan disabilitas, dan keyakinan bahwa nilai atau kesuksesan ditentukan oleh kesesuaian dengan norma fisik atau mental. Untuk mengatasi stigma terkait kemampuan, diperlukan peningkatan pendidikan tentang disabilitas, bersama dengan upaya untuk menghilangkan bias yang merugikan dan memperkuat sikap inklusif dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan, salah satu hambatan utama yang menghalangi akses individu dengan disabilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, hak sipil, dan interaksi sosial adalah pandangan stigmatisasi dan keyakinan yang berkaitan dengan disabilitas (Warjiyati & Sukamto, 2023).

Penyandang disabilitas sering dipandang negatif karena mereka ada di masyarakat. Warna kulit, kondisi fisik, kondisi mental, jenis kelamin, bahasa, pendapatan, dan lainnya adalah beberapa contoh diskriminasi. Terry menjelaskan ableisme sebagai keyakinan yang mendorong perlakuan tidak adil

terhadap orang lain berdasarkan penampilan fisik, mental, atau perilaku mereka. Misalnya, tindakan yang dilakukan percaya bahwa penyandang disabilitas tidak beruntung karena keberuntungan dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Beberapa kelompok konservatif bahkan berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah bagian dari kehendak Tuhan, sehingga manusia seharusnya hanya menerima dengan pasrah kondisi tersebut. Orang-orang dengan disabilitas sering kali disebut sebagai orang yang kurang beruntung. Namun, disabilitas seharusnya dipahami sebagai keterbatasan sosial, penyandang disabilitas telah lama berjuang untuk diperlakukan secara adil dan diakui sebagai bagian yang merdeka dari masyarakat. Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai masalah yang perlu diselesaikan, bukan sebagai individu yang memiliki hak-haknya sendiri. Kedua, mereka sering kali tidak dihormati sebagai individu dengan hak-hak yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, perjuangan ini bertujuan untuk menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa keberagaman adalah hal yang alami dan setiap individu memiliki cerita hidup yang unik. Dengan demikian, perjuangan ini bertujuan untuk melawan semua bentuk stigma ableisme terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memandang rendah terhadap mereka Edan (Sitorus, 2023).

Stigma ableisme adalah sikap negatif, prasangka, dan perlakuan diskriminatif terhadap individu dengan disabilitas. Ini mencerminkan pandangan budaya yang merendahkan dan menganggap rendah individu dengan disabilitas, serta memperlakukan mereka sebagai inferior atau tidak mampu. Akibatnya, individu dengan disabilitas mungkin mengalami keterbatasan dalam akses terhadap kesempatan, kebebasan, dan aktivitas sosial yang mereka butuhkan karena adanya

diskriminasi yang didasarkan pada stigma ableisme (Warjiyati & Sukamto, 2023).

Penyandang disabilitas di Indonesia Berdasarkan status sosial-ekonomi, sebanyak 43% penyandang disabilitas berada di kelompok ekonomi 40% terbawah, yang separuh di antaranya adalah penyandang disabilitas berat. Rata-rata usia sekolah penyandang disabilitas hanya 5 tahun dan banyak penyandang disabilitas yang tidak tamat SD (BPS, 2020), sehingga menurunkan daya tawar mereka di pasar kerja. Penyandang disabilitas kelompok usia produktif juga menghadapi tantangan baru dengan adanya perubahan struktur pasar kerja di era revolusi industri 4.0 yang menuntut pengurangan jumlah pegawai di sektor padat karya (Rosalina & Setyowati, 2024).

Perlindungan HAM bagi individu dengan disabilitas dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Konstitusi Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama di hadapan hukum menurut Konstitusi 1945. Prinsip ini dikenal sebagai persamaan di depan hukum, yang menjamin bahwa individu dengan disabilitas berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan tambahan sesuai dengan hukum (Warjiyati & Sukamto, 2023).

Pasal 27 ayat (2) Konstitusi Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta hak untuk diperlakukan secara adil di tempat kerja. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapatkan pekerjaan yang pantas merupakan hak yang dijamin bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal ini juga

menegaskan bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sarana penghidupan, tanpa diskriminasi sosial. Oleh karena itu, individu dengan disabilitas harus diperlakukan secara adil dan setara dalam masyarakat dan di tempat kerja (Warjiyati & Sukamto, 2023).

Hak-hak pekerja dengan disabilitas dijelaskan secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur hak-hak terkait pekerjaan, termasuk hak: 1) Untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi, baik pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta. 2) Untuk menerima upah yang setara dengan pekerja yang tidak memiliki disabilitas, untuk pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. 3) Untuk mendapatkan akomodasi yang sesuai dalam lingkungan kerja. 4) Untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan karena alasan disabilitas. 5) Untuk mengikuti program kembali bekerja. 6) Untuk penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat. 7) Untuk memiliki kesempatan dalam meningkatkan karier serta segala hak normatif yang terkait. 8) Untuk mengembangkan usaha sendiri, menjadi wiraswasta, membentuk koperasi, atau memulai usaha sendiri (Rosalina & Setyowati, 2024).

Adopsi kebijakan terkait penerimaan individu dengan disabilitas di tempat kerja tentu memberikan dorongan dan peluang bagi mereka untuk mengembangkan kemandirian, kapasitas, dan mengaktifkan kembali peran sosial mereka. Namun, kenyataannya, tidak semua perusahaan di Indonesia menerapkan kebijakan tersebut. Banyak perusahaan yang enggan merekrut individu dengan disabilitas karena kurangnya pemahaman tentang cara menilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Selain itu, kurangnya fasilitas yang mendukung kinerja individu dengan

disabilitas juga menjadi kendala dalam penerimaan mereka di perusahaan, karena dianggap kurang efisien (Rosalina & Setyowati, 2024).

Dari sisi pemerintah, belum ada langkah strategis yang diambil untuk mengatasi masalah ini sehingga penerapan kebijakan masih jauh dari optimal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menerima individu dengan disabilitas, namun belum ada perhatian yang cukup terhadap perlakuan terhadap individu tersebut setelah mereka diterima bekerja. Hanya sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang merekrut individu dengan disabilitas karena kesadaran akan pentingnya memberikan akses yang sama dalam lapangan kerja bagi mereka agar tidak terpinggirkan, sementara sebagian besar merekrut individu dengan disabilitas karena faktor praktis seperti kekurangan tenaga kerja (Rosalina & Setyowati, 2024).

Sistem pegawai sipil (PNS) disabilitas juga menghadapi tantangan. meskipun dalam persyaratan pada saat mengikuti seleksi tidak secara spesifik mengatur mengenai persyaratan kesehatan (fisik maupun mental), pada kandidat yang lolos harus menyampaikan surat keterangan dokter yang menegaskan mengenai mereka dalam keadaan sehat jasmani serta rohani Suwanto (). Dampaknya pada penyandang disabilitas akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bekerja pada bidang birokrasi pemerintahan. selain itu, sudah ada kasus yang memperlihatkan bahwa UUD No. tahun 1997 yang berkaitan dengan disabilitas telah menyebabkan dampak negatif terutama hak dan keadilan sosial (Martoyo dkk, 2023)

Dari segi penegakan hukum, individu dengan disabilitas memiliki hak yang sama terhadap proses peradilan yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal ini menegaskan pentingnya jaminan prosedural untuk

memastikan jalannya proses peradilan yang adil dan transparan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan bagi individu dengan disabilitas meliputi perlunya layanan peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, yang mencakup aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural. pemerintah masih belum berhasil menetapkan aturan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan prosedural dan adaptasi usia bagi individu dengan disabilitas. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi individu dengan disabilitas yang berperan aktif (Priamsari, 2019).

Kebijakan pemerintah dalam menegakkan hak penyandang disabilitas salah satunya yaitu menjalankan peran pemerintah dalam fungsi pemberdayaan, yaitu melakukan program program dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat terutama pada penyandang disabilitas, sehingga mampu dalam pemenuhan kouta 1% yang disediakan oleh pemerintah di sektor lapangan pekerjaan (Marsitadewi & Widnyani, 2021).

Pelayanan publik merujuk pada kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dengan meningkatkan aksesibilitas baik secara fisik maupun non-fisik. Walaupun sudah ada Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2016, untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum, institusi pemerintah, dan kantor

pemerintah, namun implementasinya masih terbatas (Hadi, 2019).

Pada sektor Pendidikan, pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi individu dengan disabilitas di semua jalur, jenis, dan tingkat pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui model pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, termasuk dengan cara: mengintegrasikan anak-anak penyandang disabilitas ke dalam program wajib belajar selama 12 tahun; memberikan prioritas kepada anak-anak penyandang disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka; menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang tidak mengikuti pendidikan formal untuk memperoleh sertifikat pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan; memberikan beasiswa kepada siswa penyandang disabilitas yang berprestasi dan tidak mampu membiayai pendidikannya; menanggung biaya pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikan mereka; serta memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi (Sholihah, 2016).

Penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan dan penghidupan; pencapaian fungsi sosial dari individu dengan disabilitas secara layak sesuai dengan bakat, kemampuan, tingkat pendidikan, dan pengalaman mereka; tersedianya peluang dan kesempatan bagi individu dengan disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, serta memasuki dunia kerja sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitas serta kemampuan mereka; adanya fasilitas yang memudahkan aksesibilitas baik secara fisik maupun non-fisik bagi individu dengan disabilitas; peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak terkait untuk

mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi individu dengan disabilitas di semua aspek kehidupan dan penghidupan (Itasari, 2020).

Ableisme, atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan kemampuan fisik atau mental mereka, telah menjadi isu yang signifikan dalam masyarakat. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam tinjauan kebijakan terhadap penyandang disabilitas, penting untuk mengevaluasi tindakan pemerintah dalam mengatasi stigma ableisme dan meningkatkan inklusi serta aksesibilitas bagi mereka. Kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas haruslah mencakup beragam bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, transportasi, dan aksesibilitas fisik. Langkah-langkah konkrit seperti menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja dan peluang kerja yang adil, serta pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, merupakan beberapa contoh tindakan yang dapat diambil. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya sebatas pada kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan. Ini melibatkan pelaksanaan program-program pelatihan bagi petugas publik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak positif bagi komunitas disabilitas.

Tinjauan kebijakan ini juga harus memperhitungkan aspirasi dan pengalaman langsung dari komunitas penyandang disabilitas. Partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan merupakan kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka secara efektif dipenuhi

dan hak-hak mereka dihormati. Dengan menggugat stigma ableisme dan memprioritaskan inklusi serta aksesibilitas, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Stigma sosial bagi disabilitas

Stigma sosial yang dihadapi penyandang disabilitas di masyarakat menimbulkan makna tersendiri bagi penyandang disabilitas. Asal usul makna ini sendiri didasarkan pada pengalaman para penyandang disabilitas dalam menerima dan menghadapi stigma sosial. Pengalaman yang digambarkan bukanlah pengalaman jangka pendek, melainkan pengalaman jangka panjang yang dialami penyandang disabilitas.

Pertama, soal stigma sosial, seperti apakah disabilitas dianggap sebagai ancaman sosial atau tidak. Penyandang disabilitas berpendapat bahwa stigma sosial bukanlah ancaman bagi mereka, meskipun ada juga yang awalnya menganggap stigma sosial sebagai ancaman bagi dirinya.

Kedua, tentang hubungan disabilitas dalam menghadapi stigma sosial penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Menurut para penyandang disabilitas, yang terpenting adalah fokus pada apa yang mereka lakukan saat ini. Sehingga mereka beranggapan bahwa stigma sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya adalah sebuah pembelajaran hikmah atau makna, subjek beranggapan jika terdapat perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya kita semua saling menghargai dan menghargai satu sama lain.

Ketiga, dari segi nilai yang dapat diperoleh dari stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Stigma yang melekat pada mereka dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih

termotivasi dan membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan mengetahui kemampuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan ukuran kompetensi. hendaknya seseorang mengambil pekerjaan dimana penyandang disabilitas tersebut tidak hanya menjadi beban keluarga saja, namun dapat meringankan beban orang lain disekitarnya dengan ketrampilan atau kemampuannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Katrina Scior, Mark Mostert, Roy McConkey (2018) yang berjudul *Disability Stigma In Developing Countries* Stigma muncul ketika elemen pelabelan, stereotip (evaluasi negatif dari sebuah label), dan prasangka yang menyebabkan hilangnya status dan diskriminasi bagi individu yang distigmatisasi atau kelompok, dan terjadidalam situasi di mana mereka tidak berdaya. Stigma menimbulkan respons negatif seperti rasa kasihan, kecemasan, penghindaran, permusuhan, dan bahkan kebencian dan jijik. Stigma dapat muncul dari luar diri (*enacted/ public stigma*), diberikan oleh orang lain pada seorang individu atau kelompok; dan dapat pula muncul dari dalam diri (*self-stigma*). Anggapan warga masyarakat bahwa kaum disabilitas itu lemah dan tidak berdaya adalah contoh dari *public/enacted stigma*; dan anggapan kaum disabilitas bahwa diri mereka sendiri lemah dan tidak berdaya (padahal tidak demikian) adalah contoh dari *self-stigma*.

Masih di dalam penelitian yang sama, menurut pendapat Bond (2017) pelatihan keterampilan untuk orang-orang dengan disabilitas dilaporkan membantu memerangi stigma diri dan dengan menunjukkan keterampilan orang-orang dengan disabilitas juga dapat mengatasi sikap masyarakat yang negatif dengan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dapat menopang diri mereka sendiri dan mendapatkan uang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilakukan pembahasan bahwa masyarakat cenderung memunculkan stigma bahwa keterbatasan fisik orang dengan disabilitas berbanding lurus dengan tingkat intelektualitas yang dimiliki. Mereka masih dianggap kurang berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan kerja karena keterbatasannya, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah tersebut. Stigma penyandang disabilitas juga dapat terjadi karena adanya ekspektasi bahwa penyandang disabilitas kurang dapat berkontribusi untuk kebaikan keluarga dan masyarakat, serta anggapan bahwa mereka adalah beban.

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas Diskriminasi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas mempunyai kecacatan yang membuat mereka bergantung pada bantuan orang lain. tempat kerja yang ingin mempekerjakan penyandang disabilitas karena mereka berbeda, tidak sempurna dan sepenuhnya cacat karena kondisi fisik yang mereka derita, pikirkanlah. Padahal mereka juga berhak mendapatkan persamaan hak dan pekerjaan yang layak.

Pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas merupakan wujud kepedulian negara terhadap terwujudnya hak asasi manusia. Agar masyarakat dan masyarakat lebih berperan aktif dalam membentuk harkat dan martabat penyandang disabilitas, maka hak-hak konstitusional penyandang disabilitas harus benar-benar diatur dan dilindungi. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara serta masyarakat dalam negara tersebut, sehingga terjadi keselarasan yang sempurna dan setara antara hak asasi manusia dan kewajibannya.

Pemerintah dan sangat penting bagi pengusaha dan masyarakat untuk memastikan bahwa ketenagakerjaan penyandang disabilitas ditangani. Namun pemenuhan kewajiban negara tidak hanya berdasarkan aturan yang ditetapkan undang-undang, tetapi juga oleh negara memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan mereka di masa depan dan seterusnya

Pemerintah berada dalam posisi penting untuk memberikan perhatian penuh terhadap penyandang disabilitas, dan selalu ada spekulasi. Komentar tajam warganet, bahwa penyandang disabilitas tidak berguna dan mengerikan, apalagi jika menyangkut pekerjaan. Upaya pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap warga negara merupakan persamaan hak. Equal berarti penempatan yang sama

Organisasi perlindungan hak asasi manusia yang melindungi hak asasi manusia, yang dilaksanakan dan diatur oleh lembaga pemerintah dan organisasi swasta, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, pengadilan, YLBHI, Balai Penyuluhan, Hukum Bantayan dan Hak Anak Nasional. Panitia Semuanya merupakan organisasi atau lembaga yang secara tidak langsung membantu penyandang disabilitas dalam kehidupannya. Pendidikan, per tahun pekerjaan.

Berdasarkan UU No. 39 memberikan informasi mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menjamin independensi, penegakan Hak Asasi Manusia dan mengatur Komnas HAM. Sebagai wakil suatu negara, pemerintah mempunyai tugas untuk menerapkan kebijakan non-diskriminasi, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam kehidupan nyata. WN memiliki garansi seumur hidup untuk memenuhi hal ini karena ketersediaan.

Hak konstitusional dijelaskan kepada warga negara dalam pasal-pasal tersebut. antara lain, tidak adanya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Warga negara bisa mendapatkan haknya dari negaranya masing-masing. Jika pemerintah menerapkan kebijakan dan penyandang disabilitas merasa diabaikan, maka peraturan tersebut perlu ditinjau ulang untuk melihat apakah pengaturannya sudah tepat ada yang harus ditambahkan.

Selain itu, pemerintah melakukan upaya untuk melindungi dan menegakkan hak-hak mereka. Negara berkewajiban antara lain:

1. Hormat, seseorang bebas memilih. dan kebebasan individu
2. Tidak membedakan-bedakan.
3. Berpartisipasi, aktif dan terlibat dalam masyarakat.
4. Menghargai perbedaan dan menerima apa adanya.
5. Kesamaan keterampilan.
6. Kesetaraan gender.

Apapun situasinya, seseorang berhak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Namun yang sebenarnya terjadi adalah masih sangat kecil kemungkinan beberapa perusahaan yang menawarkan kondisi kerja kepada penyandang disabilitas. Pemerintah bisa bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Apindo dan buruh atau savika. Selain itu, pemerintah juga harus menyelenggarakan tempat kerja khusus bagi penyandang disabilitas dari waktu ke waktu, menyelenggarakan pameran produk-produk hasil karya penyandang disabilitas, dan memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang mempekerjakan orang-orang yang tidak terkena stigma. ada parasit.

Stigma sosial adalah suatu perilaku dimana seseorang tidak diterima dalam kelompoknya, karena dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku. Stigma sosial dapat

menyebabkan pengucilan seseorang atau kelompok. Munculnya stigma sosial ini tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang turut berperan, yaitu keterbatasan fisik dan faktor ekonomi. Penyandang disabilitas yang mengalami stigma rata-rata adalah masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan mempunyai keterbatasan fisik yang berbeda dengan masyarakat terpendang dan biasa. Stigma yang dihadapi penyandang disabilitas bermacam-macam bentuknya, seperti kekerasan, hinaan atau ejekan, diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas yang selalu dipandang hanya sebagai beban keluarga.

Melalui stigma ini, para penyandang disabilitas mempertahankan diri dari stigma yang menimpa mereka. Selain itu, disabilitas juga dimaknai stigma sebagai pelajaran untuk mengajarkan kesabaran dan berjuang keras untuk membuktikan kepada dunia luar. disabilitas juga berpotensi terjadi.

Mengenai nilai-nilai yang dapat diambil dari stigma sosial terhadap disabilitas, dapat disimpulkan bahwa stigma yang diberikan kepada mereka dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih semangat dan membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalangi mereka untuk berkarya dan menemukan kemampuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan ukuran kompetensi bagi seseorang untuk bekerja, dimana penyandang disabilitas tersebut tidak hanya menjadi beban keluarga saja, namun dapat meringankan beban orang lain disekitarnya dengan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. tentu saja.

BAB 7

STIGMA PENYANDANG DISABILITAS DALAM BEKERJA

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun non-fisik. Keterbatasan dianggap sebagai penderitaan oleh sebagian orang. Dalam *The Wounded Storyteller: Body*, karya Arthur W. Frank, *Illness, and Ethics* (1995) Snyder dan Mitchell menyatakan, hanya sedikit dari kita yang dengan senang hati menerima keterbatasan dalam hidup hari ini. Kelahiran anak yang disabilitas atau permulaan keterbatasan dipandang sebagai bencana atau kegagalan. Ini karena dinonaktifkan akan menggeser seseorang menjadi tidak menarik dan posisi sosial yang tidak terduga.

Apabila dalam sebuah keluarga terdapat anggota penyandang disabilitas, akan hanya ada dua kemungkinan yang terjadi, keluarga tersebut menerimanya atau tidak menerimanya. Bahkan mungkin memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dianggap sebagai aib. Pemikiran-pemikiran seperti apakah penyandang disabilitas mampu diterima di masyarakat, atau apakah penyandang disabilitas mampu beradaptasi di lingkungan mayoritas, berkaitan dengan ketidakpastian. Argumen ketidakpastian tersebut dapat menghambat partisipasi dan peran serta penyandang disabilitas di masyarakat.

Menurut statistik dari International Labour Organization (ILO), 82 persen dari penyandang disabilitas di seluruh dunia tinggal di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses yang beragam, termasuk di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, informasi, dan politik.

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan individu tanpa disabilitas. Bekerja seharusnya menjadi hak dan tanggung jawab bagi semua orang dewasa, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian oleh Engelbrecht dan Lorenzo (2010) menunjukkan bahwa pekerjaan dan penghasilan dapat membantu penyandang disabilitas hidup mandiri dan berkontribusi pada keuangan keluarga, serta memiliki dampak positif lainnya seperti mengubah persepsi terhadap disabilitas (Lin, Zhang, & Yang, 2018) dan meningkatkan harga diri serta kepercayaan diri (Dewi, Harith, Harsono, Ali, & Fitriana, 2020). Namun, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas sering kali menghambat kesempatan mereka untuk bekerja.

Di berbagai negara, upaya telah dilakukan untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam pasar kerja. Beberapa pemerintah telah menetapkan kebijakan dan program untuk meningkatkan keterlibatan mereka, seperti program Add Us In di Amerika Serikat (Balcazar, Kuchak, Dimpfl, Sariepella, & Alvarado, 2014) dan Job Capacity Assessment (JCA) di Australia (Lantz & Marston, 2012). Beberapa negara, seperti India dan Malaysia, bahkan telah menerapkan undang-undang yang mengatur kuota penyandang disabilitas dalam dunia kerja (Kulkarni & Kote, 2013; Dewi, Harith, Harsono, Ali, & Fitriana, 2020). Di Afrika Selatan, sebuah perusahaan telah sukses mempekerjakan penyandang disabilitas sejak tahun 1997 (Engelbrecht & Lorenzo, 2010).

Di Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur keterlibatan mereka dalam pasar kerja. Pasal 53 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa semua penyedia kerja, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, wajib memberikan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Penyedia kerja dari sektor pemerintah diwajibkan

untuk mempekerjakan minimal 2% dari jumlah karyawan sebagai penyandang disabilitas, sedangkan perusahaan swasta diwajibkan untuk mempekerjakan minimal 1% dari jumlah karyawan mereka sebagai penyandang disabilitas.

Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja

Era globalisasi saat ini kecepatan dan efisiensi memang menjadi suatu hal yang penting dimana perusahaan dan instansi membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kinerja yang optimal dari para karyawannya namun tidak semua sumber daya manusia mempunyai kapasitas yang sama, penting untuk dipahami bahwa keanekaragaman termasuk keberagaman ras, golongan, suku, kondisi fisik harus dihargai dan tidak boleh menjadi dasar untuk perlakuan yang tidak adil bagi individu dalam dunia kerja (Aji & Haryani, 2017).

Manusia merupakan ciptaan Allah yang mempunyai kekurangan dan kelebihan dimana ada yang terlahir normal mempunyai fisik yang sehat, mental yang baik dan ada yang terlahir mempunyai keterbatasan fisik. Individu yang mempunyai keterbatasan fisik memiliki stigma yang buruk bahwa hal tersebut dianggap cacat/tidak normal yang mengakibatkan nilai dan kualitasnya kurang sempurna dimasyarakat, baik dalam lingkungan sekolah, sosial dan dunia kerja (Allo, 2022).

Berdasarkan data dari penelitian Ningsih 2022, terdapat 15% dari total jumlah penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas. Mereka merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dengan sekitar 82% dari mereka tinggal di negara berkembang dan sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak. Di Indonesia, pada Januari 2022, tercatat sebanyak 16,5 juta penyandang disabilitas, terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan. Serta data dari Infodatin

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, 3,3% anak usia 5-17 tahun mengalami disabilitas, sementara pada kelompok usia 18-59 tahun jumlahnya mencapai 22,0%. Di antara lansia, sebanyak 74,3% dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, dengan 22,0% mengalami hambatan ringan, 1,1% mengalami hambatan sedang, 1% mengalami hambatan berat, dan 1,6% tidak dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri (Widhinarsih, 2019).

Mulyani(2022) mengemukakan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, 14% melaporkan pengalaman diskriminasi dalam setahun terakhir. Tingkat diskriminasi lebih tinggi pada kelompok usia muda sebanyak 20,4% dibandingkan dengan kelompok usia tua sebesar 9,4%.

Undang-Undang pasal 1 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik ketika berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan, kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dalam jangka waktu yang lama (Saleh, 2018).

Persoalan penting yang cenderung dirasakan oleh penyandang disabilitas yaitu stigma sosial dan diskriminasi. Stigma merupakan pandangan atau prasangka memberikan label negatif yang dapat mengurangi kualitas identitas sosial dan harga diri individu maupun kelompok, stigma itu ada berasal dari luar diri kita yang diberikan oleh oranglain yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas itu lemah, tidak berdaya. Stigma pada penyandang disabilitas muncul karna oranglain mengacu pada paham normalisme dimana paham ini menganggap bahwa penyandang disabilitas sebagai abnormal, objek layak dikasihani, diberi donasi, tidak dapat mandiri. Pendapat seperti itu menegaskan bahwa stigma sosial

penyandang disabilitas sangat langgeng dimasyarakat (Dhairyya& Herawati, 2019).

Banyak orang disabilitas di Indonesia saat ini masih hidup berdasarkan simpati orang lain, memilih jalur menjadi peminta-minta, berwirausaha dengan modal yang minim, atau menjadi pemulung. Ini disebabkan oleh ketidaktersediaan akses yang sama bagi mereka. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka karena stigma pemberi kerja yang menganggap mereka tidak berdaya. Pandangan ini membuat orang disabilitas terjebak dalam situasi sulit. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kesetaraan kesempatan (Pasal 1 ayat 2), perubahan dalam kebijakan ketenagakerjaan masih belum tercermin dengan jelas bagi penyandang disabilitas (Santoso & Apsari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastutik & Pribadi (2020), stigma yang diberikan pada penyandang disabilitas dapat menyebabkan diskriminasi berupa pengucilan, dimana pengucilan ini terjadi karena perbedaan fisik yang mencolok antara penyandang disabilitas dan orang normal, ejekan, hinaan, tindakan kekerasan dimana keberadaan penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya diterima. Mereka masih percaya bahwa penyandang disabilitas adalah ancaman, lemah, dan merugikan, sehingga keberadaan mereka dihindari.

Penyandang disabilitas ditempat kerja masih dipandang sebelah mata, tidak berdaya, berbeda, tidak mempunyai kemampuan untuk berkerja, pekerjaan mereka didasarkan anggapan bahwa jenis pekerjaan yang diberikan harusnya sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki bukan berdasar pada keterampilan, dipandang lemah dibandingkan orang normal pada umumnya yang tidak mempunyai keterbatasan fisik, mental dan sensorik dimana kondisi ini dianggap kendala dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan disektor

formal seperti perusahaan swasta dan lembaga pemerintahan dimana ini bisa mengarah kepada diskriminasi di dunia pekerjaan (Warjianto & Sukamto, 2023).

Stigma tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi penyandang disabilitas, menghambat mereka dalam mencari pekerjaan. Padahal, pada kenyataannya, mereka memiliki potensi yang besar untuk bersaing di pasar kerja. Stigma negatif ini terus bertahan, seperti persepsi bahwa keterbatasan fisik atau non-fisik sama dengan ketidakmampuan, yang kemudian menghambat mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan ketenagakerjaan sehingga memungkinkan terjadinya diskriminasi (Rosidah & Muhtadi, 2023).

Diskriminasi kerja merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami perlakuan negatif, seperti perbedaan perlakuan, pembatasan akses atau kesempatan, pengucilan sosial, atau pelecehan di tempat kerja. Akibatnya, individu tersebut mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan bayaran atau upah secara adil dan setara dengan rekan-rekan kerja lainnya. Diskriminasi kerja dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk faktor seperti penyandang disabilitas (Setyawati, 2017).

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu: literatur review, dimana penulis mengumpulkan dan menggabungkan 13 jurnal, 8 artikel yang sejalan dengan topik yang dibahas yaitu terkait diskriminasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja lalu kemudian disimpulkan oleh penulis.

Rosalina & Apsari (2020) mengemukakan bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, yang dimiliki sejak lahir maupun kejadian yang tidak baik seperti kecelakaan dalam jangka waktu panjang yang dapat menghambat pencapaian hak, tujuan, dan memenuhi kebutuhannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan fisik, warna kulit, ras, suku, atau keyakinan. Hak-hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan ini meliputi hak untuk hidup, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas pekerjaan dan pendidikan, dan hak untuk hidup mandiri (Purinami dkk, 2018). Hak asasi manusia menegaskan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap semua individu, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama. Namun, kenyataannya, penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi di tempat kerja karena keterbatasan mereka dianggap sebagai beban, yang menyebabkan mereka menjadi sasaran perlakuan diskriminatif (Amelia & Femmitasari, 2023).

Keputusan pemerintah Indonesia untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas pasal 45 yang berbunyi "pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penempatan kerja dan pengembangan karir yang adil tanpa adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas"

Undang-undang No. 8 Tahun 2013 mengenai penyandang disabilitas menegaskan bahwa "pemerintah diwajibkan memenuhi kuota pekerja setidaknya 2% penyandang disabilitas dari total keseluruhan pegawai, perusahaan swasta juga wajib merekrut pekerja dari golongan penyandang disabilitas minimal 1%" (Amelia & Femmitasari, 2023). Setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Kebijakan UU diatas menjadi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan disejumlah perusahaan swasta maupun pemerintah, dimana semua warga negara termasuk penyandang disabilitas, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa adanya diskriminasi. Namun realitasnya masih banyak bentuk diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas seperti pelecehan, kekerasan, diberikan perlakuan berbeda dalam lingkup pemerinta dan swasta disebabkan oleh stereotip dan stigma yang masih melekat bahkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan karna keterbatasan yang dimiliki.

Menurut Makbul & Rokhman (2023) menyatakan bahwa di Indonesia, pada tahun 2022, diperkirakan ada sekitar 16.5 juta orang penyandang disabilitas, tetapi hanya sekitar 5.825 orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Data lain yang sejalan yaitu data yang dilaporkan oleh Metro Semarang menunjukkan bahwa tidak semua pemberi kerja memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja, terutama di Jawa Tengah, dimana beberapa pemberi kerja melakukan diskriminasi dalam proses rekrutmen. Temuan ini ditemukan oleh kerjabilitas.com, sebuah pemberi kerja tenaga kerja berkebutuhan khusus, dalam survei bulanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakadilan dalam memperlakukan penyandang disabilitas sebagai manusia yang setara (Mulyani, dkk 2022).

Beberapa perusahaan yang ada di Indonesia belum menerapkan kebijakan tersebut karna masih ragu untuk menerima penyandang disabilitas sebagai karyawannya. Pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang

ditempatkan dalam pekerjaan masih belum optimal karena di internal perusahaan seringkali dianggap sebagai beban dan dipertanyakan kemampuan kerjanya. Mereka sering dianggap kurang memiliki keterampilan yang dapat diandalkan, memprihatinkan dan banyak yang menganggap mereka tidak sehat secara fisik maupun mental (Rosalina & Setiyowati, 2024).

Diskriminasi merupakan suatu hal yang cenderung didapati dalam masyarakat karena manusia sering melakukan diskriminasi satu sama lain dimana diskriminasi merujuk pada segala bentuk perlakuan yang tidak adil, pengucilan, membedakan seseorang berdasarkan berbagai faktor seperti agama, etnis, ras, latar belakang, status ekonomi, gender, bahasa, dan keyakinan dan lain-lain. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia serta pembatasan atau penghapusan kebebasan dasar individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, ini bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lainnya (Karmila dkk, 2021).

Diskriminasi kerja merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami perlakuan negatif, seperti perbedaan perlakuan, pembatasan akses atau kesempatan, pengucilan sosial, atau pelecehan di tempat kerja, pembatasan terhadap peluang karier yang seharusnya terbuka bagi mereka. Akibatnya, individu tersebut mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan bayaran atau upah secara adil dan setara dengan rekan-rekan kerja lainnya. Diskriminasi kerja dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk faktor seperti penyandang disabilitas (Setyawati, 2017).

Permasalahan dasar bagi penyandang disabilitas yaitu kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai arti disabilitas dan keberadaannya juga sebagai

warga negara yang mempunyai hak sama sebagai warga negara yang telah di atur dalam UU dimana keberadaannya dianggap sebagai aib, hal yang memalukan, kutukan, disamakan dengan individu yang sakit dan tidak mampu dan tidak perlu memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. Mereka hanya perlu dikasihani, diasuh untuk keberlangsungan hidupnya maka dari itu bnyak dari penyandang disabilitas tidak memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan hak dan kesempatan yang sama seperti warga yang lain yang telah diatur didalam UU, dalam kondisi ini rentan terkena diskriminasi ganda (Purnomosidi, 2017).

Diskriminasi banyak dialami oleh peyandang disabilitas yaitu diskriminasi di dunia pekerjaan dimana penyandang disabililitas hanya dikasihani, dipandang mempunyai banyak keterbatasan yang akan menghambat kinerja dan menghambat produktivitas didalam perusahaan, bullying secara terang-terangan, mengintimidasi, pelecehan, perlakuan tidak adil serta ucapan dan gurauan tidak sopan terhadap penyandang disabilitas (Mulyani dkk, 2022). Adapun kasus diskriminasi yaitu pemerintah kota Surabaya secara diskriminatif menolak pendaftaran CPNS dari penyandang disabilitas karena cacat fisik (Pakpahan,2023).

Bentuk diskriminasi yang lain yang didapatkan oleh penyandang disabililitas di salah satu perusahaan yakni peraturan rekrutmen yang menekankan penampilan yang menarik dan sehat jasmani dan rohani dapat secara tidak langsung membatasi peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun secara sekilas peraturan tersebut mungkin terlihat netral, namun dalam praktiknya hal ini dapat menjadi bentuk diskriminasi terselubung dimana hal ini karena penyandang disabilitas sering kali memiliki kondisi fisik atau kesehatan yang berbeda, dan persyaratan seperti penampilan yang menarik, sehat

jasmani dan rohani dapat menjadi hambatan bagi mereka dalam mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai untuk pekerjaan tersebut (Noviasari & Nurwati, 2020).

Dari uraian pembahasan diatas dimana kebijakan UU dan HAM bagi penyandang disabilitas tidak sepenuhnya diindahkan dan di optimalkan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah maka untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia seharusnya lebih memberikan sebuah penekanan, yaitu negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang menghadapi kendala dalam berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang mereka alami ketika berinteraksi dengan lingkungan, dan hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas kerap kali mendapat diskriminasi baik didalam masyarakat maupun di dunia pekerjaan dimana penyebab diskriminasi itu terjadi yakni:

1. Adanya stigma negatif dan stereotip.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran.
3. Tidak adanya aksesibilitas.
4. Kebijakan UU yang dikeluarkan tidak diindahkan dan dilakukan secara optimal.

Bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh penyandang disabilitas yaitu perlakuan tidak adil baik dalam masyarakat maupun ketenagakerjaan, mendapatkan pelecehan, bullying, diintimidasi, dikucilkan, mendapat hinaan, pembatasan akses dan lain-lain.

Keterbatasan Akomodasi Kerja

Menurut survei yang diselenggarakan oleh World Blind Union (WBU) dengan pertanyaan semi terbuka, ditemukan bahwa 35% dari responden mengalami hambatan karena kurangnya akses terhadap teknologi adaptif, baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk memaksimalkan potensi mereka di tempat kerja. Penyandang disabilitas juga menghadapi kendala mobilitas, terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya dukungan transportasi yang memadai (Butler et al., 2005). Temuan ini didukung oleh penelitian Yang-Handy (2013), yang menyoroti bahwa infrastruktur dan desain bangunan yang tidak ramah disabilitas, seperti kurangnya landai, kurangnya papan tanda Braille, atau kekurangan lift, serta risiko yang dihadapi di transportasi umum, menjadi faktor utama pembatasan mobilitas penyandang disabilitas. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Bengisu (2008), yang mencatat bahwa sebagian besar partisipan penelitiannya mengalami hambatan fisik di tempat kerja, baik dari segi desain interior maupun eksterior.

Di samping tantangan mobilitas, berbagai peralatan dan akomodasi fisik yang mahal dan memerlukan keterampilan lanjutan juga dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas, terutama karena biaya perawatan teknologi adaptif yang tinggi (Douglas, 2013). Di tempat kerja, akses terhadap informasi sering kali terbatas, bukan hanya dalam konteks pekerjaan tetapi juga dalam kegiatan sosial. Kadang-kadang, penyandang disabilitas merasa terisolasi dari kegiatan sosial perusahaan karena media yang digunakan tidak dapat diakses oleh mereka (Coffey et al., 2014).

Meskipun teknologi adaptif diakui sebagai faktor yang membantu penyandang disabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan, namun juga dapat menjadi penyebab stres.

Penyandang disabilitas dapat mengalami stres ketika pengadaan peralatan terlambat atau ketika teknologi adaptif tidak terintegrasi dengan sistem secara keseluruhan, termasuk printer yang belum dimodifikasi (Crudden, 2002). Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aksesibilitas di tempat kerja. Peralatan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai teknologi tunggal, bukan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas untuk meningkatkan efektivitas. Temuan ini juga diperkuat oleh Coffey et al., (2014), yang menunjukkan bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar, namun seringkali sulit dilakukan oleh perusahaan karena prosedur yang rumit.

Selain masalah akses terhadap peralatan, penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi terkait akomodasi di tempat kerja. Mereka sering kali harus menyediakan sendiri peralatan kerja mereka, seperti perangkat lunak atau perangkat lain yang mendukung pekerjaan mereka. Meskipun mengajukan proposal untuk memperoleh peralatan tersebut, seringkali perusahaan menolak dan mengharuskan mereka mengikuti prosedur yang berlaku (Donnell, 2014). Kendala aksesibilitas ini menjadi bagian dari eksklusi sosial secara struktural, yang dapat menyebabkan penyandang disabilitas merasa tereksklusi dari jenjang karir dan merasa bahwa profesionalitas mereka tidak diakui secara penuh dalam lingkungan kerja. Namun, dengan menyediakan fasilitas dan akomodasi yang memadai, perusahaan dapat membantu membangun profesionalisme penyandang disabilitas di tempat kerja.

Rasa Percaya Diri Rendah

Konsep diri yang lemah dari para informan menjadi salah satu faktor permasalahan bagi penyandang disabilitas fisik untuk mengakses pekerjaan. Konsep diri yang dimaksud

yaitu rasa percaya diri dari para informan. Penyandang disabilitas fisik mengalami tidak percaya diri atas kekurangan yang mereka alami dan mereka kurang berani tampil di publik. Penyandang disabilitas fisik yang sebelumnya memiliki kondisi fisik yang normal, kemudian mengalami disabilitas fisik menjadi kendala bagi mereka. Setelah mengalami disabilitas fisik akibat kecelakaan atau penyakit sebagian besar dari mereka tidak mencoba untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan karena merasa dengan kekurangannya tidak akan ada perusahaan yang akan memperkerjakannya.

Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Fisik di Sektor Kesempatan Kerja

Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat fisik untuk mencapai pekerjaan. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang dimaksud penyandang disabilitas adalah: “termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan dan pelibatan penyandang disabilitas terhadap berbagai macam kegiatan dengan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Pemberian kesempatan kerja berupa kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan tergolong masih rendah.

Pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum diperoleh, hal tersebut dapat dilihat dari masih sulitnya penyandang disabilitas untuk bekerja di dunia usaha yang ada di masyarakat. Termasuk dalam memperoleh pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan pun, penyandang disabilitas masih sulit dalam mendapatkan kesempatan tersebut. Permasalahan terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan rata-rata bersumber dari pemberi kerja yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang lemah, sakit, dan memerlukan bantuan sosial. Kondisi penyandang disabilitas dianggap tidak cocok untuk bekerja karena pekerjaan yang dilakukan akan menghambat kondisi kedisabilitasan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman pemberi kerja akan pendidikan yang ditempuh penyandang disabilitas menyebabkan pemberi kerja menilai sebelah mata dan menyudutkan penyandang disabilitas. Faktor lainnya pemberi kerja beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cocok bekerja di perusahaan mereka karena tidak memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pekerjaan tanpa memandang suku, ras, dan agama perlu diimplementasikan terhadap penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja/pengangguran lebih banyak daripada yang bekerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat dilihat berdasarkan pengaturan undang-undang, pemahaman penyedia kerja terhadap kemampuan bekerja penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah yang telah tersedia, serta pandangan penyandang

disabilitas dalam melihat aksesibilitas tersebut. Pentingnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan berdampak terhadap tingginya angka serapan penyandang disabilitas di dunia kerja sehingga masalah aksesibilitas penyandang disabilitas perlu diselesaikan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat. Semakin mudah akses disabilitas dalam memperoleh pekerjaan maka tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi lebih baik dan turut merasakan pemerataan pembangunan daerah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan tercermin dalam peraturan perundangundangan baik yang mengatur mengenai disabilitas itu sendiri maupun yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan yang melindungi penyandang disabilitas antara lain:

1. Perlindungan dalam UUD NRI 1945. Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan hidup yang layak.³ Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, imbalan yang layak serta perlakuan yang adil dalam setiap hubungan kerja. Maksud dari setiap orang disini adalah semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas dari diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan diperlakukan adil dalam bekerja.
2. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111

Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan). Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi pada tanggal 7 Juni 1999. Pengesahan Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga lebih menjamin perlindungan hak pekerja dari setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Hal ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya hak mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Pokok-pokok dalam konvensi ini adalah melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan tanpa diskriminasi.

3. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hal-hal yang secara umum mengenai HAM. Mengenai hak-hak setiap orang dalam bekerja diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang baik pria maupun wanita berhak atas memilih pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan, bakat, kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja juga tidak diskriminatif antara pria dengan wanita dalam hal pekerjaan tersebut mempunyai beban yang sama. Yang terpenting adalah

setiap orang dalam bekerja berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasi yang diberikan dalam pekerjaannya.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan kaidah ketenorm yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna melindungi hak-hak dari pekerja maupun pengusaha. Dalam rangka melindungi para pekerja penyandang disabilitas, UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha wajib melakukan perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Adapun mengenai pelatihan bagi penyandang disabilitas, juga dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan penyandang disabilitas yang bersangkutan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tanggal 13 desember 2006. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas, mempromosikan kesetaraan dan memerangi diskriminasi, membuat lingkungan fisik dapat diakses, memberikan perlindungan dalam situasi berisiko, memastikan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan dan kesempatan kerja. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang diratifikasi pada tanggal 10 November 2011. Dalam konvensi tersebut, yang

mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan, negara wajib menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak-hak dari penyandang disabilitas dalam bekerja agar penyandang disabilitas bebas dalam memilih pekerjaan yang diinginkannya dan menjamin lingkungan kerja yang inklusif.
- b. Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hal persyaratan dalam hubungan kerja, jenjang karir, upah, dan kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Menciptakan kesamaan kesempatan dan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dalam pengupahan dan kondisi kerja yang meliputi kondisi kesehatan dan bebas dari kekerasan.
- d. Melakukan pelatihan terhadap penyandang disabilitas dan menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul dalam serikat pekerja sebagaimana pekerja yang lain.
- e. Menginformasikan lowongan pekerjaan kepada penyandang disabilitas termasuk memberikan pendampingan dalam mencari, melamar, bekerja hingga penyandang disabilitas berhenti bekerja.
- f. Memberikan dorongan untuk bekerja secara mandiri dan membuka usaha secara mandiri.
- g. Mempekerjakan penyandang disabilitas dalam sektor pemerintahan.
- h. Memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas terdapat di tempat kerja.
- i. Memastikan penyandang disabilitas tidak mengalami perbudakan di tempat kerja atau melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

- j. Menjamin hak dari penyandang disabilitas dan keluarganya untuk selalu mendapatkan kebutuhan primer maupun sekunder dan selalu mempromosikan larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
6. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas mempunyai hal-hal yang berbeda dari undangundang sebelumnya. Hal yang signifikan adalah dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas lebih mengutamakan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak. Dalam undangundang ini, Hak-hak dalam bekerja, berwirausaha dan berkoperasi adalah sebagai berikut:
- a. Hak untuk bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta
 - b. Hak memiliki upah yang sama dalam jenis pekerjaan dan jabatan yang sama dengan bukan pekerja penyandang disabilitas.
 - c. Hak mendapatkan akomodasi yang layak.
 - d. hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
 - e. Hak untuk mendapatkan jenjang karier.
 - f. Hak diperlakukan dengan adil dan bermartabat.
 - g. Hak untuk memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri dan berwirausaha.

Dalam rangka melindungi hak-hak pekerja penyandang disabilitas diatas, tentunya harus ada peran penting dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah serta pengusaha sebagai pemberi kerja adapun peran dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- a. Menjamin proses dari rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier dilaksanakan dengan adil dan tanpa adanya diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
- b. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta. Lembaga pelatihan kerja ini merupakan lembaga pelatihan yang ramah disabilitas, bersifat inklusif dan mudah diakses.
- c. Menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- d. Menjamin perlakuan dan akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidangketenagakerjaan.
- e. Memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- f. Memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan yang tugasnya adalah merencanakan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, memberikan informasi mengenai rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier dilaksanakan dengan adil dan tanpa adanya diskriminasi kepada pemberi kerja, mendampingi pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang

disabilitas dan mendampingi penyandang disabilitas itu sendiri dalam mencari pekerjaan.

2. Peran Pemberi Kerja

- a. Bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- b. Bagi sektor swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- c. Dalam proses rekrutmen pekerja, pemberi kerja wajib melakukan proses rekrutmen dengan cara yang layak yaitu menyediakan pendampingan pada saat ujian, menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas, memberikan waktu pengerjaan tes yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas dan menempatkan penyandang disabilitas sesuai minat, bakat dan kemampuan.
- d. Dalam proses penempatan, pemberi kerja wajib memberikan kesempatan untuk mendapatkan masa orientasi pada masa awal kerja, menyediakan tempat kerja yang inklusif, menyediakan waktu istirahat, mengurangi target kerja, memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pekerjaan apabila dibutuhkan, dan memberikan cuti berobat apabila dalam proses pengobatan.
- e. Memberikan upah yang sama dalam hal jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja bukan penyandang disabilitas.
- f. Apabila pemberi kerja tidak menyediakan sarana kerja yang inklusif, maka akan mendapatkan sanksi

berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Agar ketentuan mengenai perlindungan penyandang disabilitas menjadi efektif, ada ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan kepada setiap orang yang menghalanghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya untuk bekerja, berwirausaha dan berkoperasi. Adapun sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Partisipasi penyandang disabilitas fisik di sektor kesempatan kerja masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya aksesibilitas, minimnya pemahaman dari pemberi kerja, dan stigma negatif terhadap kemampuan mereka untuk bekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, akomodasi yang layak, serta memberlakukan insentif dan sanksi guna mendorong pemberi kerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kerja bagi penyandang disabilitas, stigma negatif terhadap mereka masih menjadi masalah serius. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Hambatan seperti keterbatasan akomodasi kerja, aksesibilitas yang buruk, dan rendahnya rasa percaya diri menjadi faktor utama yang menghambat

partisipasi mereka di dunia kerja. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya untuk mengatasi stigma dan meningkatkan aksesibilitas kerja bagi penyandang disabilitas.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas, kolaborasi antara pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat sangat diperlukan. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas fisik dan sosial di tempat kerja, serta pembentukan kebijakan yang mendukung inklusi dan diversitas di tempat kerja. Dengan adanya dukungan yang kuat.

BAB 8

COUNTER-STIGMA PADA PENYANDANG DISABILITAS ATAS PERAN DI DALAM KESEIMBANGAN DUNIA

Dunia ini dapat kita renungkan menjadi sebuah titik tolak ukur perubahan, dimana semua hal pastinya tidak akan bisa secara statis terus berada pada tiap porosnya. Yang mana bergantung pula pada kehendak Ilahi, maka tidak akan ada sesuatupun yang abadi kecuali kemutlakan Tuhan dan perubahan itu sendiri (Khotimah, 2009: 114). Perubahan-perubahan yang didasari oleh dinamika kehidupan yang selalu terus menerus menantang kita untuk mencari solusi terhadap banyaknya masalah kehidupan, termasuk perihal stigma terhadap penyandang disabilitas. *Counter-Stigma* disini berarti bagaimana kita bisa melawan pandangan negatif pada suatu hal. Thomas (2021:451) menjelaskan bahwa konsep ‘*stigma*’ merupakan konsep yang dominan di banyak disiplin ilmu, namun sering kali masih belum jelas dan disalahartikan, bersifat individualis, serta *didislokasi* atau tidak dihubungkan dengan masalah kesenjangan, perlawanan, dan kepemilikan.

Goffman mendefinisikan stigma sebagai “*atribut yang sangat merugikan*” dan sebagai sesuatu yang merendahkan sasaran stigma itu sendiri “*dari orang yang utuh dan biasa menjadi orang yang ternoda dan diremehkan.*” Serta erat kaitannya dengan *labeling*, *diskriminasi*, & *separasi* (Andersen et al., 2022). Stigma terbentuk dari persepsi kelainan yang beragam dengan potensi *morbiditas* emosional yang parah, dimana masyarakat telah membentuk *stereotype* fisik konvensional mengenai perfeksionisme dan ketertarikan, sehingga melahirkan diskriminasi sosial (Mushtaq et al., 2020: 101). Selaras dengan hal itu, maka diperlukan sebuah

pencerahan pada pemaknaan eksistensial terhadap segala bentuk perbedaan yang ada, dalam hal ini membahas perihal penyandang disabilitas. Disini, sedikit banyaknya merefleksikan semua bentuk kelainan yang telah dikategorikan oleh Widinarsih (2019: 138) dalam penelitiannya terhadap definisi dan batasannya (yaitu antara lain): Penyandang disabilitas fisik, intelektual (retardasi fungsi pikir), mental (retardasi emosi dan perilaku), dan penyandang disabilitas sensorik atau inderawi.

Pandangan masyarakat yang seringkali menyamakan penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu bekerja, sehingga membuat mereka berada pada kondisi yang krisis dalam hal kemandirian secara ekonomi, dianggap sebagai kutukan dan aib keluarga (terutama di pedesaan), dan menyebabkan mereka mengalami gangguan secara psikologis dan kesulitan untuk bersosialisasi (Siregar & Purbantara, 2020). Penghargaan dan etika kemanusiaan telah luput dari sisi hak mereka. Bahkan dalam hal politik, penyandang disabilitas dianggap sebagai *orang gila* yang paling tidak, telah diberi sebuah kelonggaran demokratis berupa hak pilih bersyarat (Lutfhy, 2019). Maka dapat lah ditarik dari berbagai persepsi diatas bahwa, dalam hal stigmatisasi pada penyandang disabilitas harus terus dioptimalkan sebuah bentuk intervensi untuk penanggulangan yang terbaik terhadapnya, penulis disini akan mencoba *mengulik* nya dengan pendekatan bahwa penyandang disabilitas “*ada*” sebagai bentuk keseimbangan dunia.

Konsep Keseimbangan Dunia Terhadap Manusia

Pada kenyataan nya, *world equilibrium* (keseimbangan dunia) didasari oleh prinsip bahwa kehidupan ini bersifat dinamis dan berubah-ubah, sehingga modifikasi akan diperlukan ketika keberlangsungan organisme didalamnya menyalahi fungsi yang semestinya, terkadang, objek ini juga

berhubungan dengan dua atau lebih hal berbeda yang saling berkorelasi (Haroutunian, 2012). Keseimbangan dunia juga dapat berdasar pada prinsip “... *all the individuals with whom he interacts must also achieve a similar state and this can only occur if the relations of all individuals together form a system in equilibrium*” bahwa semua individu yang berkaitan didalamnya harus pada titik yang sama, sehingga pelaku dan objek penyeimbang tersebut adalah semua orang yang berkaitan didalamnya (Arensberg, 1942).

Ketidaksesuaian yang telah terjadi di masyarakat adalah ketika hak dan pemberlakuan seseorang terhadap suatu kelompok berbeda dengan yang lain secara negatif (*discrimination*), hal inilah yang telah terjadi terhadap penyandang disabilitas dimana beberapa orang pastinya tidak mengerti untuk dapat menciptakan lingkungan (*environments*) yang sehat bagi semua pihak. Intervensi yang dibutuhkan adalah pemahaman bahwa penyandang disabilitas tidak seharusnya diberlakukan sebagai orang yang *dicemooh* melainkan orang *istimewa* dimana mereka ada sebagai bentuk perbedaan yang harus dihargai dan sebuah bentuk keseimbangan dunia dimana semua orang harus bersyukur telah diberikan anugerah kehidupan.

Intervensi Pragmatis

Penelitian telah memaparkan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan para aktivis di dunia ini untuk bisa mengubah pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas adalah dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan sosial dan ekonomi yang baik bagi semua khalayak tanpa memandang *siapa* mereka, dilanjut dengan praktik intervensi sebagai fasilitator atas aktivitas kritis untuk pendekatan pendidikan publik yang lebih luas (Stuart, 2016). Pada riset lain, stigma diskriminatif bagi penyandang disabilitas dapat teralihkan pada

hal yang lebih bermakna, yaitu strategi pemberdayaan untuk menjadikan penyandang disabilitas tak lagi sebagai obyek melainkan subyek pembangunan, dimana masyarakat penyandang disabilitas diberikan peran dalam memajukan desa dengan terlibat dalam program budaya dan kesenian, dan peran ini menciptakan masyarakat penyandang disabilitas mampu mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan diterima oleh masyarakat desa (Siregar & Purbantara, 2020). Dalam hal pendidikan, berbagai banyak sistem dan strategi mulai dari segregatif (terpisah) hingga inklusif (menyatu) telah dipelopori dengan banyak nya rancangan dan model implementasi berbasis asesmen, penentuan materi, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi, serta tahapan-tahapan lainnya demi mengembangkan suatu sistem pendidikan yang mendukung untuk para penyandang disabilitas yang kemudian juga memerlukan tenaga pendidik khusus dan memadai (Mahabbati, 2014: 37-39)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*, 2018) dengan tiga pilar utamanya: Pembangunan, Hak asasi manusia, serta Perdamaian dan Keamanan. Berusaha untuk terus mengembangkan sistem nya untuk “tidak meninggalkan siapapun”, sehingga memasukkan Penyandang *Disabilities* dalam salah satu poin dalam *SDGs (Sustainable Development Goals)* nya. Pada tahun 2018, dimana PBB meluncurkan pengajuan yang pertama perihal disabilitas dan *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, yakni Laporan Disabilitas dan Pembangunan mengenai “Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh, untuk, dan bersama penyandang disabilitas”. Laporan ini memaparkan bahwa penyandang disabilitas berada pada posisi yang dirugikan dalam sebagian besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tindakan nyata diperlukan untuk memasukkan satu miliar penyandang disabilitas di dunia – 15% dari populasi dunia – sebagai agen dan

penerima manfaat pembangunan. Dengan latar belakang semua bukti yang ada, laporan ini mengidentifikasi praktik-praktik baik dan merekomendasikan tindakan-tindakan mendesak yang harus diambil demi pencapaian *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* oleh, untuk, dan bersama penyandang disabilitas pada tahun 2030.

Dalam hal nilai dan pembangunan, para tokoh-tokoh dunia saat ini pastinya tidak akan melupakan suatu ketidaksesuaian apapun, terutama perihal penyandang disabilitas yang kehilangan hak penghargaan nya didalam hidup. Tetapi, tentunya semua hal yang dipaparkan diatas paling tidak bersifat *pragmatis* atau berfokus pada nilai kebermanfaatannya di dunia nyata. Maka, penulis disini akan mencoba untuk terjun pada pokok pembahasan dimana *penyandang disabilitas* ada sebagai bentuk keseimbangan Dunia.

Semua Manusia dianugerahi Kehidupan

Semua orang yang telah merasakan kehidupan tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi asal-muasal dan esensi keberadaan nya sama yaitu sebagai manusia yang terlahir dengan anugerah keberadaan dan tahapan reproduksi juga spiritualnya (setiap pandangan memiliki perberbedaan pendapat dalam hal ini, namun penulis menitik beratkan pembahasannya dalam konteks Islami di paragraf selanjutnya). Leahy (dalam Nuryamin *et al.*, 2021: 39) menjelaskan bahwasanya obyek formal pada filsafat manusia ialah: hakikat manusia (*human essence*), struktur yang fundamental pada manusia (*human structures*), dan sifat dasar atau kodrat manusia (*human nature*). Maka dari itu, menurut Michael Leahy, filsafat manusia (*philosophie de l'homme*) adalah telaah perihal prinsip “adanya” (*prinsipe d'entre*). Keberadaan manusia dalam telaah filsafat merupakan:

“sesuatu yang olehnya manusia memiliki wujud, yang olehnya pula manusia berkepemilikan karakter yang khas, dan yang olehnya manusia memiliki nilai-nilai unik”.

Di dalam pandangan Islam, manusia memiliki esensi yang sangat mendasar, yakni antara lain: (1) Istilah yang telah ditafsirkan dalam al-Qur'an untuk menyebut manusia yaitu *al-Insan* (berarti manusia ialah yang memiliki potensi dan keistimewaan), *al-Basyar* (merujuk pada manusia sebagai makhluk biologis), dan *al-Nas* (berarti manusia sebagai makhluk sosial); (2) Paradigma para tokoh-tokoh Islam terhadap hakikat manusia berbeda satu sama lain, namun definisinya sama yakni manusia ialah makhluk yang berkepemilikan potensi berbeda dari makhluk Allah lainnya; (3) Terakhir, Manusia dilabeli *ahsan al-taqwin* yang mana menempatkan manusia di posisi yang strategis yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah *Azza Wa Jalla* (Damayanti et al., 2021). Khalifah disini berarti pengganti atau mereka yang mewarisi bumi untuk kemudian ia memanfaatkan nya hingga hari pasca-kehidupan dunia (*akhirat*) tiba.

Manusia kemudian akan dihadapkan pada dilema zaman yang terus berkembang sehingga seringkali membuat nya luput untuk menghargai hidup atas dasar kenyamanan yang zaman itu sendiri berikan, dalam hal ini manusia selalu lupa untuk bersyukur. Mahfud (2014: 398) menyebutkan bahwa kebersyukuran merupakan proses dinamis yang tidak memiliki batas usai (*never ending process*). Di dalam Al-Qur'an, ayat syukur menunjukkan tafsir kontekstual dalam memahami konsep kebersyukuran secara lebih praktis dan bermakna memiliki sumbangan yang besar terhadap bahagia dan suksesnya seorang insan. Selebihnya, tafsir syukur secara kontekstual juga dipelopori oleh dimensi kebermanfaatan dan kemaslahatan sosial yang lebih menyeluruh. Dasar tafsir dan pemahaman yang lebih humanis dari dimensi insaniah dan lebih

transendental berdimensi ilahiah tentunya akan selalu menguatkan mata batin kebersyukuran pelakunya.

Penyandang Disabilitas dalam Peran Keseimbangan Dunia

Dari banyaknya uraian di dalam tulisan ini, penulis akan lebih mencoba menipiskan dan memperkecil cakupan pembahasan, untuk kemudian menjelaskan atas dasar apa judul dari artikel ini memuat hal yang spesifik tersebut. Dua hal yang bisa dipetik dari poin terdekat diatas dan dapat dijadikan acuan esensi pembahasan ialah antara lain: Pewarisan Seorang Manusia di Bumi (*Khalifah*) dan Kesadaran Manusia untuk menghargai akan pentingnya Kehidupan (*Syukur*). Manusia diberikan banyak keistimewaan dalam hidup di dunia ini, terlepas dari keunggulan nya dari ciptaan (*makhluk*) lainnya, ia juga diberikan peran untuk mengakomodir dan bertindak sebagai pewaris, perubah, dan penguasa yang dominan di atas bumi. Oleh karenanya, manusia harusnya lebih berfokus untuk menciptakan keadaan yang harmonis dan tentram. Diikuti oleh kebersyukuran atas apa yang telah ia dapatkan, maka tuntaslah (*completed matters*) permasalahan yang ada di dunia.

Penyandang disabilitas merupakan orang *istimewa* yang juga dianugerahi kelebihan-kelebihan didalam hidup yang lebih esensial, kelonggaran dalam agama, dan sebuah *rahmat* bagi orang tua atau pengasuhnya. Mereka, penulis sebut sebagai *penyeimbang* dikarenakan perannya sebagai bentuk kebersyukuran oleh orang-orang yang *lebih memiliki* secara naluriah dan batiniah dibandingkan mereka. Jikalau saja semua orang di dunia ini memandang mereka sebagai bentuk *kontemplasi diri*, maka tidak akan ada orang yang akan membenci dirinya sendiri (yang memungkinkan potensi bunuh diri) dan membenci *penyandang disabilitas itu sendiri*. Semua orang akan terus *melihat kebawah*, bahwasanya selalu ada

orang yang lebih kekurangan dibandingkan *diri pribadi*. Bahkan dalam konteks apapun, kita pasti punya satu alasan untuk bersyukur dihadapan seribu alasan untuk tidak bersyukur. Hingga diri ini akan sampai ke liang lahat (kematian). Mereka (para penyandang disabilitas), akan menjadi alasan untuk orang-orang di dunia lebih menikmati hidup dan berbuat baik kepada sesama, menghargai dan mensyukuri seluruh keberadaan di dunia. Itulah esensi *counter-stigma* di dalam tulisan/makalah ini yang sesungguhnya.

Paradigma positif akan memberikan ruang yang lebih leluasa untuk terciptanya pendidikan khusus dan layanan publik khusus yang baik bagi para penyandang disabilitas, dimana tidak semata-merta hanya berdasar pada hal yang bersifat pragmatis, namun lebih ke hal dimana kita melihat obyek dari pendidikan itu sendiri ialah manusia-manusia yang memang benar *istimewa* (Mahabbati, 2014: 35). Berarti, keberlangsungan sistem pembelajaran dan penyediaan layanan apapun yang diberikan kepada pada penerima pendidikan khusus dan layanan publik khusus akan tetap bermasalah ketika semua orang diluar daripada nya hanya melihat mereka sebagai obyek tanpa memerhatikan nilai tersirat mereka sebagai manusia.

Berdasarkan perspektif Islam, penyandang disabilitas harus diperlakukan sebanding seperti orang-orang normal yang ada diantara mereka. Dimana, pemberlakuan kesejahteraan sosial seharusnya didasari pada martabat dan nilai harkat penyandang disabilitas. Olehnya itu, ketersediaan yang mensejahterahkan penyandang disabilitas di dalam kehidupan sosial harus dinilai secara proporsional. Dengan pandangan bahwa masing-masing orang penyandang cacat memiliki kebutuhan dan keterikatan yang sama dan harusnya mengubah penyediaan kesejahteraan sosial yang menjadi bentuk-bentuk penindasan (Ridho, 2017).

Terlepas dari semua hal diatas, sebagai akhiran, penulis memohon maaf bila ditemukan kekeliruan dan kesalahan didalam penulisan artikel atau makalah (*paper*) ini. Setiap manusia berkewajiban untuk mengerahkan kesanggupannya untuk mencapai potensi dirinya hingga mencapai aktualisasi diri yang maksimal. Tiap langkah yang manusia ambil merupakan sebuah *jalan setapak* (path's) tersendiri yang telah ditakdirkan padanya. Makadari itu, penulis berharap untuk setiap elemen yang terkait dengan penulisan makalah/artikel ini apakah itu pembaca, penulis, maupun teman diskusi, diberikan kelonggaran hati, kelapangan dada, dan kesanggupan jiwa untuk terus mengembangkan dirinya hingga akhir hayatnya.

BAB 9

STIGMATISASI ANAK RETARDASI MENTAL

Kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga merupakan hal yang tentu didambakan oleh setiap pasangan suami istri, salah satunya memiliki keturunan yang sehat dan normal. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang dinyatakan bahwa keturunan yang mereka miliki dinyatakan mengalami kelainan, cacat atau kekurangan, atau yang biasa disebut penyandang disabilitas. Hal tersebut memang bukan hal yang mudah untuk diterima begitu saja, umumnya orang tua atau pasangan suami istri yang mengalaminya akan memiliki dua macam reaksi yang berbeda. Sebagian orang tua akan menunjukkan reaksi negatif seperti merasakan kesedihan mendalam, menyangkal, sukar menerima, atau menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya, bahkan menolak keberadaan sang anak dengan berusaha menyembunyikan atau menitipkan di panti asuhan. Sedangkan sebagian yang lain tetap berbesar hati dengan bereaksi secara positif seperti tetap menerima kehadiran sang anak bagaimanapun keadaannya, berusaha merawat dan mendidik anak mereka dengan berlimpah kasih sayang (Hidayatullah & Hidayati, 2021).

Astuti, dkk (2023) tidak seorangpun yang berkeinginan untuk dilahirkan ke dunia dalam keadaan kekurangan atau cacat. Meski demikian, tidak sedikit dari orang-orang yang cacat atau penyandang disabilitas memiliki kelebihan yang Tuhan anugerahkan pada mereka. Terlahir cacat bukan artinya tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Berbicara terkait istilah yang dilekatkan pada anak-anak yang mengalami keadaan ini disebut anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dalam sejarahnya, anak berkebutuhan khusus (ABK) mengalami dinamika perubahan yang serius karena meluasnya pandangan serta sikap dari orang-orang terhadap anak

berkebutuhan khusus. Jika melihat jauh ke belakang, saat itu anak-anak yang menyandang disabilitas akan disembunyikan di dalam rumah dan sebisa mungkin agar tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Mereka yang memiliki anak penyandang disabilitas ini menganggap bahwa hal itu adalah aib keluarga atau kutukan dari Tuhan. Seiring waktu berjalan, mulai ada perubahan pandangan dari masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas atau ABK. Masyarakat secara perlahan mulai mengakui dan menghargai keberadaan mereka sebagai manusia yang sama dengan yang lainnya.

Anak berkebutuhan khusus dari cirinya merupakan individu yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat dialami oleh mereka dan membutuhkan layanan atau bantuan khusus agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang mana hal itu tentunya menambah beban mental yang mereka alami. Disabilitas sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya tunadaksa, tunawicara, tunarungu, tunagrahita, tunanetra dan tunalaras.

Penggolongan anak berkebutuhan khusus menurut *Individuals with Disabilities Education Act Amendments* (1997) yang ditinjau kembali pada tahun 2004 dalam Karin, dkk (2023) antara lain: tunanetra merujuk pada anak yang mengalami gangguan daya penglihatan secara menyeluruh atau sebagian. Tunarungu adalah seorang anak yang mengalami gangguan pada sistem pendengarannya yang menghalanginya untuk mendengarkan suara dari sumber lain selain dirinya sendiri. Tunalaras, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma masyarakat, sehingga selalu mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain. Tunadaksa adalah anak-anak yang mengalami gangguan pada alat gerak tetap mereka, seperti

otot, sendi, dan tulang. Tunagrahita, anak yang mengalami keterbelakangan mental dan memiliki IQ rata-rata di bawah 70. *Gifted*, anak yang memiliki potensi kecerdasan yang lebih tinggi daripada anak-anak seusianya. Autis, anak yang memiliki gangguan saraf. Hiperaktif atau ADHD, anak yang sering bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu lima hingga sepuluh menit.

Stigmatisasi

Erving Goffman (Rakhmania, 2019), mendefinisikan stigma sebagai semua atribut fisik dan sosial yang melekat pada individu, yang dapat mengurangi identitas sosial individu dan mengakibatkan penolakan terhadap dirinya. Di sisi lain, Sceid dan Brown (Widyastutik & Pribadi, 2021) menjelaskan stigma sebagai suatu peristiwa saat individu diberi label atau stereotip dan mengalami diskriminasi. Pelekatan stigma terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya sesuatu yang dianggap berbeda dari individu tersebut dan dianggap tidak wajar.

Goffman (Widyastutik & Pribadi, 2021) membagi stigma menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah *abominations of the body*, yang berarti stigma yang terkait langsung dengan kecacatan fisik seseorang, seperti tuli, pincang, atau buta. Kategori kedua adalah *abominations of individual character*, yang berarti stigma yang terkait langsung dengan keburukan karakter individu, seperti pemabuk dan homoseksualitas. Ketiga, *stigmatisasi suku, agama, atau bangsa* disebut *tribal stigma*. Ini seperti keberadaan suku Papua yang minoritas di tanah atau pulau Jawa.

Dampak dari suatu stigma dengan stigma yang lain tidak dapat disamaratakan, ini tergantung pada besaran perbedaan yang dibangun kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa penyandang disabilitas, seperti *cerebral palsy*, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, tunanetra

dan autisme lebih berpotensi untuk diberikan stigma oleh masyarakat karena perbedaan yang begitu riil dapat dilihat dari ciri terluar atau fisik dan mental yang sulit untuk disembunyikan dan dapat diamati, jika dibandingkan stigma terkait kesukuan ataupun stigma moral lainnya. (Nisa, 2021).

Menurut Goffman, ada dua jenis orang yang simpatik dan mendukung orang yang terkena stigma. Yang pertama adalah mereka yang juga terkena stigma di masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan saran dan dukungan karena mereka juga mengalami hal yang sama. Sementara itu, yang kedua adalah mereka yang menjadi dekat dengan orang yang terkena stigma dalam situasi tertentu. Goffman menggambarkan orang-orang dari tipe kedua: mereka harus menunggu untuk diterima oleh orang yang terkena stigma sebelum dianggap "wise". Selain itu, Goffman membagi orang-orang yang dianggap "wise" ke dalam dua jenis; mereka yang dekat dengan orang yang terkena stigma karena pekerjaan mereka, seperti perawat, polisi, dan sebagainya; dan mereka yang dekat dengan orang-orang yang terkena stigma karena hubungan sosial mereka, seperti teman dan keluarga (Widyastutik & Pribadi, 2021).

Setiap orang dapat mengalami, merasakan, dan melakukan stigmatisasi. Seringkali, proses stigmatisasi terjadi melalui kontak sosial yang berkepanjangan yang terjadi dalam rentang budaya masyarakat. Setiap orang yang berinteraksi belajar mengenali berbagai nilai baik dan buruk saat berhadapan dengan orang lain. Pelekat berbagai tanda, label, stereotip dilakukan untuk menjaga keteraturan dalam upaya kontrol sosial. Sebagai contoh, agen sosial masyarakat umum menyebut penyandang disabilitas dengan "cacat", profesional medis menetapkan label "penderita penyakit mental", dan sistem hukum menetapkan label "pelaku tindak kriminal". Ini adalah beberapa stigma yang berasal dari

masyarakat umum (*public stigma*), penyedia layanan atau sumber jasa (*provider-based stigma*), dan struktur kelembagaan (*structural stigma*). Di lain sisi ada stigma diri, juga dikenal sebagai *self-stigma*, adalah ketika seseorang menginternalisasi perspektif masyarakat dengan mengakui keadaan dan peran mereka sendiri. Konsekuensi akhir dari proses stigmatisasi ini berdampak pada ketimpangan sosial hingga berbagai perilaku diskriminasi.

Retardasi Mental

Setiap orang tua umumnya berharap agar kelahiran anaknya disertai dengan kondisi sehat dan memiliki pertumbuhan yang optimal. Namun, tidak semua harapan orang tua tersebut berjalan dengan semestinya. Ada beberapa anak yang harus terlahir dalam kondisi kurang sempurna, cacat, atau berkebutuhan khusus, salah satunya adalah retardasi mental atau tunagrahita (Kosasih & Virlia, 2016).

Retardasi mental atau "Tunagrahita" berasal dari kata "tuna", yang berarti merugi, dan "grahita", yang berarti pikiran. Tunagrahita berarti gangguan mental. Tunagrahita didefinisikan sebagai kelainan fungsi kognitif dengan IQ rata-rata 84 atau kurang, menurut *American Association on Mental Deficiency*. Anak tunagrahita mengalami masalah perkembangan mental dan intelektual, yang berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptif mereka. Anak tunagrahita menghadapi kesulitan dalam penyesuaian tingkah laku, yang menghalangi mereka untuk memiliki kemandirian yang sesuai dengan kemandirian dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan anak-anak normal lainnya..

Kosasih dan Virlia (2016) mengemukakan anak-anak dengan retardasi mental berbeda dari anak-anak normal.

Perkembangan fisik anak-anak dengan retardasi mental biasanya lebih rentan terhadap penyakit daripada anak-anak normal. Perkembangan kognitif anak dengan retardasi mental menunjukkan keterbatasan dalam memori jangka pendek, ketidakmampuan untuk menggunakan strategi pemecahan masalah yang tepat (masih menggunakan *trial-and-error*), dan kurangnya kemampuan kognitif. Anak-anak dengan retardasi mental juga cenderung melakukan hal-hal seperti memukul kepala sendiri, terjatuh, menggigit, dan mencakar diri sendiri.

Salah satu gangguan perkembangan intelektual yang paling sering terjadi pada anak adalah retardasi mental. Penurunan kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik serta penurunan kemampuan sosial adalah tanda kondisi kilinis (Hartatik, 2021). Retardasi mental, menurut Hidayatullah dan Hidayati (2021), didefinisikan sebagai penurunan intelektual yang secara signifikan di bawah rata-rata disertai dengan kurangnya berbagai kemampuan adaptif, seperti mengurus diri sendiri atau melakukan aktivitas okupasional, yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Batas ini dibuat untuk mengidentifikasi gangguan perkembangan.

Retardasi mental diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Terdapat empat tingkat retradasi mental: *mild* (ringan), yang mengidentifikasi berdasarkan skor IQ antara 50 atau 55 dan 70; *moderate* (sedang), dengan kirsaran IQ 35-40 sampai 50-55; *severe* (berat), dengan IQ berkisar antara 20-25 sampai 35-40; dan *profound* (sangat berat) dengan skor IQ di bawah 20-25 (American Psychiatric Association dalam Hidayatullah & Hidayati, 2021).

Dinamika Stigma terhadap Penderita Retardasi Mental

Stigmatisasi retardasi mental saat ini merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi pengasuh individu retardasi mental. Stigmatisasi ini menumbukan beban bagi pengasuh,

diantaranya stres fisik, psikologis, emosional, sosial, dan keuangan sebagai akibat dari pengalaman peduli, yang menimbulkan beban bagi keluarga dan menurunkan harga diri. (Lefley dalam Hartatik, 2021).

Mangunsong (dalam Mulyana dkk., 2019) mengatakan perlakuan diskriminasi sering ditunjukkan masyarakat kepada anak retardasi mental, seperti bullying dan menjadikan anak retardasi mental sebagai bahan lelucon karena menganggap anak retardasi mental sebagai anak aneh, idiot, konyol, respon yang tidak layak pun turut didapatkan oleh orang tua anak retardasi mental saat mencoba menegur masyarakat yang merunding anaknya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari, dkk (2017) menemukan bahwa anak retardasi mental diketahui kurang peduli terhadap lingkungannya sehingga masyarakat mengenalnya dengan istilah idiot. Stigma yang terus muncul dalam masyarakat dapat merugikan dan memperburuk kondisi anak retardasi mental. Stigma dapat ditandai dengan label, stereotip, separasi, dan diskriminasi.

Orang tua yang memiliki anak retardasi mental, terutama orang tua, tidak hanya menghadapi stigma tetapi juga mengalami kesulitan dalam hidup mereka sendiri. Beban keluarga adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami keluarga dan mencakup perawatan, pengasuhan, biaya pendidikan yang meningkat, dan pengawasan kesehatan anak (Mulyana dkk., 2019). Penelitian oleh Purba (2018) mengemukakan bahwa peningkatan beban yang didapatkan pihak keluarga yang memiliki anak retardasi mental berpengaruh pada psikososial keluarga akibat stress dalam merawat.

Stigma dapat menyebabkan masyarakat percaya bahwa anak-anak dengan retardasi mental dapat membahayakan dan membuat mereka tidak nyaman (Rakhmania, 2019). Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana, dkk. (2019) bahwa sulit

untuk mengubah stigma masyarakat dan karena pengetahuan masyarakat yang rendah menjadikan penerimaan kondisi anak retardasi mental di tengah masyarakat adalah hal yang sulit.

Penelitian oleh Astuti, dkk (2023) menegaskan banyak stigma masyarakat menyatakan bahwa orang tua anak ceroboh atau memiliki karma buruk karena kesalahan orang tua sebelumnya. Selain itu, masyarakat percaya bahwa anak-anak dengan retardasi mental akan berbahaya bagi mereka karena mereka khawatir akan melempar benda atau hal lainnya. Keterbatasan intelektual yang dialami anak-anak dengan retardasi mental menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mempelajari norma-norma masyarakat dan berdampak pada orang-orang di sekitar mereka yang mengalami kesulitan penyesuaian sosial.

Menurut Berger (Suyatno dkk., 2022) Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang diwariskan. Pemahaman atau pengetahuan lokal atau tradisional hampir ada di setiap kelompok masyarakat dari zaman kuno hingga modern, terutama di masyarakat yang hidup dalam sistem kekerabatan yang kuat. Takhayul mitos, pamali, hukum karma, dan istilah lainnya sering diciptakan, diubah, dan dikembangkan menjadi sesuatu yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk mitos bahwa orang tua atau keluarga melakukan kesalahan yang menyebabkan anak menderita disabilitas.

Perwujudan stigma ini juga dapat dilihat dari perkataan masyarakat sebagai respon negatif terhadap anak retardasi mental yang diberikan dalam bentuk kata kasar, hasutan, dan kalimat ejekan. Perilaku masyarakat ini dikarenakan adanya perbedaan yang begitu nampak baik dari segi fisik maupun karakter yang terdapat pada diri anak retardasi mental. Masyarakat meyakini bahwa anak retardasi mental sebagai anak yang ternodai, anak yang aneh, tidak layak untuk bersosial, dan membahayakan (Rakhmania, 2019).

Penelitian oleh Ridho dan Hilman (2021) yang dilakukan Kabupaten Ponorogo menemukan adanya stigma “kampung idiot” yang dilekatkan pada desa Sidoharjo yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan dalam desa tersebut banyak warganya merupakan penderita retardasi mental, sebanyak 138 orang di dalam desa ini merupakan penderita retardasi mental atau mencapai 2,4% dari total jumlah penduduk desa tahun 2018 yaitu 5.714 penduduk.

Stigma masyarakat dapat menyebabkan orang tua anak retardasi mental mengucilkan dan enggan mengakui keberadaan anak sendiri. Tidak menutup kemungkinan orang tua merasa akan malu sebab memiliki anggota keluarga yang mengalami retardasi mental dan berusaha menyembunyikannya dari masyarakat. (Mulyana dkk., 2019).

Stigma Diri Keluarga Anak Retardasi Mental

Berada dalam budaya yang stigmatisasi terhadap anak-anak dengan retardasi mental membuat pengasuh lebih rentan terhadap stigma diri dan memperburuk beban mereka sendiri. Stigma masyarakat terhadap keluarga dan kerabat pengasuh menambah tekanan psikologis mereka. Stigma diri keluarga mempengaruhi kognitif, afektif, dan perilaku keluarga sehingga keluarga memberi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Stigma diri ini dapat menyebabkan seseorang merasa terbebani karena memiliki anggota keluarga yang bodoh, aneh, atau cacat. Oleh karena itu, stigma diri berkontribusi secara langsung pada kesulitan yang dialami pengasuh dalam keluarga ini. (Hartatik, 2021).

Faktor internal adalah faktor dari dalam keluarga atau pengasuh, seperti stigma diri, yang akan mempengaruhi harga diri mereka saat mengurus anak retardasi mental. Stigma diri berdampak pada harga diri seseorang. Harga diri yang dipengaruhi oleh stigma diri menyebabkan penderita

melakukan hal-hal yang tidak mungkin dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Pengasuh orang dengan penyakit mental menghadapi tantangan psikososial selain beban finansial dan fisik. Selain itu, data demografi responden, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status pekerjaan juga turut menjadi faktor yang memengaruhi keyakinan diri pengasuh (Hartatik, 2021).

Dengan harga diri keluarga yang terus merosot akibat tingginya stigma diri yang terbentuk yang diperoleh dari stigma masyarakat akan memperburuk beban yang dialami oleh pengasuh atau keluarga. Hal ini disebabkan oleh perasaan terbebani yang mulai muncul ke permukaan lantaran harus mengurus anggota keluarga dengan retardasi mental. Lefley (Hartatik, 2021) berpendapat stigmatisasi retardasi mental menimbulkan stress fisik, psikologis, emosional, sosial dan keuangan yang terkait dengan pengalaman mengurus atau mengasuh sehingga menjadi beban bagi keluarga dan penurunan harga diri.

BAB 10

MENGATASI STIGMA NEGATIF MASYARAKAT TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

UUD 1945 menjamin dan menghormati harkat dan martabat manusia yang bersifat kodrati, bersifat universal, abadi, abadi, dihormati, dipelihara, dan dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diperuntukkan bagi warga negara yang sehat jasmani dan rohani, namun juga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi, memajukan dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya akan menjadikan mereka mandiri dan sejahtera. (Lindy Mustika, Hirvan Yoki Pradikta, 2022).

Salah satu bentuk pencapaian kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas adalah melalui pelayanan kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan terbaik merupakan salah satu hak mutlak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Pasal 12 Sub-C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa “penyandang disabilitas berhak atas kesetaraan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Selain itu, ayat 3 Pasal 34 berbunyi: “Negara mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.” Pasal ini berarti setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan terbaik. Penyandang disabilitas

mempunyai hak atas layanan kesehatan yang dapat diakses dan pendanaan yang terjangkau (gratis dan terjangkau).

Namun kenyataan yang dialami penyandang disabilitas saat ini adalah masih adanya stigma ketidaksempurnaan yang membuat penyandang disabilitas tidak bisa diakui sepenuhnya oleh masyarakat. Penyandang disabilitas masih jauh dari keadilan, dan banyak penyandang disabilitas yang masih mengalami diskriminasi dalam memenuhi haknya atas layanan medis. Minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas dan belum mumpuninya tenaga kesehatan untuk menangani penyandang disabilitas menjadi salah satu penyebab kesenjangan tersebut. (Lindy Mustika, Hirvan Yoki Pradikta, 2022)

Penyandang disabilitas juga tergolong kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang paling sering mengalami perlakuan diskriminatif dan seringkali tidak terpenuhi haknya. Hal ini bukannya tidak masuk akal, karena penyandang disabilitas seringkali dianggap paling terdiskriminasi, dan penyandang disabilitas mempunyai banyak hak lain yang tidak terwujud. (Fritsch Ndomanu, 2020)

Penyandang disabilitas mempunyai status, hak dan kewajiban yang sama dengan penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, yang tujuannya adalah untuk melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk praktik diskriminatif, terutama untuk mencegah berbagai pelanggaran hak asasi manusia. (Fritsch Ndomanu, 2020) Dalam masyarakat banyak terdapat stigma dan prasangka terhadap penyandang disabilitas, khususnya mereka yang terpaksa mengemis di persimpangan jalan (lampu merah). Stigma ini sering berakar pada ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran tentang kondisi serta kebutuhan mereka.

Di persimpangan jalanan kota yang sibuk, seringkali kita menjumpai pemandangan yang mengundang keprihatinan: penyandang disabilitas yang mengulurkan tangan meminta belas kasihan di lampu merah. Fenomena ini, yang menjadi saksi bisu atas ketidaksetaraan sosial, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan individu-individu yang memiliki keterbatasan.

Dengan banyaknya penyandang disabilitas di Indonesia, maka perlu didukung proyek dan kegiatan yang mengangkat prinsip persamaan hak bagi penyandang disabilitas, yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan sarana dan prasarana khusus untuk mendukung penyandang disabilitas. menikmati hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan pemerintah daerah adalah menghormati, melindungi, mewujudkan, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai hakikat hak asasi manusia. Salah satu upaya untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak-hak tersebut adalah terhadap penyandang disabilitas. (Fritsch Ndomanu, 2020).

Sejak disahkannya Pancasila, peraturan mengenai hak asasi manusia telah ada, meskipun secara tersirat, sebagai norma dasar negara Indonesia. Keduanya berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang terkandung dalam Pancasila.

Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) merupakan tonggak sejarah dan titik awal kemajuan

dalam penguatan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini menyoroti berbagai hak dan norma umum bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini menetapkan tugas dan kewajiban negara pihak dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk menyesuaikan kebijakan nasional, mencapai lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dan menyediakan akomodasi yang wajar dan lingkungan bebas hambatan di semua sektor material dan non-material. (Hilmi dan Marwan, 2019)

Stigma yang melekat pada penyandang disabilitas, yang memaksakan peran sebagai pengemis di batas-batas masyarakat, tidak hanya mencerminkan prasangka dan ketidakpahaman tetapi juga mengungkap kegagalan sistem sosial dan ekonomi dalam menyediakan jaring pengaman yang memadai. Artikel ini berupaya untuk menyelidiki asal-usul dan pengaruh stigma tersebut terhadap kehidupan penyandang disabilitas, mengeksplorasi dampak psikologi dan sosial yang ditimbulkannya, serta membahas langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok yang sering terabaikan ini.

Penyandang Disabilitas Penting untuk dilakukan perubahan pengertian difabel dengan maksud sebagai berikut:

1. Dari segi kebahasaan, kata disabilitas bernuansa negatif karena penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok minoritas atau aktivitas yang dapat mengganggu dan mengacaukan aktivitas normal masyarakat.
2. Kata “disabilitas” ada karena adanya suatu kekuasaan yang memberikan suatu doktrin pada suatu identitas sosial yang dianggap kurang. Karena di mata masyarakat, disabilitas itu sendiri berarti tidak berguna,

menghancurkan segalanya, dan harus dibuang seperti penyandang disabilitas pada umumnya.

3. Manusia adalah manusia sempurna yang diciptakan Tuhan, derajat dan status tertingginya ada yang normal dan tidak normal, namun ada kelebihan dan kekurangannya. kekurangan. Masing-masing mempunyai kekurangannya masing-masing. Manusia diciptakan setara dalam hal hak, hukum, dan lain-lain.
4. Kata “penyandang disabilitas” menyebabkan perlakuan masyarakat yang sangat buruk terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat memandang disabilitas sebagai identitas seseorang yang mempunyai sesuatu yang lebih rendah dari orang normal. Disabilitas merupakan salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh orang lain yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami dan terus dialami oleh penyandang disabilitas.
Antara lain dampak psikososial penyandang disabilitas.
5. Menciptakan jarak sosial,
6. Selalu merasa bersalah dengan keadaannya,
7. Penyandang disabilitas melihat dirinya sebagai urusan yang belum selesai, tidak lengkap, tidak mampu, dan sebagainya.
8. Kehadirannya tidak diinginkan,
9. Mengalihkan perhatian dan mengganggu,
10. Selalu menjadi korban,
11. Stigma buruk
12. Pesimistis
13. Digunakan sebagai bahan uji.
14. Selalu merasa cemas dan sedih.
15. Dia tidak menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain.

16. Duniaku sangat berbeda dengan dunia orang lain. (Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, 2022).

Pada hari-hari biasa, juga kita sering melihat para penyandang disabilitas yang mengemis di persimpangan jalan lampu merah untuk meminta bantuan. Namun, sayangnya stigma terhadap mereka seringkali membuat banyak orang enggan memberikan bantuan. Stigma ini tidak hanya merugikan mereka secara ekonomi, tetapi juga secara emosional dan sosial. Penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi stigma ini agar mereka dapat hidup dengan lebih aman.

Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa keberadaan penyandang disabilitas yang mengemis di persimpangan jalan lampu merah bukanlah pilihan yang mereka inginkan. Kebanyakan dari mereka melakukan hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena seringkali mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau akses layanan kesehatan yang memadai. Kita perlu mengubah paradigma kita dan memandang mereka sebagai individu yang berjuang untuk bertahan hidup, bukan sebagai objek pemandangan yang mengganggu.

Selain itu, kita juga perlu mengatasi stigma bahwa penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah hanya memanfaatkan simpati orang lain. Sebaliknya, kita harus melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk hidup layak. Kita bisa membantu dengan memberikan bantuan langsung, seperti memberikan makanan atau uang, namun yang lebih penting adalah membantu mereka untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. (Baturangka, 2019)

Tak kalah pentingnya, pendekatan komprehensif untuk mengatasi stigma ini juga melibatkan pendidikan masyarakat.

Kita perlu terus melakukan sosialisasi dan pembelajaran tentang pentingnya menghormati dan membantu sesama manusia tanpa memandang status atau kondisi fisik. Dengan demikian, diharapkan stigma terhadap penyandang disabilitas dapat berkurang, dan mereka dapat hidup dengan lebih dihargai dan diterima di masyarakat.

Terakhir, kita juga perlu memastikan bahwa kebijakan publik dan infrastruktur kota mendukung keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai, baik secara fisik maupun sosial, mereka akan lebih mampu untuk mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus bergantung pada kesemis di lampu merah.

Dengan pemahaman yang lebih baik, sikap yang inklusif, dan kebijakan yang mendukung, kita dapat mengatasi stigma terhadap penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi semua individu, tanpa kecuali.

Penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah seringkali menjadi pemandangan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik tindakan mereka tersebut, seringkali terdapat stigma dan prasangka dari masyarakat. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka secara ekonomi, tetapi juga secara emosional dan sosial. Penting bagi kita untuk memahami akar permasalahan ini dan menciptakan langkah-langkah nyata untuk mengatasi stigma masyarakat terhadap mereka.

Salah satu stigma yang sering muncul adalah anggapan bahwa penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah hanya memanfaatkan simpati orang lain. Sebaliknya, kita perlu memahami bahwa keberadaan mereka di sana sebagian besar merupakan hasil dari kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau akses layanan kesehatan yang memadai. Kita perlu melihat

mereka sebagai individu yang berjuang untuk bertahan hidup, bukan sebagai objek pemandangan yang mengganggu.

Selain itu, stigma juga seringkali muncul dalam bentuk ketidakpedulian atau bahkan persetujuan untuk memberikan bantuan. Banyak orang yang enggan memberikan bantuan kepada mereka karena terpengaruh oleh stigma bahwa penyandang disabilitas hanya mencari perhatian atau bahkan dianggap sebagai beban masyarakat. Kita perlu mengubah paradigma kita dan memandang mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk hidup layak.

Langkah pertama dalam mengatasi stigma ini adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Edukasi tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dapat membantu mengubah persepsi dan sikap negatif yang mungkin ada. Melalui pendekatan yang komprehensif, masyarakat dapat belajar untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman kemampuan dan keterbatasan manusia. (Febrianto & Rifqi, 2017)

Tak hanya itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan infrastruktur kota mendukung keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang memadai, baik secara fisik maupun sosial, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus bergantung pada kesemis di lampu merah.

Dengan langkah-langkah konkrit dan kepedulian yang nyata, stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah dapat diatasi. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan bersahabat bagi semua individu, tanpa kecuali. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih berempati dan menghargai keberagaman, serta memberikan

kesempatan yang adil bagi semua untuk hidup dengan martabat dan keberanian. (Febrianto & Rifqi, 2017)

Stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa pokok pembahasan yang dapat menjadi fokus dalam mengatasi stigma ini meliputi:

1. **Penyebab Stigma dan Diskriminasi**
Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi disabilitas, stereotip negatif, dan ketidaktahuan akan hak-hak mereka. (Liem, 2017)
2. **Peran Masyarakat dalam Mengurangi Stigma**
Pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan dan pemberdayaan kelompok-kelompok dukungan sebaya (KDS) serta peran mahasiswa dalam mengurangi stigma dan diskriminasi di lingkungan sekitar. (Stigma Dan Diskriminasi Terhadap ODHA, Tugas Dan Tanggung Jawab Siapa? - Kebijakan AIDS Indonesia , 2014)
3. **Intervensi Sosial untuk Mereduksi Stigma**
Penghalang utama dalam penanggulangan stigma dan diskriminasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sosial untuk mereduksi stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam intervensi sosial termasuk dialog lintas iman, optimalisasi peran media massa, edukasi kepada masyarakat umum maupun petugas kesehatan, pemberian informasi kesehatan

reproduksi pada remaja, dan membentuk kelompok dukungan sebaya (peer support group). (Putra, 2021)

4. Kesadaran Hukum dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pentingnya kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menumbuhkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan yang ada. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat terwujud. (Nurkasihani, 2018)

5. Upaya Nasional untuk Mengatasi Stigma dan Diskriminasi

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk melaksanakan Empat Seruan Nasional Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Upaya nasional ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan seluruh jajaran kesehatan dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. (Rokom, 2014).

Dengan memperhatikan pokok-pokok pembahasan tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik di masyarakat tentang kondisi penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah, serta upaya konkret dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka.

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan mental juga dinilai terus meningkat. Hal ini tercermin dalam banyaknya komunitas, kampanye, obrolan di media sosial, dan karya film yang mengulas tentang kesehatan mental. Masyarakat perlu lebih peka terhadap kondisi kesehatan

mental diri sendiri dan orang lain, serta berani untuk berbicara dengan keluarga, sahabat, dan temui psikolog atau psikiater untuk mendapatkan diagnosa lebih lanjut. (Indonesia Masih Darurat Stigma Tentang Kesehatan Mental , nd).

Dalam konteks penyakit kejiwaan, melawan stigma juga dapat dilakukan dengan mengerti tentang pentingnya dukungan terhadap diri sendiri atau orang lain yang menderita gangguan kesehatan mental. Para ahli kesehatan jiwa juga telah mendiskusikan tentang pentingnya melawan stigma pada penderita gangguan kesehatan mental, dan hal ini menjadi penting untuk mengurangi diskriminasi publik terhadap mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. (Keningar, 2017).

Dari sudut pandang psikologi pendidikan, penting untuk memberikan edukasi tentang kesehatan mental sejak dini. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi kesehatan mental. (Ardani, nd 2021).

Dalam hal ini, terapi psikologis di bawah bimbingan psikiater merupakan metode utama untuk menangani gangguan kepribadian. Terapi ini bertujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi dan pikirannya dengan lebih baik. Informasi tambahan dari anggota keluarga, rekan kerja, atau teman terdekat juga sangat membantu dokter dalam menentukan diagnosis. Terapi psikologis ini dapat membantu individu yang mengalami gangguan kepribadian untuk mengatasi stigma dan mendapatkan perawatan yang tepat.(Gangguan Kepribadian , 2023).

Dari berbagai sumber yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa para ahli psikologi menekankan pentingnya intervensi psikologis, edukasi, dan dukungan masyarakat dalam mengatasi stigma terhadap penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah. Dengan pemahaman yang lebih

baik tentang kondisi kesehatan mental dan disabilitas, diharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada individu yang mengalami kondisi tersebut.

Mengatasi stigma dengan Mengedukasi masyarakat tentang stigma terhadap penyandang disabilitas

Kategorisasi dan perlakuan buruk terhadap individu penyandang disabilitas berasal dari persepsi bahwa mereka memiliki keterbatasan, menjadikan mereka bergantung pada bantuan orang lain dan pada dasarnya memiliki kelemahan, tidak mampu berfungsi karena kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, pengusaha yang mempertimbangkan perekrutan penyandang disabilitas mempertimbangkan faktor-faktor ini, meskipun pada kenyataannya mereka juga berhak atas persamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang bermartabat. (Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, 2022)

Komitmen pemerintah untuk memajukan hak asasi manusia terlihat jelas dalam fokusnya dalam menciptakan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang berarti. Hak-hak konstitusional penyandang disabilitas harus diatur dan diprioritaskan dengan baik, karena hal ini akan menumbuhkan masyarakat yang lebih inklusif yang menghargai dan mendukung martabat semua individu. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah dan warga negaranya, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di dunia kerja, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama untuk menghilangkan hambatan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Namun, pemenuhan kewajiban negara melampaui peraturan hukum; hal ini memerlukan jaminan masa depan dan partisipasi

jangka panjang penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.(Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, 2022).

Selanjutnya, dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi serta memenuhi sebagian dari haknya,negara wajib untuk berfokus pada yaitu diantaranya : (Baturangka dkk 2019)

1. Penggunaan Media Massa
Pemerintah dapat memanfaatkan media massa, seperti iklan dan pesan singkat, untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang kondisi penyandang disabilitas serta pentingnya mengurangi stigma terhadap mereka.
2. Pendidikan Sejak Dini
Pendidikan tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman serta hak asasi manusia dapat diberikan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
3. Kesadaran Hukum
Pentingnya menanamkan kesadaran hukum sejak dini dalam keluarga, sehingga anggota keluarga dapat memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan masyarakat. (Nurkasihani, 2018)
4. Peran Duta Perubahan Perilaku
Menedukasi masyarakat melalui peran duta perubahan perilaku untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan, termasuk penghargaan terhadap penyandang disabilitas. (KalbarOnline, 2020)
5. Masyarakat Umum
Masyarakat umum juga perlu terlibat dalam proses ini dengan membuka diri untuk menerima informasi

dan pemahaman baru tentang kondisi penyandang disabilitas.

6. Sekolah dan Pendidikan

Lembaga pendidikan memiliki peran dalam menyampaikan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada generasi muda.

7. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan program-program pendidikan serta sosialisasi yang bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kondisi penyandang disabilitas dan berperan aktif dalam mengurangi stigma terhadap mereka.

Terapi Psikologi Untuk Penyandang Disabilitas

Terapi psikologis dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi dan mengelola stigma terhadap penyandang disabilitas misal yang mengemis di lampu merah. Ada beberapa pendekatan terapi yang telah terbukti bermanfaat dalam mengatasi stigma, di antaranya adalah: (Hidayatullah, 2018).

1. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk membantu individu mengidentifikasi pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang mendasari stigma terhadap penyandang disabilitas. Melalui terapi ini, individu dapat belajar mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan realistis. Dengan demikian, CBT dapat membantu individu mengelola emosi dan sikap terhadap penyandang disabilitas dengan lebih sehat.

2. **Exposure Therapy**
Pendekatan terapi ini melibatkan paparan terkontrol terhadap situasi atau stimulus yang memicu stigma. Melalui paparan bertahap dan terkendali, individu dapat belajar untuk menghadapi dan mengelola ketakutan serta kecemasan terkait stigma terhadap penyandang disabilitas. Exposure therapy secara bertahap membantu individu untuk merespons situasi yang memicu stigma dengan cara yang lebih adaptif.
3. **Acceptance and Commitment Therapy (ACT)**
Terapi ini mengajarkan individu untuk menerima pikiran dan perasaan yang muncul terkait stigma, sambil tetap fokus pada nilai-nilai dan tujuan hidup yang penting baginya. Melalui ACT, individu dapat belajar untuk tetap berkomitmen pada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, meskipun mengalami stigma atau tekanan dari lingkungan sekitar.
4. **Group Therapy**
Terapi kelompok dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengurangi stigma, karena individu dapat berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi stigma terhadap penyandang disabilitas. Melalui terapi kelompok, individu dapat merasa didengar, dipahami, dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mengalami hal serupa.
5. **Dukungan Keluarga dan Sosial**
Terapi juga dapat melibatkan keluarga dan lingkungan sosial individu yang mengalami stigma. Dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial dalam proses terapi, individu dapat memperoleh dukungan yang kuat dalam menghadapi stigma, serta membangun lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung.

Dengan demikian, terapi psikologis dapat memberikan berbagai pendekatan yang efektif dalam mengurangi dan mengelola stigma terhadap penyandang disabilitas yang mengemis di lampu merah. Melalui terapi, individu dapat memperoleh keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi stigma, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan lingkungan sekitar.

Melalui kajian terhadap stigma dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang mengemis di persimpangan jalan, kita dapat memahami bahwa upaya mengatasi stigma ini bukanlah tanggung jawab individu saja, melainkan juga masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial. Pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah langkah utama dalam mencegah prasangka dan diskriminasi. Pemberdayaan ekonomi melalui program keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan inklusif dari pemerintah, dapat memberikan alternatif bagi penyandang disabilitas dari mengemis di lampu merah. Menuju inklusi sosial yang seutuhnya, segala bentuk stigma harus dihapus dan digantikan dengan dukungan yang memungkinkan semua warga, tanpa terkecuali, untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Mengubah Stigma Negatif Masyarakat terhadap ABK Down Syndrome untuk Meningkatkan Kualitas Hidupnya

Terdapat sebuah tantangan besar yang dirasakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus Down Syndrome dan keluarganya terutama orang tua, dikarenakan stigma negatif dari masyarakat. Stigma ini seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Wayani (dalam Azmi 2017), Down syndrome merupakan penyakit genetik yang menyebabkan

keterbelakangan fisik dan mental dengan ciri-ciri kondisi fisik tertentu. Secara umum, anak dengan down syndrome memiliki pertumbuhan dan perkembangan fisik yang relatif lambat. Keterbelakangan mental yang dialami anak down syndrome menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif, motorik dan psikomotorik.

Down syndrome adalah kelainan kromosom, biasanya disebabkan oleh kelebihan kromosom pada kromosom 21. Kemungkinan terdapat 46 kromosom dalam satu tubuh. 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu. Namun anak down syndrome mempunyai kelebihan kromosom 21. Kelainan ekstra atau kromosom ini terjadi pada saat sel membelah, sehingga dapat dikatakan anak down syndrome mempunyai 3 salinan kromosom 21. Kelainan Kromosom tersebut menyebabkan anak dengan down syndrome memiliki kekurangan dalam aspek kognitif, selain itu bentuk dari perilaku dari anak yang mengalami DS memiliki kemampuan ingatan jangka pendek yang sangat buruk namun memiliki kekuatan dalam kaitan kecerdasan visual special (Wijaya & Prastyo, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Tarmini dkk (2021), mengatakan bahwa penyandang down syndrome mendapatkan perhatian khusus untuk memiliki kehidupan yang setara. Dalam penelitian tersebut memperkirakan bahwa di dunia ada sekitar 3.000-5.000 anak terlahir dengan keadaan down syndrome per-tahunnya, sedangkan di Indonesia diperkirakan sekitar 300.000 orang penyandang down syndrome. Anak yang mengalami down syndrom pada umumnya memiliki kemampuan berbahasa yang lambat dan hanya bisa merespon secara singkat dan belum mampu merespon dalam suatu uraian yang panjang dan terstruktur, maka dari itu anak yang mengalami DS sangat memerlukan peran keluarga terkhusus orang tua dalam perkembangannya

serta dukungan untuk mereka dan sekaligus tantangan bagi orang tua dalam merawat anaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Koizumi & Kojima (dalam Kamil dkk, 2023) mendeskripsikan anak dengan berkebutuhan khusus DS memiliki kesulitan dalam memahami ekspresi dan keterlambatan bahasa dalam aspek tata bahasa, sehingga muncul beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan terapi obstructive sleep apnea, Obstructive sleep apnea (OSA) merupakan pengobatan yang biasanya diberikan pada anak DS untuk mengurangi tingkat depresi yang dialami pasien. Oleh karena itu, pengobatan jenis ini sering ditawarkan dengan tujuan memberikan solusi kepada pasien DS. Jenis terapi lain yang dapat digunakan untuk anak DS adalah terapi perilaku rasional emotif yang berfokus pada orang tua.

Banyak penelitian telah dilakukan pada bayi dengan DS jauh sebelum mereka dilahirkan, yang membantu mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hari kelahirannya. Bagi orang tua atau ibu hamil yang berada pada usia kehamilan trimester ketiga, agar dimonitor secara ketat dan diberikan perhatian eksklusif menjelang hari persalinan, baik dari segi nutrisi, pemantauan USG, dan deteksi dini penyebab DS. Hal ini dikarenakan banyak orang tua pasca melahirkan yang mengalami gangguan depresi yang berhubungan langsung dengan pandangan negatifnya terhadap masa depan, keadaannya sendiri dan orang lain ketika mengetahui anaknya menderita DS (Kamil dkk, 2023).

Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus salah satunya yakni *Down Syndrome*. *Down syndrome* berasal dari kata *Down syndrome*, yaitu sekelompok gejala abnormal yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom 21, artinya kromosom 21 memiliki tiga genom. Sering disebut Trisomi 21, gejala kelainan ini pertama kali dijelaskan oleh Langdon Haddon Down, seorang

dokter Inggris, pada tahun 1866. Sindrom Down, atau Down Syndrome, adalah jenis kelainan kromosom yang mempengaruhi keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Siapa yang menderita? Saat itu, penderita Down Syndrome sering disebut dengan orang Mongolia. Pasalnya, penderita Down Syndrome memiliki ciri-ciri yang mirip dengan orang Mongolia (Dewi & Sofian, 2019).

Penyandang Down Syndrome Memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya: memiliki tubuh yang pendek, mata yang agak miring ke atas, lipatan kulit kelopak mata atas yang menutupi sudut bagian dalam mata atau istilahnya (epicanthal fold), jembatan hidung agak lebar, telinga yang mungil, pendengaran rendah, leher yang pendek, tangan yang gemuk dan pendek, dan memiliki satu garis lurus pada telapak tangan atau (simian crease). Ada beberapa faktor yang mengakibatkan Anak mengalami down syndrome dikarenakan faktor genetik, faktor radiasi, faktor virus, dan faktor umur ibu maupun ayah dengan usia lahir ibu yang sangat tua yaitu sekitar 35 sampai 40 tahun dan lebih dari 14,15 tahun. Semakin tua usia seorang ibu, semakin besar kemungkinan ia melahirkan anak dengan sindrom Down (Matavia & Widayana, 2022).

Menurut Dayana (2023) Perkembangan bahasa pada anak down syndrome, seperti halnya perkembangan bahasa pada anak pada umumnya, dapat bervariasi tergantung pada tingkat perkembangannya dan intervensi yang diterimanya. Anak-anak dengan sindrom Down sering menghadapi tantangan dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Ciri khas perkembangan bahasa pada anak-anak dengan sindrom Down meliputi:

- 1) Ketidakmampuan berbicara: Anak-anak dengan sindrom Down sering kali mengalami keterlambatan bicara dan mungkin kesulitan mengucapkan kata-kata dengan jelas. Mereka mungkin memiliki pengucapan

- yang salah, gangguan vokal, atau sinyal yang mengekspresikan suara tertentu.
- 2) Keterbatasan kosakata: Anak-anak dengan sindrom Down mungkin memiliki pemahaman yang terbatas dan kesulitan memahami dan menggunakan kata-kata baru. Mencoba mempelajari kata-kata baru dan arti dari kata-kata tersebut.
 - 3) Kesulitan dalam struktur kalimat: Anak-anak dengan sindrom Down mungkin mengalami kesulitan mengatur kata-kata menjadi kalimat yang terstruktur dengan baik dan mungkin mengalami kesulitan memahami aturan tata bahasa dan menghasilkan kalimat tata bahasa.
 - 4) Kesulitan dalam komunikasi sosial: Anak down syndrome seringkali menghadapi kesulitan dalam komunikasi sosial. Mereka mungkin kesulitan memahami bahasa tubuh, mengenali ekspresi wajah, atau memahami aturan sosial dalam percakapan.

Ada beberapa tingkatan dari down Syndrome itu sendiri menurut Mauli (2024) tergantung dari karakteristik yang di miliki oleh anak Down Syndrome itu sendiri seperti berikut:

- 1) Anak dengan Down Syndrome ringan. Down Syndrome ringan biasanya mampu berbicara dengan lancar, namun mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam kosa kata mereka. Meski mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak, mereka masih bisa berpartisipasi dalam aktivitas akademik hingga batas tertentu. Misalnya, pada usia 16 tahun, mereka mungkin memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan anak berusia 12 tahun.
- 2) Anak down syndrome ringan. Anak dengan Down Syndrome sedang biasanya menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempelajari materi akademik. Umumnya, fokus utama mereka adalah mempelajari

bagaimana merawat diri sendiri dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika mereka mencapai usia dewasa, tingkat kecerdasan mereka biasanya setara dengan anak berusia 7 tahun.

- 3) Anak down syndrome berat dan sangat berat. Anak dengan Down Syndrome berat dan sangat berat biasanya memerlukan bantuan dan dukungan dari orang lain sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam merawat diri sendiri, memahami bahaya, dan berkomunikasi. Tingkat kecerdasan mereka biasanya berkembang hingga setara dengan anak normal berusia 3 atau 4 tahun. Ciri-ciri fisik mereka mungkin mencakup fitur wajah yang mirip dengan orang Mongol, hidung yang pendek, jarak antara kedua mata yang lebar, dan kelebihan kulit di sudut mata bagian dalam.

Maka dari itu seringkali pandangan masyarakat tentang ABK Down Syndrome masih banyak yang memandang sebelah mata anggapan masyarakat kebanyakan anak yang mengalami Down Syndrome susah untuk diajak berkomunikasi dan susah untuk dipahami seakan-akan anak Down Syndrome adalah sebuah kutukan bagi orang tua yang memiliki anak istimewa tersebut, padahal sebenarnya argumen-argumen bisa dipatahkan asalkan ditangani dengan baik dan tepat

Contoh kasus tahun lalu tepatnya 2023 viral wanita bernama Charlene sempat bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Surabaya bahkan sekarang dia menjadi konten kreator YouTube dan selama dia bekerja di restoran tersebut pengunjung sangat menyukai cara kerja Charlene itulah salah satu bentuk keterampilan anak DS dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dalam hal ini peranan orang tua lagi-lagi sangat dibutuhkan untuk mendidik anak

istimewa agar bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya walaupun mereka memiliki kekurangan.

Menurut Edward (dalam Situmeang,dkk 2023) Dalam mendidik anak orang tua harus memiliki pengetahuan tentang pola asuh yang benar, Pola asuh adalah cara membesarkan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mengajar, membimbing, mendisiplinkan dan melindunginya hingga mencapai kedewasaan dan membentuk tingkah laku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik serta sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Adapun strategi yang bisa dilakukan dalam mendidik anak dengan baik yaitu :

- 1) Bersikap lembut sebagai orang tua dan tunjukkan kasih sayang yang tulus.
- 2) Mendekati gangguan jiwa anak agar siap bercerita dan menjadi pendengar yang baik.
- 3) Teladan
- 4) Adil
- 5) Asosiasi
- 6) Berikan petunjuk yang baik dan benar ketika anak melakukan kesalahan
- 7) Bercerita

Dalam peranan pola asuh model pendidikan anak DS juga perlu diberikan pengajaran tentang kemandirian dan cara pendidikan kemandirian ini bisa digunakan untuk membuat anak down syndrome agar bisa mengontrol dirinya sendiri, mengurus dirinya sendiri serta memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki orientasi dan wawasan yang luas tetapi dengan catatan harus mengkondisikan keadaan dan perawatan anak down syndrome.

Adapun Tahapan perkembangan kemandirian pada anak down syndrome antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan permainan berupa video mandiri kepada anak down syndrome agar dapat menirukannya dengan benar.
- 2) Bercerita dapat meningkatkan komunikasi pada anak down syndrome..
- 3) Membuat model origami seperti amplop dan perahu dapat mengembangkan konsentrasi anak.
- 4) Potong, sobek dan tempelkan kertas yang berisi gambar berbagai benda.
- 5) Bermain puzzle secara tidak sadar melatih tangan dan kemampuan berpikir anak

Anak Down Syndrome juga bisa melakukan terapi yang tentunya dilakukan dibawah pengawasan ahli, yaitu:

- 1) Logoterapi untuk melatih keterampilan sosial. Karena anak down syndrome seringkali mengalami gangguan komunikasi. Oleh karena itu, terapi wicara merupakan solusi yang tepat bagi anak untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau teman bermainnya.
- 2) Terapi fisik untuk mencegah atau meminimalkan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh cedera atau penyakit.
- 3) Biasakan melakukan aktivitas rutin seperti merawat diri, menyapu halaman dan membersihkan kamar. Kegiatan kecil seperti ini bisa meningkatkan daya tanggap anak down syndrome.

Berdasarkan hasil yang telah disampaikan dan dijelaskan di atas, terlihat jelas bahwa peran orang tua sangat penting dalam mencapai keberhasilan akademik dalam kemandirian anak down syndrome. Karena banyaknya anak dengan Down Syndrome, mereka tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pola asuh yang baik dari orang tua agar kemandirian

dapat terlaksana pada anak down syndrome. Pola asuh orang tua atau peranan keluarga atau orang tua terhadap kemandirian anak. Peran ini tercermin dari gaya perilaku orang tua terhadap anaknya. Peran orang tua dalam kemandirian anak down syndrome sangat penting tidak hanya sebagai orang tua, namun juga sebagai pelatih/terapis. Orang tua harus memahami kebutuhan anak saat melatih anak down syndrome untuk mandiri (Situmeang,dkk 2023).

Anak dengan Down Syndrome (DS) juga memiliki karakteristik dan sifat yang unik, serta pengalaman hidup yang berbeda. Meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan tertentu, anak-anak dengan DS juga memiliki kelebihan mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang biasanya dimiliki oleh anak dengan Down Syndrome:

- 1) Mereka biasanya sangat sosial dan penuh kasih sayang, dengan kemampuan yang kuat untuk menikmati hidup.
- 2) Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, meskipun mungkin pada laju yang berbeda dari anak-anak lainnya.
- 3) Mereka seringkali memiliki persepsi yang kuat tentang dunia di sekitar mereka dan dapat berkomunikasi dengan cara yang unik dan kreatif.
- 4) Mereka mampu membentuk hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain.
- 5) Mereka seringkali menunjukkan kekuatan dalam bidang musik dan seni.

Namun, perlu diingat bahwa setiap anak dengan DS adalah individu yang unik dan mereka mungkin memiliki kelebihan dan tantangan yang berbeda-beda.

Anak dengan berkebutuhan khusus Down Syndrome adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus dikarenakan kelebihan kromosom, ditandai Ciri-ciri atau tanda klinis Sindrom Down meliputi keterbelakangan mental, tubuh yang pendek, hidung

lebar dan datar, wajah membulat, mulut selalu terbuka, kedua lubang hidung lebar, dan memiliki lipatan mata seperti ras Mongolia. Tetapi bukan berarti anak Down Syndrome harus kita takuti atau menganggap sebagai bencana melainkan harus dijaga dan di kasihi seperti anak pada umumnya dalam hal ini pendidikan dan pola asuh orang tua sangat berperan penting dalam proses perkembangan anak istimewa tersebut. Banyak metode pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak down syndrome seperti metode cerita, melatih kognitifnya dengan bermain puzzle, membuat model origami dan masih banyak lagi cara untuk melatih kognitifnya stigma masyarakat terhadap ABK down syndrome bisa diubah jika ditangani dengan baik dan benar selagi disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus terutama pada anak Down Syndrome.